



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

LKjP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2016



Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan kinerja ini berisikan analisa dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dijabarkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat"**. Untuk pencapaian visi tersebut ditetapkan 5 (Lima) Misi, 15 (Lima Belas) Tujuan serta 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Hasil pengukuran pencapaian target kinerja 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang diukur dengan 46 (empat puluh enam) indikator kinerja sebesar 135,05% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Rincian pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

MISI 1. Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi 1 memiliki 2 (dua) tujuan yaitu meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani, aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan dan penguatan kelembagaan agama dan adat.

Untuk pencapaian tujuan misi 1 ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran Misi 1 adalah sebesar 168,09% (**Sangat Baik**). Uraiananya ditampilkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1.1 Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	2,22	11,31	509,46

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		1.2 Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6	6,24	104,00
2.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	2.1 Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa suku, Agama, Ras dan antar golongan (SARA)	0	0	100
3.	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	3.1 Persentase penurunan kasus maksiat	10	6,7	67,00
4.	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	4.1 Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya KAN	90	54	60
RATA -RATA CAPAIAN MISI 1					168,09

MISI 2. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Misi 2 memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme, meningkatnya tata pemerintah yang baik, bersih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.

Untuk pencapaian tujuan misi 2 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran Misi 2 adalah sebesar 107,88% (**Sangat Baik**). Uraianannya ditampilkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	1.1 Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	86	87,91	102,22
2.	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	2.1 Perangkat daerah Provinsi menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersip dan Melayani (WBBM)	2	2	100,00
3.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah	3.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pmerintah Daerah	WTP	WTP	100,00
		3.2 Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov Sumbar	BB (70,52)	BB	100,00
		3.3 Indeks E-Government Provinsi	2,2	2,01	91,36
		3.4 Indeks Keterbukaan informasi publik	55	73,05	132,82
		3.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,5	2,46	98,40
4	Meningkatkan sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	4.1 Kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota	80	91,97	114,94

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
5	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	5.1 Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	70	91,81	131,16
RATA -RATA CAPAIAN MISI 2					107,88

MISI 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi.

Misi 3 memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkarakter, meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Untuk pencapaian tujuan misi 3 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran Misi 3 adalah sebesar 92,06% (**Sangat Baik**). Uraianannya ditampilkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,41	69,98	99,39
		1.2	Harapan lama sekolah	13,94	13,6	97,56
		1,3	Rata-rata lama sekolah	8,46	8,42	99,53
2.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	2.1	APM SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	73,15	73,08	99,90
		2.2	Angka Putus SMA	0,83	0,88	93,98
		2.3	Angka Putus SMK	0,82	1,53	13,41
		2.4	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan tinggi	42,98	31,37	72,99
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	3.1	Angka Harapan Hidup	68,79	68,66	99,81
4.	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	4.1	Total Fertility Rate (TFR) Per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15 s/d 49 tahun	2,61	2,79	93,10
		4.2	LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,22	0,71	141,80
5.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	5.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,74	100,06
		5.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,42	100,64
		5.3	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus /100.000 anak usia 6 – 18 tahun.	8,04	6,8	84,58
RATA -RATA CAPAIAN MISI 3						92,06

MISI 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Yang Tangguh , Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah.

Misi 4 memiliki 4 (empat) tujuan yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata berbasis kerakyatan, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani, menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Untuk pencapaian tujuan misi 4 ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran Misi 4 adalah sebesar 73,22% (**Cukup**). Uraianannya ditampilkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya pemeratan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Pertumbuhan ekonomi	5,58	5,26	94,27
		1.2 PDRB perkapita (Rp.Juta)	36,48	37,21	102,00
		1.3 Investasi (Rp.Trilyun)	3,11	4,87	156,59
		1.4 Peningkatan nilai ekspor	1,5	-2,28	-152,00
2	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	2.1 Skor pola pangan harapan	85	84,3	99,18
		2.2 Persentase peningkatan produksi pangan ;			90,7
		Padi	3,65	0,07	1,92
		Jagung	7,87	15,51	197,08
		Daging	1,22	1,16	95,08
		Telur	0,69	-1,05	-152,17
		Ikan	5,78	-3,23	-55,88
		Kakao	2	1,98	99,00
		Kopi	2	0,14	7,00
		Karet	2	0,33	16,50
3	Meningkatnya kesejahteraan Petani dan nelayan	3.1 Nilai tukar petani	106,15	97,87	92,20
4	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	4.1 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
		Wisatawan Nusantara	5	5,3	106,00
		Wisatawan Mancanegara	7,50	7,54	100,53
5	Menurunnya Jumlah penduduk miskin	5.1 Tingkat Kemiskinan	6,43	7,14	88,96
6	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	6,5	5,09	121,69
RATA -RATA CAPAIAN MISI 4					73,22

MISI 5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi 5 memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, meningkatkan pelaksanaan tata ruang

yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.

Untuk pencapaian tujuan misi 5 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama sebagai tolok ukurnya. Rata-rata capaian tujuan dan sasaran Misi 5 adalah sebesar 90,48% (**Sangat Baik**). Uraianannya ditampilkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas jalan propinsi	1.1 Persentase kemantapan jalan provinsi	69	69,24	100,35
2.	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	2.1 Rasio angka kecelakaan lalulintas	2,71	2,35	113,28
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air	3.1 Indeks kinerja infrastruktur irigasi propinsi	67,3	67,31	100,01
4.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	4.1 Rasio elektrifikasi	85	86,42	101,67
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	70,88	70,18	99,01
6.	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	6.1 Persentase penurunan lahan kritis	0,18	0,18	100,00
		6.2 Persentase jumlah kasus ilegal logging yang tertangani	100	100	100,00
		6.3 Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	5	82,88	1,657,60
7.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	7.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	71	100,00
RATA -RATA CAPAIAN MISI 5					90,48



KATA PENGANTAR



IRWAN PRAYITNO

Gubernur Sumatera Barat

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 23 yaitu Gubernur menyusun laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diupayakan sebaik mungkin, tetapi kami menyadari kualitas laporan ini belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Kendala yang dihadapi antara lain, pengukuran realisasi beberapa indikator kinerja ditetapkan oleh instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum diterbitkan pada saat penyusunan laporan ini.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus (*continuous*



improvement) seperti menyempurnakan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penguatan manajemen kinerja.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ini, disampaikan terima kasih.

Padang, Maret 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	xii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
--------------	-------------------------	----------

BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	12
---------------	---------------------------------	-----------

2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	12
--	----

2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	16
---	----

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
----------------	-----------------------------------	-----------

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	29
---	----

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	30
-------------------------------------	----

3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	34
--	----

Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	36
--	----

Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	40
--	----

Sasaran 1.1.3. Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	42
---	----

Sasaran 1.2.1. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	46
--	----

Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	50
--	----

Sasaran 2.1.2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	52
---	----

Sasaran 2.2.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	55
---	----

Sasaran 2.2.2. Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	65
---	----

Sasaran 2.3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	68
---	----

Sasaran 3.1.1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	72
---	----

Sasaran 3.2.1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	78
--	----

Sasaran 3.3.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	85
--	----

Sasaran 3.3.2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	90
--	----

Sasaran 3.3.3. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	94
--	----

Sasaran 4.1.1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	101
--	-----

Sasaran 4.2.1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	114
---	-----

Sasaran 4.2.2. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	129
--	-----

Sasaran 4.3.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	132
---	-----



Sasaran 4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	136
Sasaran 4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	139
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	142
Sasaran 5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	145
Sasaran 5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	147
Sasaran 5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	149
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	152
Sasaran 5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	155
Sasaran 5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	163
3.4.	Realisasi Anggaran	166
BAB IV	PENUTUP	169
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	7
-------------	--	---



DAFTAR TABEL

Tabel. 2. 1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran	13
Tabel. 2. 2	Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	16
Tabel 3.1.1	Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016	30
Tabel 3.3. 1.	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.1	35
Tabel 3.3. 2.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1.	36
Tabel 3.3. 3.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengumpulan Nilai Zakat, Infak dan Sadaqah yang Dikelola oleh Badan Amil Zakat.....	38
Tabel 3.3. 4.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Mendaftar dan Mendapat Porsi Keberangkatan Ibadah Haji	39
Tabel 3.3. 5.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2.....	40
Tabel 3.3. 6.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Konflik dalam Kelompok Masyarakat Bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).....	41
Tabel 3.3. 7.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.3.....	42
Tabel 3.3. 8	Daftar Jumlah Kasus Perbuatan Maksiat yang ditangani di Kabupaten/Kota Tahun 2016	43
Tabel 3.3. 9.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase penurunan kasus maksiat	44
Tabel 3.3. 10	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.2.....	46
Tabel 3.3. 11	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2.1	47
Tabel 3.3. 12.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya.....	48
Tabel 3.3. 13	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.1.....	50
Tabel 3.3. 14.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1	50
Tabel 3.3. 15.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	51
Tabel 3.3. 16.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2	52



Tabel 3.3. 17. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Menuju WBK/WBBM	53
Tabel 3.3. 18. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.2	54
Tabel 3.3. 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.1	55
Tabel 3.3. 20. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	56
Tabel 3.3. 21. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016	58
Tabel 3.3. 22. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov Sumbang	58
Tabel 3.3. 23. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik	61
Tabel 3.3. 24. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja EKPPD	63
Tabel 3.3. 25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.2	65
Tabel 3.3. 26. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	66
Tabel 3.3. 27. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.....	66
Tabel 3.3. 28. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.3	68
Tabel 3.3. 29. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3.1	68
Tabel 3.3. 30. Hasil Survei IKM tahun 2016.....	69
Tabel 3.3. 31. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Kerja Pelayanan Publik	69
Tabel 3.3. 32. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.1.....	71
Tabel 3.3. 33. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1	72
Tabel 3.3. 34. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia.....	73
Tabel 3.3. 35. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah.....	74
Tabel 3.3. 36. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah.....	75
Tabel 3.3. 37. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.2	77



Tabel 3.3. 38. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1	78
Tabel 3.3. 39. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C.....	79
Tabel 3.3. 40. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Putus SMA	80
Tabel 3.3. 41. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Putus SMK	81
Tabel 3.3. 42. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	82
Tabel 3.3. 43. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.3	84
Tabel 3.3. 44. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.1	85
Tabel 3.3. 45. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup.....	85
Tabel 3.3. 46. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.2	90
Tabel 3.3. 47. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49	91
Tabel 3.3. 48. Data Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.....	92
Tabel 3.3. 49. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk	93
Tabel 3.3. 50. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.3	94
Tabel 3.3. 51. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja IPG dan IDG.....	95
Tabel 3.3. 52. Komposisi Pejabat Struktural Di Provinsi Sumatera Barat	97
Tabel 3.3. 53. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi.....	98
Tabel 3.3. 54. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1.....	100
Tabel 3.3. 55. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1.....	101
Tabel 3.3. 56. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	102
Tabel 3.3. 57. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016	102



Tabel 3.3. 58. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi	103
Tabel 3.3. 59. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (T Rp)	104
Tabel 3.3. 60. PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2014-2016 Atas dasar harga berlaku (T Rp)	104
Tabel 3.3. 61. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja PDRB Perkapita	105
Tabel 3.3. 62. Realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2016	106
Tabel 3.3. 63. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Investasi	108
Tabel 3.3. 64. Ekspor Komoditi Non Migas Tahun 2015-2016	110
Tabel 3.3. 65. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor	111
Tabel 3.3. 66. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.2	113
Tabel 3.3. 67. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1	114
Tabel 3.3. 68. Skor PPH Sumatera Barat Tahun 2016 *) Angka sementara Tahun 2016	115
Tabel 3.3. 69. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan	115
Tabel 3.3. 70. Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014-2016	117
Tabel 3.3. 71. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Padi	117
Tabel 3.3. 72. Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014-2016	118
Tabel 3.3. 73. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Jagung	118
Tabel 3.3. 74. Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Daging Tahun 2014-2016	120
Tabel 3.3. 75. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Daging	120
Tabel 3.3. 76. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Telur	121
Tabel 3.3. 77. Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2014-2016	122
Tabel 3.3. 78. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Ikan	123
Tabel 3.3. 79. Produksi Perikanan Sumatera Barat secara Nasional	123



Tabel 3.3. 80	Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Kakao Tahun 2014-2016.....	125
Tabel 3.3. 81.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Kakao.....	125
Tabel 3.3. 82	Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Kopi Tahun 2014-2016.....	126
Tabel 3.3. 83.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Kopi.....	126
Tabel 3.3. 84	Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Karet Tahun 2014-2016.....	127
Tabel 3.3. 85.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Karet.....	127
Tabel 3.3. 86.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2.2.....	129
Tabel 3.3. 87	Nilai Tukar Petani per Sub sektor Tahun 2015-2016.....	129
Tabel 3.3. 88.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani.....	130
Tabel 3.3. 89	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.3.....	131
Tabel 3.3. 90.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3.1.....	132
Tabel 3.3. 91.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan.....	133
Tabel 3.3. 92	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.4.....	135
Tabel 3.3. 93.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.4.1.....	136
Tabel 3.3. 94.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2015-2016.....	137
Tabel 3.3. 95.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan.....	137
Tabel 3.3. 96.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.4.2.....	139
Tabel 3.3. 97.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran terbuka.....	140
Tabel 3.3. 98.	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1.....	142
Tabel 3.3. 99.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1.....	142
Tabel 3.3. 100.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Provinsi.....	143
Tabel 3.3. 101.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2.....	145



Tabel 3.3. 102. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	146
Tabel 3.3. 103. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.3.....	147
Tabel 3.3. 104. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi	148
Tabel 3.3. 105. Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2016	148
Tabel 3.3. 106. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.4.....	149
Tabel 3.3. 107. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	150
Tabel 3.3. 108. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2	152
Tabel 3.3. 109. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1.....	153
Tabel 3.3. 110. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja IKLH	153
Tabel 3.3. 111. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.2.	155
Tabel 3.3. 112. Hasil Evaluasi Penanaman Tahun 2011 di tahun 2016.....	156
Tabel 3.3. 113. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Lahan Kritis	156
Tabel 3.3. 114. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target 2017 dan 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Lahan Kritis	158
Tabel 3.3. 115. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target 2017 dan 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan jumlah titik panas.....	160
Tabel 3.3. 116. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.3	162
Tabel 3.3. 117. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.3.1.	163
Tabel 3.3. 118 Jumlah Peristiwa per Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	163
Tabel 3.3. 119. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021.....	164
Tabel 3.4.1 Anggaran dan realisasi anggaran program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016	166



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1.	Penerimaan Zakat, Infak dan Sadaqah se Sumatera Barat tahun 2015-2016.....	37
Grafik 3. 2.	Jumlah Kasus Perbuatan Maksiat tahun 2014-2016	44
Grafik 3. 3	Jumlah KAN yang Aktif di Kabupaten/Kota.....	47
Grafik 3. 4	Nilai Akuntabilitas 10 Provinsi di Indonesia.....	59
Grafik 3. 5	Indeks e-Goverment tingkat Provinsi Tahun 2015.....	60
Grafik 3. 6.	Skor EKPPD Provinsi di Pulau Sumatera	64
Grafik 3. 7	Trend Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat	75
Grafik 3. 8	Trend Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016).....	76
Grafik 3. 9	AHH Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	86
Grafik 3. 10	Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi dengan Nasional	86
Grafik 3. 11.	Tren Realisasi Persalinan dengan Tenaga Kesehatan tahun 2015-2016.....	87
Grafik 3. 12	Perbandingan AKB Provinsi Sumbar dengan Nasional	88
Grafik 3. 13.	Tren Realisasi Imunisasi lengkap anak usia di bawah 1 tahun 2015-2016.....	89
Grafik 3. 14.	Perbandingan TFR Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016.....	91
Grafik 3. 15	Perbandingan Realisasi IPG Nasional dengan Provinsi Tahun 2016	96
Grafik 3. 16	Penyebaran Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2016 (Ribu US\$).....	107
Grafik 3. 17	Penyebaran Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2016 (Juta Rp).....	107
Grafik 3. 18.	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.....	111
Grafik 3. 19	Kontribusi produksi perikanan Sumatera Barat terhadap Capaian Produksi Nasional	124
Grafik 3. 20	Tingkat Kemiskinan Tahun 2016.....	138
Grafik 3. 21.	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016.....	144
Grafik 3. 22.	Perbandingan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	150
Grafik 3. 23.	Sebaran Kasus Illegal Logging berdasarkan Kabupaten/Kota	158
Grafik 3. 24	Penurunan Kasus Illegal Logging tahun 2014-2016.....	159
Grafik 3. 25.	Jumlah titik panas berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	160
Grafik 3. 26.	Jumlah titik Panas Tahun 2014-2016	161



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada *Stakeholders* atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja terkait dengan keberhasilan, kegagalan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan di periode mendatang. Informasi kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai



dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah :

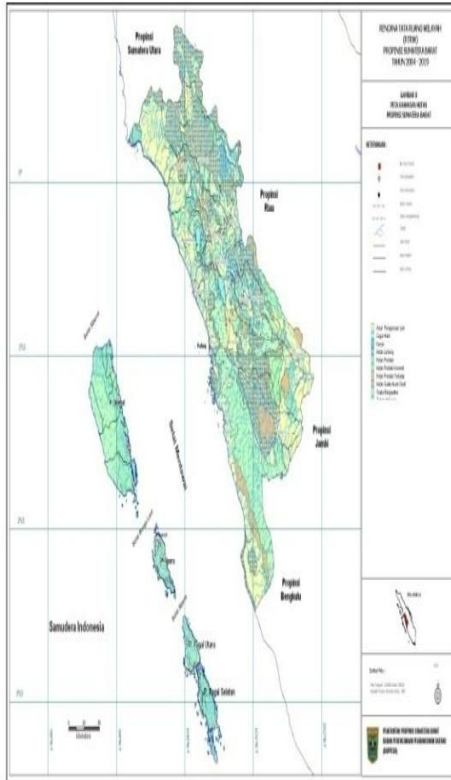
- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



1.4. GAMBARAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi



Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU), sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan antara 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan ± 42.297,30 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai kepulauan mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km. Perairan laut ini memiliki 185 pulau-pulau besar dan kecil.

Provinsi Sumatera Barat berada di Pulau Sumatera terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota dengan batas wilayah sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. Dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km², sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 23 Km².

1.4.1.2. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian >3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), areal dengan ketinggian 100-500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500-1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000-1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500-2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl. Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45%, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32% dan 23% daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berupa



jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian Timur Sumatera Barat.

1.4.1.3. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

1.4.1.4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi ini berasal dari pegunungan dan danau (Danau Ditas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Ditas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

1.4.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawahnya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang



cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan *hortikultura*.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim *tropika* basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 180 – 340 C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,50 C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 50 – 70 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 40– 60 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra *hortikultura* dan dapat dikembangkan sebagai daerah *agrowisata* potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

1.4.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.865,33 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km². Hasil proyeksi penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 berjumlah 5.196,30 ribu jiwa yang terdiri dari 2.584,2 penduduk laki-laki dan 2.612,1 ribu jiwa penduduk perempuan. Untuk tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data dari Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 5.452.274 yang terdiri atas 2.758.043 penduduk laki-laki dan 2.694.231 penduduk perempuan.



1.5. STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

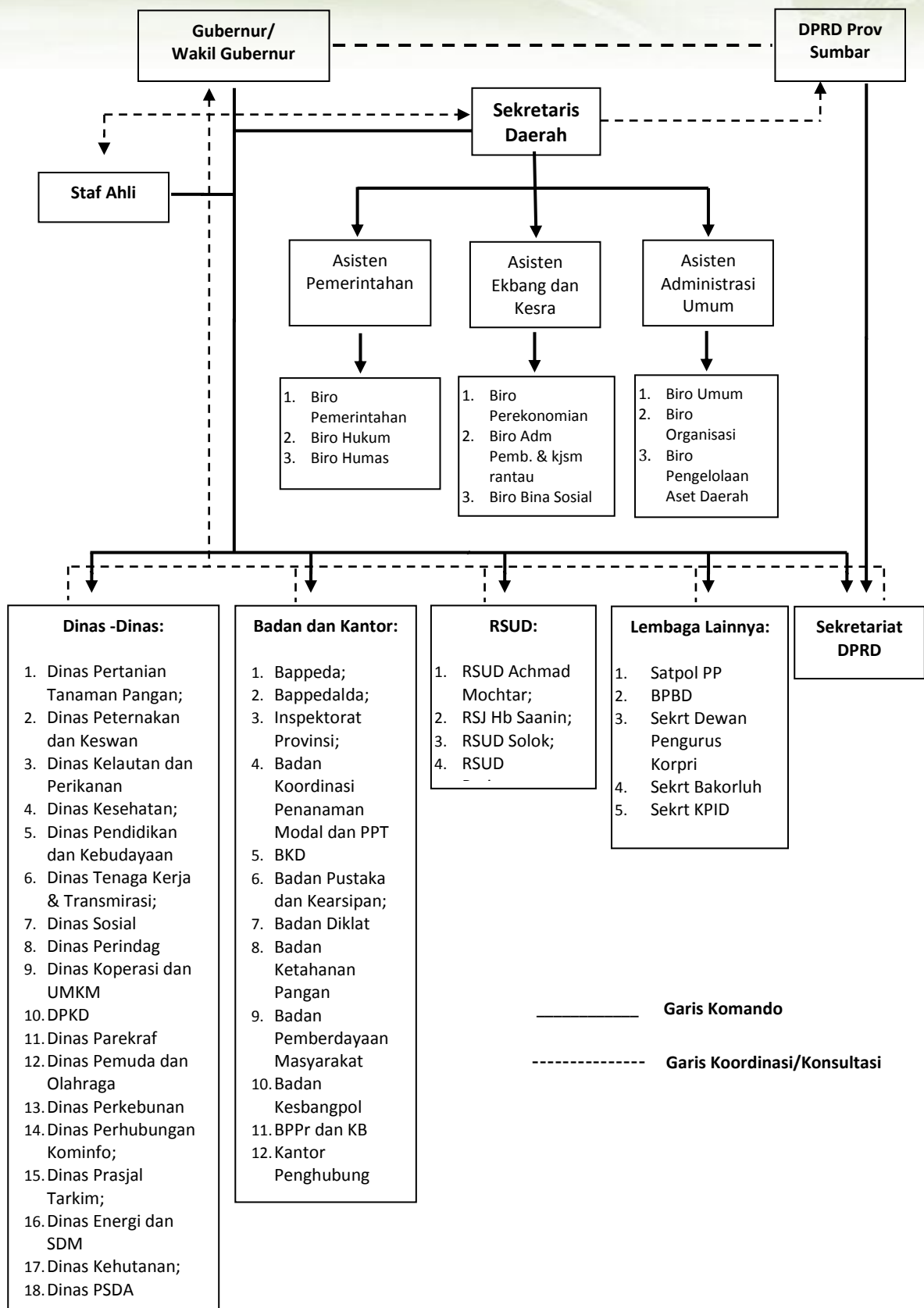
Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat





1.6. ISU STRATEGIS

Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan

Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan percepatan peningkatan lama sekolah bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Prioritas peningkatan pemerataan pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun sampai 12 tahun dengan memberikan akses pendidikan untuk semua.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Permasalahan utama dalam bidang kesehatan adalah:

- a. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi Penyebaran beberapa penyakit menular (*multiple burden of disease*) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan,
- b. Sistem Kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota,
- c. Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif,
- d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat,
- e. Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standard dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima;
- f. Belum optimalnya aspek Regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan.
- g. Pembiayaan kesehatan seluruh Kabupaten/Kota yang masih di bawah amanat UU Kesehatan belum mencapai 10%.



3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Kemisikinan dan pengangguran menjadi permasalahan yang harus diatasi hingga tuntas. Masalah kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Masalah pengangguran juga harus mendapat perhatian karena pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.

4. Pengamalan Nilai Agama dan Budaya

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama menjadi isu yang strategis karena Sumatera Barat kental dengan nilai-nilai agama dan budaya “adat basandi syara’, Syara basandi kitabullah”.

5. Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Isu strategis terkait dengan kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah:

- a. Peningkatan jumlah penduduk yang masih di atas proyeksi 1,34% dan diperkirakan pada 30 tahun ke depan jumlah penduduk bertambah dua kali lipat,
- b. Perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sumatera Barat yang belum responsif gender dan belum berbasis pada pemenuhan hak anak
- c. Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak masih rendah
- d. Penanganan korban kekerasan dan pelayanan lainnya masih belum tertangani dengan baik.

6. Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan

Isu strategis terkait dengan ketahanan dan keamanan pangan adalah Ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.



7. Mitigasi Bencana dan Rehab Pasca Bencana

Isu strategis terkait dengan mitigasi bencana dan rehab pasca bencana adalah kondisi Provinsi Sumatera barat yang rawan bencana dimana hampir 60% masyarakat berdomisili di kawasan pesisir dan kawasan rawan bencana dan besarnya dampak kerusakan yang disebabkan oleh bencana sehingga perlu dilakukan penanganan optimal untuk menghadapi ancaman bencana.

8. Infrastruktur dalam rangka Konektivitas Nasional

Isu strategis terkait dengan infrastruktur adalah:

- a. Integrasi pembangunan sarana dan prasarana konektivitas dalam mendukung pembangunan wilayah dan pengoptimalan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada;
- b. Pengembangan infrastruktur yang lebih difokuskan pada perhubungan darat, padahal potensi pengembangan infrastruktur juga dapat dikembangkan kepada perhubungan laut

9. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan yaitu tatalaksana, Sumber daya Manusia, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik, *mindset* dan *culturset*, perundang-undangan dan penataan organisasi.

10. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

Isu strategis terkait dengan pengembangan kemaritiman dan kelautan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan;
- b. Peningkatan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi
- c. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap
- d. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- e. Preferensi konsumen terhadap produk perikanan yang bermutu, aman konsumsi dan bernilai tinggi



- f. Peningkatan produksi perikanan benih dan bibit unggul yang mendukung ketahanan pangan dan gizi;
- g. Kebijakan industrialisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi menuju *blue economy*
- h. Peningkatan ekspor produk hasil perikanan.

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:

- a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksud
- b. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : **Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan pembangunan yang ditetapkan. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Untuk periode 2016-2021, RPJMD Provinsi Sumatera Barat telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016.

2.1.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan visi gubernur dan wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana



dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2. 1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.	1.1	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama
				1.1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)



MISI		TUJUAN		SASARAN	
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	1.2	Penguatan kelembagaan agama dan adat	1.2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		2.1	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur
				2.1.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
		2.2	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	2.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
				2.2.2	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
		2.3	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif	2.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.1	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
		3.2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
		3.3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak	3.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
				3.3.2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
				3.3.3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak



MISI		TUJUAN		SASARAN	
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.1	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	4.1.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
		4.2	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	4.2.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
				4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
		4.3	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	4.3.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
		4.4	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin
4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka				
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5.1	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi
				5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas
				5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
				5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
		5.2	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan
				5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
		5.3	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana



2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan telah melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Pada tabel berikut akan disajikan Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;

Tabel 2.2. REVISI PERJANJIAN KINERJA

PROVINSI : SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 1					
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH” ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”.					
Tujuan 1.1					
Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan					
1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1.1.1.1	Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan Sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	2,22	Biro Bina Sosial
		1.1.1.2	Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6	Biro Bina Sosial
1.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1.1.2.1	Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA)	0	Badan Kesbangpol
1.1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	1.1.3.1	Persentase penurunan kasus maksiat	10	Satpol PP



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1.2					
Penguatan kelembagaan agama dan adat					
1.2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1.2.1.1	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya		Biro Bina Sosial
		-	KAN	90	
		-	MUI	na	
MISI 2					
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL					
Tujuan 2.1					
Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme					
2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	2.1.1.1	Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	86	BKD
2.1.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	2.1.2.1	Perangkat Daerah Provinsi menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2	Inspektorat Provinsi
Tujuan 2.2					
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel					
2.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.2.1.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	DPKD
		2.2.1.2	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	Biro Organisasi
		2.2.1.3	Indeks e-Government Provinsi	2,2	Biro Humas
		2.2.1.4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	Biro Humas
		2.2.1.5	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (Indeks)	2,5	Biro Pemerintahan
2.2.2	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	2.2.2.1	Kesesuaian prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	80	Bappeda
Tujuan 2.3					
Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif					
2.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.3.1.1	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	70	Biro Organisasi



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 3					
MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI					
Tujuan 3.1					
Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter					
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.1.1.2	Harapan lama sekolah	13,94	
		3.1.1.3	Rata-rata lama sekolah	8,46	
Tujuan 3.2					
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat					
3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	3.2.1.1	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3.2.1.2	Angka Putus SMA	0,83	
		3.2.1.3	Angka Putus SMK	0,82	
		3.2.1.4	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan tinggi	42,98	
Tujuan 3.3					
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak					
3.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	3.3.1.1	Angka Harapan Hidup	68,79	Dinas Kesehatan
3.3.2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	3.3.2.1	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	2,61	BPPr dan KB
		3.3.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22	BPPr dan KB
3.3.3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.3.3.1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,68	BPPr dan KB
		3.3.3.2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	
		3.3.3.3	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi	8,04	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
MISI 4					
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH					
Tujuan 4.1					
Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan					
4.1.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,58	Lintas PD
		4.1.1.2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	36,48	Lintas PD
		4.1.1.3	Investasi (Rp Triliyun)	3,11	BKPM dan PPT
		4.1.1.4	Peningkatan Nilai Ekspor	1,5	Dinas Perindag
Tujuan 4.2					
Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani					
4.2.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	4.2.1.1	Skor Pola pangan harapan	85	Badan Ketahanan Pangan
		4.2.1.2	Persentase peningkatan produksi pangan		Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP dan Dinas Perkebunan
		a	Padi	3,65	
		b	Jagung	7,87	
		c	Daging	1,22	
		d	Telur	0,69	
		e	Ikan	5,78	
		f	Kakao	2	
		g	Kopi	2	
h	Karet	2			
4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	4.2.2.1	Nilai tukar petani	106,15	Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP dan Dinas Perkebunan
Tujuan 4.3					
Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya					
4.3.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	4.3.1.1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		Dinas Parekraf
		a	Wisatawan Nusantara	5	
		b	Wisatawan Mancanegara	7,5	
Tujuan 4.4					
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal					
4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	4.4.1.1	Tingkat kemiskinan	6,43	BPM



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	4.4.2.1	Tingkat pengangguran terbuka	6,5	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
MISI 5					
MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.					
Tujuan 5.1					
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah					
5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	5.1.1.1	Persentase kemandapan jalan provinsi	69	Dinas Prasjal Tarkim
5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	5.1.2.1	Rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,71	Dinas Perhubungan dan Kominfo
5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Indeks Kinerja infrastruktur irigasi provinsi	67,3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	5.1.4.1	Rasio Elektrifikasi	85	Dinas Energi SDM
Tujuan 5.2					
Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan					
5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	5.2.1	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	70,88	Bapedalda dan Dinas Kehutanan
5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	5.2.2.1	Persentase Penurunan Lahan kritis	0,18	Dinas Kehutanan
		5.2.2.2	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100	
		5.2.2.3	Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	5	
Tujuan 5.3					
Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana					
5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	5.3.1.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	BPBD



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	7.671.484.850,00	
1.1	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.800.000.000,00	Biro Binsos
1.2	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama	5.871.484.850,00	Biro Binsos
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	6.173.692.213,00	
2.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	910.000.000,00	Kesbangpol
2.2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	818.917.725,00	Kesbangpol
2.3	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.824.353.425,00	Satpol PP
2.4	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	278.836.763,00	Satpol PP
2.5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.341.584.300,00	Kesbangpol
3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	787.433.613,00	
3.1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	250.576.363,00	Satpol PP
3.2	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	230.077.250,00	Satpol PP
3.3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	306.780.000,00	Kesbangpol
4	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	8.683.775.310,00	
4.1	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	520.000.000,00	Disdikbud/Biro Binsos
4.2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	380.000.000,00	Biro Binsos
4.3	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	340.000.000,00	Biro Binsos
4.4	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	1.280.490.000,00	BPM
4.5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.024.154.000,00	Disdikbud
4.6	Program Pengembangan Pendidikan Budaya	2.732.340.500,00	Disdikbud
4.7	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	350.000.000,00	Disdikbud
4.8	Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	1.056.790.810,00	Disdikbud
5	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	12.024.820.834,00	
5.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.693.072.929,00	BKD, Badan Diklat, Setda/ Kantor Penghubung, Sek Korpri
5.2	Program Pendidikan Kedinasan	5.513.829.905,00	Badan Diklat
5.3	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	360.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.4	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	800.000.000,00	Dishub Kominfo
5.5	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	593.560.000,00	Biro Organisasi
5.6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	64.358.000,00	Sek KPID



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
6	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	6.201.553.115,00	
6.1	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	6.001.438.715,00	Inspektorat
6.2	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.114.400,00	Inspektorat
7	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	117.540.577.252,00	
7.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.886.740.150,00	DPKD, Disperindag, Biro Umum, Dinas Prasjal, Dinas Nakerstrans DPKD
7.2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	719.840.000,00	DPKD
7.3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	11.034.379.750,00	DPKD
7.4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	685.000.000,00	Biro Organisasi
7.5	Peningkatan Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi	267.760.238,00	Biro Organisasi
7.6	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	826.530.062,00	Sekt KPID dan Dishub Kominfo
7.7	Program Keterbukaan Informasi	2.075.000.000,00	Dishub Kominfo
7.8	Program Informasi dan Komunikasi Publik	848.895.000,00	Biro Humas
7.9	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.323.967.000,00	Biro Humas
7.10	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.191.000.000,00	Biro Humas
7.11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	75.000.000,00	Dishub Kominfo
7.12	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	825.000.000,00	Dishub Kominfo
7.13	Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	2.463.159.000,00	Setda
7.14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	8.423.441.300,00	Setda/Kantor Penghubung Setda/Korpri
7.15	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	2.642.729.950,00	Setda
7.16	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.826.731.880,00	Setda
7.17	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	3.305.562.150,00	Biro Organisasi/Kantor Penghubung Biro Hukum
7.18	Program Pembangunan Materi Hukum	1.153.954.900,00	Biro Hukum
7.19	Program Peningkatan Budaya Hukum	47.783.400,00	Biro Hukum
7.2	Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	605.025.100,00	Biro Hukum
7.21	Program Sarana dan Informasi Hukum	226.451.800,00	Biro Hukum
7.22	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan	738.248.400,00	Biro Hukum
7.23	Program Kerjasama Pembangunan	592.152.250,00	Biro Adm Pembangunan Setda
7.24	Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	357.743.110,00	Setda
7.25	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1.374.681.762,00	Setda
7.26	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	1.635.626.000,00	Biro Pemerintahan
7.27	Program Koordinasi Pemerintahan	546.000.000,00	Biro Pemerintahan
7.28	Program Pengembangan Data dan Informasi	404.411.500,00	Biro humas, Kntor Penghubung



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
	7.29 Penyusunan Profil Kependudukan	459.175.000,00	Biro Pemerintahan
	7.30 Pengelolaan Pertanahan	1.888.500.000,00	Biro Pemerintahan
	7.31 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	241.432.000,00	Setda
	7.32 Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	564.638.000,00	Biro Pemerintahan
	7.33 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	45.514.412.050,00	Sekt DPRD
	7.34 Penataan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Nagari	475.000.000,00	Biro Pemerintahan
	7.35 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1.393.700.000,00	Biro Pemerintahan
	7.36 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	4.697.541.000,00	BPM
	7.37 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	6.203.364.500,00	BPM
8	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	10.116.147.000,00	
	8.1 Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	1.407.860.300,00	Bappeda
	8.2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.602.999.100,00	Bappeda
	8.3 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.045.287.600,00	Bappeda
	8.4 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	1.060.000.000,00	Bappeda
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	53.907.935.610,00	
	9.1 Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2.396.074.800,00	Bappeda/Biro Organisasi
	9.2 Program Peningkatan Pelayanan Publik	50.896.151.560,00	Setda/Kntor Penghubung
	9.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	235.709.250,00	Setda
	9.4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	380.000.000,00	Badan Perpustakaan dan Arsip
10	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	28.951.811.408,00	
	10.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)	7.826.504.171,00	Disdikbud
	10.2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.955.380.617,00	Disdikbud
	10.3 Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	8.996.784.670,00	Disdikbud
	10.4 Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter	1.619.544.000,00	Disdikbud
	10.5 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	3.248.468.350,00	Disdikbud
	10.6 Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan	175.000.000,00	Biro Binsos
	10.7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4.130.129.600,00	Badan Perpustakaan dan Arsip
11	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	45.502.410.060,00	
	11.1 Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan Menengah	45.502.410.060,00	disdik
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	541.693.550.836,00	
	12.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.025.278.908,00	Dinkes
	12.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	77.205.840.790,00	Dinkes
	12.3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.646.466.475,00	Dinkes



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
	12.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.099.604.600,00	Dinkes
	12.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	486.820.200,00	Dinkes
	12.6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2.331.765.900,00	Dinkes
	12.7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	95.610.443.184,00	Dinkes, RSUD
	12.8 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	344.923.000,00	Dinkes
	12.9 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	2.075.674.185,00	Dinkes
	12.10 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	721.494.300,00	Dinkes
	12.11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.274.186.000,00	RSUD
	12.12 Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	317.418.085.794,00	RSUD
	12.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	3.253.725.000,00	RSUD
	12.14 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	32.199.242.500,00	RSUD
13	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	16.350.854.243,00	
	13.1 Program Keluarga Berencana	76.104.000,00	BPPR
	13.2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	278.753.248,00	BPPR
	13.3 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	228.875.000,00	BPPR
	13.4 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	74.431.000,00	BPPR
	13.5 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.794.430.000,00	Dispora/Biro Binsos
	13.6 Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya	350.157.050,00	Dispora
	13.7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	8.865.710.100,00	Dispora/Biro Binsos
	13.8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.708.578.795,00	Dispora
	13.9 Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	1.277.164.050,00	Dispora
	13.10 Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	696.651.000,00	Dispora
14	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.718.675.450,00	
	14.1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	767.244.700,00	BPPR
	14.2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	1.682.000.000,00	BPPR
	14.3 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	893.884.000,00	BPPR
	14.4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	90.000.000,00	BPPR
	14.5 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	285.546.750,00	BPPR
15	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	32.990.317.535,00	
	15.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	3.559.881.625,00	Diskoperasi UMKM
	15.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	4.773.898.900,00	Diskoperasi UMKM
	15.3 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	870.000.000,00	BPM



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
	15.4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.788.798.000,00	BKPM PPT
	15.5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	670.060.000,00	BKPM PPT
	15.6 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	1.169.249.860,00	Disperindag
	15.7 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	998.292.000,00	Disperindag
	15.8 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3.593.934.650,00	Disperindag
	15.9 Program Pengembangan Perwilayahan	886.502.000,00	Disperindag
	15.10 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.174.462.500,00	Disperindag
	15.11 Program Pengembangan Ekonomi Maritim	11.505.238.000,00	DKP
16	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	133.890.556.189,00	
	16.1 Program Diversifikasi Pangan	793.309.000,00	BKP
	16.2 Program Ketahanan Pangan	5.809.740.000,00	BKP
	16.3 Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	4.232.587.000,00	Dinas Pertanian/ Perkebunan/Disnak DKP
	16.4 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	14.287.250.100,00	Dinas Pertanian/ Perkebunan/Disnak DKP
	16.5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	63.178.865.221,00	Dinas Pertanian/ Perkebunan/Disnak DKP
	16.6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	15.975.996.380,00	Dinas Pertanian/ Perkebunan/Disnak DKP
	16.7 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	19.033.921.300,00	Dinas Pertanian/ Perkebunan/Disnak DKP
	16.8 Program Pengamanan Sumber Daya Hewani	4.654.282.400,00	Disnak
	16.9 Program Pemberdayaan Penyuluhan	413.500.000,00	Bakorluh
	16.10 Program Peningkatan SDM Pertanian	1.075.000.000,00	Dinas Pertanian
	16.11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	4.436.104.788,00	Dinas Pertanian
17	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan		
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	12.180.071.350,00	
	18.1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.327.306.000,00	Parekraf
	18.2 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.463.385.150,00	Parekraf
	18.3 Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.089.380.200,00	Parekraf
	18.4 Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	300.000.000,00	Parekraf
19	Menurunnya jumlah penduduk miskin	25.085.852.470,00	
	19.1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	142.813.060,00	Dinsos
	19.2 Program Pembinaan Anak Terlantar	4.591.718.125,00	Dinsos
	19.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2.606.317.070,00	Dinsos
	19.4 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	4.704.184.470,00	Dinsos



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
	19.5 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.082.816.450,00	Dinsos
	19.6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.182.740.000,00	Dinsos
	19.7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	4.544.505.045,00	Dinsos
	19.8 Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	790.000.000,00	Binsos
	19.9 Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	555.800.000,00	Disnakerstrans
	19.10 Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin	71.675.000,00	Disnakerstrans
	19.11 Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	1.903.049.250,00	BPM
	19.12 Program Pengembangan Perumahan	635.751.000,00	Dinas Prasjal Tarkim
	19.13 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.274.483.000,00	Dinas Prasjal Tarkim
20	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	8.455.049.500,00	
	20.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.834.339.000,00	Disnakerstrans
	20.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	1.308.184.500,00	Disnakerstrans
	20.3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	745.363.000,00	Disnakerstrans
	20.4 Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	415.213.000,00	Disnakerstrans
	20.5 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	151.950.000,00	Disnakerstrans
21	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	317.475.315.327,00	
	21.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	268.404.847.214,00	Dinas Prasjal Tarkim
	21.2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	44.792.327.313,00	Dinas Prasjal Tarkim
	21.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	2.818.509.800,00	Dinas Prasjal Tarkim
	21.4 Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1.459.631.000,00	Dinas Prasjal Tarkim
22	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	14.945.759.775,00	
	22.1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	201.118.000,00	Dishub Kominfo
	22.2 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	7.233.918.150,00	Dishub Kominfo
	22.3 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	459.916.000,00	Dishub Kominfo
	22.4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	359.039.500,00	Dishub Kominfo
	22.5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.864.756.125,00	Dishub Kominfo
	22.6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	3.827.012.000,00	Dishub Kominfo
23	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	171.987.936.900,00	
	23.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	87.074.796.000,00	DPSDA
	23.2 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.150.000.000,00	DPSDA



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
	23.3 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	83.763.140.900,00	DPSDA
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	2.526.657.660,00	
	24.1 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	798.700.000,00	DESDM
	24.2 Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	1.070.000.000,00	
	24.3 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	260.000.000,00	
	24.4 Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	397.957.660,00	
25	Meningkatnya kualitas lingkungan	219.312.609.211,00	
	25.1 Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	900.000.000,00	DESDM
	25.2 Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.214.840.000,00	DKP
	25.3 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	16.300.801.700,00	DPSDA
	25.4 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.331.003.000,00	Dishut, Bapedalda
	25.5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	347.469.950,00	Dishut
	25.6 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	4.416.717.450,00	Dishut
	25.7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.533.827.300,00	Bapedalda
	25.8 Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	260.000.000,00	Bapedalda
	25.9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	508.220.600,00	Bapedalda
	25.10 Program Perencanaan Penataan Ruang	5.991.051.450,00	Dinas Prasjal Tarkim
	25.11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	195.189.875,00	Dinas Prasjal Tarkim
	25.12 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	32.213.403.186,00	Dinas Prasjal Tarkim
	25.13 Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.425.461.900,00	Dinas Prasjal Tarkim
	25.14 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.674.622.800,00	Dinas Prasjal Tarkim
26	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	2.459.905.500,00	
	26.1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	878.176.500,00	Dishut
	26.2 Program rehabilitasi hutan dan lahan	513.376.000,00	Dishut
	26.3 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	442.820.450,00	Dishut
	26.4 Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	372.362.550,00	Dishut
	26.5 Program Pengendalian kebakaran hutan	253.170.000,00	Dishut
27	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	30.653.173.941,00	
	27.1 Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam	19.680.873.941,00	BPBD
	27.2 Program Peningkatan Mitigasi Bencana	914.300.000,00	BPBD



NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KETERANGAN
27.3	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	3.046.000.000,00	BPBD
27.4	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	560.000.000,00	BPBD
27.5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	480.000.000,00	BPBD
27.6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	5.972.000.000,00	BPBD
TOTAL ANGGARAN		1.831.287.927.152,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan 46 (empat puluh enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah metode pengukuran sederhana yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran ditetapkan skala pengukuran dengan kategori sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1. 1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

NO	SKALA PENILAIAN	KATEGORI KEBERHASILAN
1	85%-100%	Sangat Baik
2	75%-84%	Baik
3	56-74%	Cukup
4	< 55%	Kurang



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian target 46 (empat puluh enam) indikator kinerja utama 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.1

Tabel 3.2. 1. Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".						
Tujuan	1.1	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan					
	1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1.1.1.1	Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan Sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	2,22	11,31	509,46
			1.1.1.2	Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6	6,24	104
	1.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1.1.2.1	Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA)	0	0	100
	1.1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	1.1.3.1	Persentase penurunan kasus maksiat	10	6,7	67
Tujuan	1.2	Penguatan kelembagaan agama dan adat					
	1.2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1.2.1.1	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya			
			-	KAN	90	54	60
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL.						
Tujuan	2.1	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme					
	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	2.1.1.1	Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	86	87,91	102,22
	2.1.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	2.1.2.1	Perangkat Daerah Provinsi menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2	2	100



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan	2.2	Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel					
	2.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.2.1.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100
			2.2.1.2	Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	BB	100
			2.2.1.3	Indeks e-Government Provinsi	2,2	2,01	91,36
			2.2.1.4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	73,05	132,82
			2.2.1.5	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,5	2,46	98,40
	2.2.2	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	2.2.2.1	Kesesuaian prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	80	91,97	114,96
	Tujuan	2.3	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif				
2.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.3.1.1	Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	70	91,81	131,16	
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI						
Tujuan	3.1	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter					
	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,41	69,98	99,39
			3.1.1.2	Harapan lama sekolah	13,94	13,6	97,56
			3.1.1.3	Rata-rata Lama Sekolah	8,46	8,42	99,53
Tujuan	3.2	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat					
3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	3.2.1.1	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,15	73,08	99,90	
		3.2.1.2	Angka Putus SMA	0,83	0,88	93,98	
		3.2.1.3	Angka Putus SMK	0,82	1,53	13,41	



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI-SASI	% CAPAIAN
Tujuan	3.2.1.4		Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan tinggi		42,98	31,37	72,99
	3.3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak					
	3.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	3.3.1.1	Angka Harapan Hidup	68,79	68,66	99,81
	3.3.2	Meningkatnya kualitas kependudukan. pembangunan keluarga dan keluarga berencana	3.3.2.1	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	2,61	2,79	93,10
			3.3.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22	0,71	141,80
	3.3.3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.3.3.1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,74	100,06
			3.3.3.2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62.42	100,64
			3.3.3.3	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi	8,04	6,8	115,42
	MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH. PRODUKTIF. DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL. DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH					
Tujuan	4.1	Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan					
Tujuan	4.1.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,58	5,26	94,27
			4.1.1.2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	36,48	37,21	102
			4.1.1.3	Investasi (Rp Triliyun)	3,11	4,87	156,59
			4.1.1.4	Peningkatan Nilai Ekspor	1,5	-2,28	-152
	4.2	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani					
	4.2.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	4.2.1.1	Skor Pola pangan harapan	85	84,3	99,18
			4.2.1.2	Persentase peningkatan produksi pangan			
			a	Padi	3,65	0,07	1,92
			b	Jagung	7,87	15,51	197,08
			c	Daging	1,22	1,16	95,08
			d	Telur	0,69	-1,05	-152,17
			e	Ikan	5,78	-3,23	-55,88
	f	Kakao	2	1.98	99,00		



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI-SASI	% CAPAIAN
			g	Kopi	2	0,14	7,00
			h	Karet	2	0,33	16,50
	4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	4.2.2.1	Nilai tukar petani	106,15	97,87	92,20
Tujuan	4.3	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya					
	4.3.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	4.3.1.1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
			a	Wisatawan Nusantara	5	5.3	106
			b	Wisatawan Mancanegara	7,5	7,54	100,53
Tujuan	4.4	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal					
	4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	4.4.1.1	Tingkat kemiskinan	6,43	7,14	88,96
	4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	4.4.2.1	Tingkat pengangguran terbuka	6,5	5,09	121,69
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.						
Tujuan	5.1	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah					
	5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	5.1.1.1	Persentase kemandapan jalan provinsi	69	69,24	100,35
	5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	5.1.2.1	Rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,71	2,35	113,28
	5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1	Indeks Kinerja infrastruktur irigasi provinsi	67,3	67,31	100,01
	5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	5.1.4.1	Rasio Elektrifikasi	85	86,42	101,67
Tujuan	5.2	Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan					
	5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	5.2.1	Indeks Kualitas lingkungan Hidup	70,88	70,18	99,01
	5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	5.2.2.1	Persentase Penurunan Lahan kritis	0,18	0,18	100
			5.2.2.2	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100	100	100



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI-SASI	% CAPAIAN
Tujuan			5.2.2.3	Persentase penurunan jumlah titik panas	5	82,88	1657,60
	5.3	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana					
	5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	5.3.1.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	71	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA							135,72

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, rata-rata capaian 46 (empat puluh enam) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 adalah sebesar 135,72%. Tingkat capaian terendah adalah sebesar -152% yaitu indikator kinerja peningkatan nilai ekspor dan tingkat capaian tertinggi sebesar 1.657,60% pada indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot). Rekapitulasi capaian kinerja 46 (empat puluh enam) indikator tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Baik	40 Indikator Kinerja
2	Baik	0 Indikator Kinerja
3	Cukup	3 Indikator Kinerja
4	Kurang	3 Indikator Kinerja
Jumlah		46 Indikator Kinerja

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

MISI 1 “MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH” ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Untuk meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat basandi Syarak, Syarak basandi kitabullah”, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan. Uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 1.1 *Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.*

Tujuan pertama Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 1. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.1

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	0	0
2	Persentase penurunan kasus maksiat	6,7	12,67
3	Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	11,31	31,2

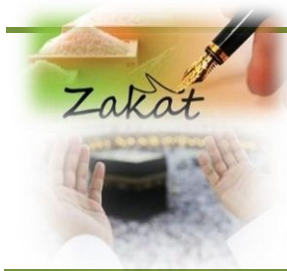
Pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, damai, tenteram, harmonis dilihat dari tidak adanya konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa SARA dan menurunnya kasus maksiat yang terjadi. Dari realisasi jumlah konflik yang diuraikan dalam tabel 3.3.1 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015-2016 tidak terjadi konflik yang menimbulkan bentrokan di Provinsi Sumatera Barat. Untuk kasus maksiat di tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kasus maksiat yang terjadi sebesar 6,7%.

Sementara itu untuk pengamalan nilai universal keagamaan dalam kehidupan, salah satunya dapat dilihat dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat yang mengalami peningkatan sebesar 11,31% di tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan yang diukur berdasarkan realisasi ke tiga indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik



Untuk pencapaian tujuan meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis, beriman dan bertakwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1.1.1.

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3. 2. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	2,22	11,31	509,46
2	Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6	6,24	104,00
Rata-Rata Capaian				306,73

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah sebesar 306,73% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat.

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat target 2,22%, terealisasi 11,31% dengan tingkat capaian kinerja 509,46%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



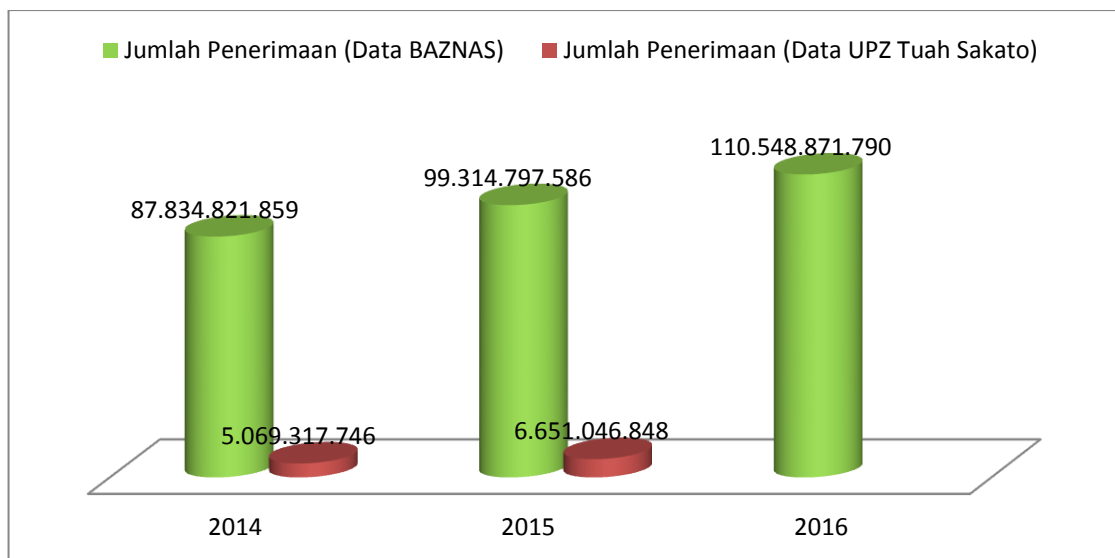
Realisasi indikator kinerja ini diukur dari peningkatan jumlah penerimaan zakat, infak dan sadaqah diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat di tahun 2016. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat} = \frac{\text{Rp. 110.548.871.790} - \text{Rp. 99.314.797.586}}{\text{Rp. 99.314.797.586}} \times 100\% = 11,31\%$$

Ket = Pengumpulan zakat, infak dan sadaqah tahun 2016 = 110.548.871.790,-
Pengumpulan zakat, infak dan sadaqah tahun 2015 = 99.314.797.586-

Peningkatan jumlah Penerimaan Zakat, Infak dan Sadaqah se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3. 1. Penerimaan Zakat, Infak dan Sadaqah se Sumatera Barat tahun 2015-2016



Berdasarkan grafik 3.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2016, jumlah penerimaan zakat di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan baik dari data penerimaan zakat dari BAZNAS ataupun dari data UPZ Tuah Sakato. Rata-rata peningkatan dari tahun 2014-2016 adalah 12,19%.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dapat dilihat pada tabel 3.3.3.



Tabel 3.3. 3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengumpulan Nilai Zakat, Infak dan Sadaqah yang Dikelola oleh Badan Amil Zakat

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	11,31	31,2	509,46	624	2,22

Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat tren realisasi indikator kinerja persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 19,89%. Hal ini terjadi karena perbedaan sumber data perhitungan zakat. Untuk tahun 2013-2015 sumber data berasal dari data yang dikeluarkan oleh UPZ Tuah Sakato dengan jumlah penerimaan zakat yang lebih kecil dibandingkan data penerimaan zakat dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan UPZ tuah sakato penerimaan zakat berasal dari zakat pegawai. Untuk capaian indikator kinerja ini juga menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015-2016 sebesar 114,54%.

Realisasi persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tahun 2016 sebesar 11,31% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 2,22% jelas terlihat realisasi indikator kinerja ini telah di atas target yang ditetapkan untuk tahun 2021. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat sebesar 509,46% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh adanya koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam hal peningkatan penerimaan zakat.

2. Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat indikator kinerja persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji target 6%, terealisasi 6,24% dengan tingkat capaian kinerja 104%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji} = \frac{3596}{57650} \times 100\% = 6,24\%$$

Ket = Jumlah Calon Jemaah Haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan tahun 2016 = 3596 orang
Jumlah penduduk yang terdaftar tapi belum diberangkatkan sampai tahun 2015= 57650 orang

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji dapat dilihat pada tabel 3.3.4.

Tabel 3.3. 4. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Mendaftar dan Mendapat Porsi Keberangkatan Ibadah Haji

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6,24		104		6

Dari tabel 3.3.4 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji tahun 2015-2016. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji tahun 2016 sebesar 6,24% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 6% jelas terlihat realisasi indikator kinerja ini telah di atas target yang ditetapkan di tahun 2021. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2016 maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji sebesar 104% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga vertikal terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBDP Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah sebesar Rp. 7.671.484.850,- terealisasi Rp. 6.766.881.857,- atau sebesar 88,21%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 904.602.993,- atau 11,79%.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat adalah Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai agama.

Kedamaian Ada...
Ketika Kita Mau Menerima Perbedaan



Sasaran Strategis 1.1.2.

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.5.

Tabel 3.3. 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.2.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	0	0	100

Dari tabel 3.3.5 dapat dilihat indikator kinerja konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) target 0 konflik, terealisasi 0 konflik dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah kejadian konflik dalam kelompok masyarakat yang menimbulkan bentrokan dan kekerasan yang bernuansa SARA di Sumatera Barat yang sumber datanya diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat di tahun 2016.



Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dapat dilihat pada tabel 3.3.6.

Tabel 3.3. 6. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Konflik dalam Kelompok Masyarakat Bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	0	0	100	200	0

Dari tabel 3.3.6 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) tahun 2015-2016 menunjukkan realisasi yang sama/tetap yaitu tidak terjadinya konflik yang menimbulkan kekerasan di tahun 2015 dan 2016. Untuk capaian kinerja indikator kinerja ini tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan perbedaan target yang ditetapkan di tahun 2015 dan 2016.

Realisasi konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) tahun 2016 sebesar 0 (nol) konflik dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 0 (nol) konflik, jelas terlihat realisasi indikator kinerja ini sama dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2016 maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) tahun 2016 sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- Keberhasilan forum-forum yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dalam meredam potensi konflik yang bernuansa SARA sepanjang tahun 2016 sehingga tidak memunculkan konflik dengan kekerasan antar kelompok masyarakat.



- b. Keberhasilan dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi aktivitas penanganan konflik sosial tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBDP Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama adalah sebesar Rp. 6.173.692.213,- terealisasi Rp. 5.857.402.813,- atau sebesar 94,88%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,12% atau Rp. 316.289.400,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Program Pendidikan Politik Masyarakat.



Sasaran Strategis 1.1.3.

Berkurangnya Penyakit Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis berkurangnya penyakit masyarakat ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.7.

Tabel 3.3. 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.3.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase penurunan kasus maksiat	10	6,7	67

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat indikator kinerja persentase penurunan kasus maksiat target 10%, realisasi 6,7% dengan tingkat capaian 67% termasuk kategori keberhasilan cukup.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan laporan satpol PP Kabupaten/kota se Sumatera Barat terkait dengan jumlah kasus maksiat di tahun 2016. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



$$\text{Persentase penurunan kasus maksiat} = \frac{733 \text{ kasus} - 786 \text{ kasus}}{786 \text{ kasus}} \times 100\% = 6,7\%$$

Ket = Kasus maksiat di tahun 2016 = 733 kasus
Kasus maksiat di tahun 2015 = 786 kasus

Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani menurut jenis pelanggaran maksiat pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.8.

Tabel 3.3. 8 Daftar Jumlah Kasus Perbuatan Maksiat yang ditangani di Kabupaten/Kota Tahun 2016

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS PELANGGARAN MAKSIAT				JUMLAH
		Perzinaan/ Mesum	Perjudian	Miras, Narkotika dan Obat terlarang	Penyiaran &Penertiban Pornografi	
1	Kota Padang	141	-	36		177
2	Kota Padang Panjang	45	-	-		45
3	Kota Bukittinggi	107	-	-		107
4	Kota Payakumbuh	6	1	14		21
5	Kota Solok	9	-	-		9
6	Kota Sawahlunto	7	3	-	5	15
7	Kota Pariaman	68	-	-		68
8	Kabupaten Agam	28	-	1		29
9	Kabupaten Padang Pariaman	57	-	-		57
10	Kabupaten 50 Kota	21	-	15		36
11	Kabupaten Sijunjung	7	-	-		7
12	Kabupaten Dharmasraya	50	-	-		50
13	Kabupaten Pesisir Selatan	22	-	-		22
14	Kabupaten Solok Selatan	-	-	3		3
15	Kabupaten Pasaman	33	-	12		45
16	Kabupaten Kep. Mentawai	6	-	-		6
17	Kabupaten Pasaman Barat	20	-	6		26
18	Kabupaten Tanah Datar	2	-	-		2
19	Kabupaten Solok	8	-	-		8
	TOTAL	637	4	87	5	733

Dari tabel 3.3.8 dapat diketahui bahwa kasus perbuatan maksiat yang paling banyak terjadi di tahun 2016 adalah perzinaan/mesum sebanyak 637 kasus (86,90%) dan kasus miras, narkotika dan obat terlarang sebanyak 87 kasus (11,87%). Kasus perbuatan maksiat terbanyak terjadi di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

Perbandingan jumlah kasus perbuatan maksiat dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada grafik 3.2.

**Grafik 3. 2. Jumlah Kasus Perbuatan Maksiat tahun 2014-2016**

Dari grafik 3.2 diketahui bahwa jumlah kasus perbuatan maksiat dari tahun 2014-2016 di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren penurunan. Rata-rata penurunan dari tahun 2014-2016 adalah sebesar 9,68%.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase penurunan kasus maksiat dapat dilihat pada tabel 3.3.9.

Tabel 3.3. 9. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase penurunan kasus maksiat

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase penurunan kasus maksiat	6,7	12,67	67	140,78	15

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase penurunan kasus maksiat tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 5,97%. Walaupun persentase penurunan kasus maksiat di tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan penurunan kasus maksiat di tahun 2015 tetapi dilihat dari jumlah kasus yang terjadi di tahun 2016 lebih rendah 53 kasus dibandingkan dengan jumlah kasus maksiat di tahun 2015. Untuk tren capaian indikator kinerja ini juga menunjukkan tren penurunan seiring dengan penurunan realisasinya.

Realisasi persentase penurunan kasus maksiat tahun 2016 sebesar 6,7% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 15%, menunjukkan peningkatan sebesar 8,3%. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan upaya



dan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan kasus maksiat sebesar 67% termasuk kategori keberhasilan cukup. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya pengawasan orang tua terhadap sikap dan tingkah laku anak yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan penyerapan nilai-nilai budaya asing;
- b. Berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang terjadi di lingkungan sekitarnya

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja persentase penurunan kasus maksiat adalah

- a. Meningkatkan patroli, razia dan operasi gabungan dengan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota, POLRI, TNI, PPNS dan wartawan;
- b. Koordinasi dan konsolidasi antara Kepala Satpol PP dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh pemuda dan ninik mamak) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan maksiat bersama-sama.
- c. Penerapan hukum adat terhadap pelaku maksiat.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis berkurangnya penyakit masyarakat adalah sebesar Rp. 787.433.613,- terealisasi Rp. 757.281.962,- atau sebesar 96,17%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,83% atau Rp. 30.151.651,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis berkurangnya penyakit masyarakat adalah Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan Program Peningkatan Penegakkan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS.

**Tujuan 1.2 Penguatan kelembagaan agama dan adat.**

Tujuan kedua dari Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah penguatan kelembagaan agama dan adat. Pencapaian tujuan penguatan kelembagaan agama dan adat dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 10 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1.2

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya KAN	54	

Lembaga adat yang melaksanakan peran dan fungsinya diukur dari jumlah KAN yang aktif. Dari tabel 3.3.10 dapat dilihat bahwa di tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah KAN yang aktif sebanyak 54 KAN. Jika diakumulasikan maka jumlah KAN yang aktif di tahun 2016 menjadi 217 KAN. Artinya, dari total KAN yang ada di Sumatera Barat sebanyak 544 KAN, sebanyak 217 KAN atau (39,89%) sudah aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan penguatan kelembagaan agama dan adat, baru tercapai sebanyak 217 KAN atau 39,89% dari total lembaga adat/KAN yang ada di Provinsi Sumatera Barat (544 KAN). Untuk lembaga agama yang melaksanakan peran dan fungsinya baru mulai diukur di tahun 2017.

Untuk pencapaian tujuan penguatan kelembagaan agama dan adat telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1.2.1.**

Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.11.



Tabel 3.3. 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya - KAN	90	54	60

Dari tabel 3.3.11 dapat dilihat indikator kinerja lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya target 90 KAN, realisasi 54 KAN dengan tingkat capaian 60% termasuk kategori keberhasilan cukup.

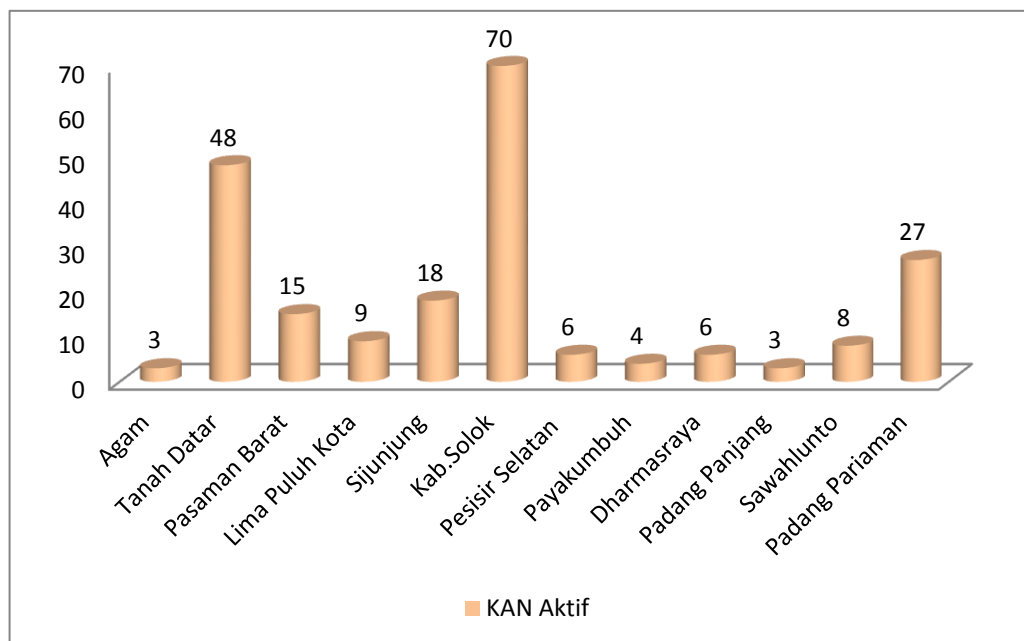
Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan selisih jumlah lembaga yang aktif di tahun 2016 dibandingkan dengan jumlah KAN yang aktif di tahun 2015. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya} = 217 \text{ KAN} - 163 \text{ KAN} = 54 \text{ KAN}$$

Ket = KAN yang aktif 2016 = 217 KAN
KAN yang aktif 2015 = 163 KAN
Jumlah KAN di Provinsi Sumatera Barat= 544 KAN

Jumlah KAN yang aktif di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3. 3 Jumlah KAN yang Aktif di Kabupaten/Kota





Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya dapat dilihat pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3. 12. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya (KAN)	54		60		180

Dari tabel 3.3.12 diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian di tahun 2015. Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini baru digunakan di tahun 2016.

Realisasi lembaga adat yang melaksanakan peran dan fungsinya sebanyak 54 KAN atau sebesar 30% dari target di tahun 2021. Dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 180 KAN, dibutuhkan peningkatan sebesar 126 KAN selama 5 tahun. Untuk mencapai target tahun 2021, minimal peningkatan pertahunnya adalah 26 KAN. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada agar target indikator kinerja dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya sebesar 60% termasuk kategori keberhasilan cukup. Hambatan dalam pencapaian target kinerja ini adalah terbatasnya SDM kepengurusan KAN, terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan, belum meratanya perhatian Pemda terhadap keberadaan lembaga KAN, terbatasnya aset kelembagaan nagari dan kurangnya dukungan para pemangku adat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/kota terkait untuk mengembalikan fungsi dari lembaga adat, dan melakukan pembinaan terhadap lembaga adat yang ada, peningkatan sarana dan prasarana lembaga adat dan peningkatan kualitas SDM pengurus KAN



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat adalah sebesar Rp. 8.683.775.310,- terealisasi Rp. 8.067.653.494,- atau sebesar 92,90%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,10% atau Rp. 616.121.816,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat adalah Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengembangan Pendidikan Budaya, Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya dan Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya.

MISI 2 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.



Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional maka pemerintah provinsi Sumatera Barat melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini mencakup pada 8 (delapan) area perubahan yaitu organisasi, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas serta pola pikir dan budaya kerja. Untuk mewujudkan misi meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan. Uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 2.1 Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.

Tujuan pertama dari Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera barat maka kapasitas, manajemen aparatur, integritas dan kinerja aparatur perlu ditingkatkan.



Pencapaian tujuan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 13 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	87,91	85,76
2	Perangkat Daerah Provinsi menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2	-

Dari tabel 3.3.13 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 2,15% dari 85,76% di tahun 2015 menjadi 87,91% di tahun 2016. Selain itu, di tahun 2016, pemerintah provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan 2 Organisasi Perangkat Daerah sebagai WBK/WBBM.

Berdasarkan realisasi dari indikator kinerja yang dijadikan alat ukur untuk pencapaian tujuan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme maka dalam mewujudkan tujuan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 2.1.1.

Meningkatnya Kapasitas dan Manajemen Aparatur

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.14.

Tabel 3.3. 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penempatan Aparatur yang sesuai kompetensi (%)	86	87,91	102,22



Dari tabel 3.3.14 dapat dilihat indikator kinerja penempatan aparatur yang sesuai kompetensi target 86%, terealisasi 87,91% dengan tingkat capaian 102,22% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Penempatan Aparatur yang sesuai kompetensi} = \frac{938}{1067} \times 100\% = 87,91\%$$

Ket = Jumlah Jabatan yang terisi sesuai kompetensi tahun 2016 = 938
Jumlah formasi jabatan = 1067

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja penempatan aparatur sesuai kompetensi dapat dilihat pada tabel 3.3.15.

Tabel 3.3. 15. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Penempatan Aparatur yang sesuai kompetensi	87,91	85,76	102,22		94

Dari tabel 3.3.15 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja penempatan aparatur yang sesuai kompetensi tahun 2015-2016. Indikator kinerja ini baru digunakan sebagai ukuran untuk kinerja pemerintah Provinsi. Akan tetapi berdasarkan data yang ada diketahui bahwa realisasi penempatan aparatur sesuai kompetensi di tahun 2016 meningkat sebesar 2,15% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2015. Untuk capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015.

Realisasi indikator kinerja penempatan aparatur yang sesuai kompetensi tahun 2016 sebesar 87,91% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 94%, menunjukkan target tahun 2021 lebih tinggi 6,09%. Dengan mempertimbangkan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 2,15% maka target di tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 94% optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja penempatan aparatur sesuai kompetensi sebesar 102,22% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh adanya peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 61 tahun 2011 tentang pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural pasal 7 berbunyi hasil pemetaan



potensi PNSD yang akan dipromosikan ke jabatan struktural yang lebih tinggi sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur adalah sebesar Rp. 12.024.820.834,- terealisasi Rp. 11.179.454.871,- atau sebesar 92,97%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,03% atau Rp. 845.365.963,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur adalah Program pendidikan kedinasan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Sistem Kearsipan, Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dan Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.



Sasaran Strategis 2.1.2.

Meningkatnya Integritas dan Kinerja Aparatur

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya integritas dan kinerja aparatur ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.16.

Tabel 3.3. 16. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM	2	2	100

Dari tabel 3.3.16 dapat dilihat indikator kinerja perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM target 2 OPD, terealisasi 2 OPD dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi yaitu RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan



Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPT). Penetapan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan BKPMPT sebagai WBK/WBBM ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor:700-879-2016.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM dapat dilihat pada tabel 3.3.17.

Tabel 3.3. 17. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Menuju WBK/WBBM

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM	2		100		10

Dari tabel 3.3.17 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM tahun 2015-2016. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja baru diukur di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja perangkat daerah provinsi menuju WBK/WBBM tahun 2016 sebesar 2 OPD dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebanyak 10 OPD, menunjukkan peningkatan sebanyak 8 OPD dari realisasi di tahun 2016. Dengan mempertimbangkan rata-rata peningkatan realisasi sebanyak 2 OPD pertahunnya maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja perangkat daerah provinsi sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi.
- Pembinaan dan pengawasan yang baik dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Sosialisasi/Workshop untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pembinaan zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya integritas dan kinerja aparatur adalah sebesar Rp. 6.201.553.115,-



terrealisir Rp. 5.998.599.995,- atau sebesar 96,73%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efesiensi penggunaan anggaran sebesar 3,27% atau Rp. 202.953.120,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya integritas dan kinerja aparatur adalah Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakkan Hukum dan Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tujuan 2.2 *Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.*

Tujuan ke dua dari misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 18 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.2

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
2	Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov Sumbar	BB	BB
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73,05	46,97
4	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,46	2,23

Dari tabel 3.3.18 diketahui bahwa:

1. Realisasi Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Realisasi Peringkat Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemprov Sumbar tahun 2015-2016 memperoleh Peringkat BB. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Realisasi Indeks keterbukaan informasi publik tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 26,08.
4. Realisasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,23.



Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel yang diukur berdasarkan realisasi empat indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2.2.1.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.19.

Tabel 3.3. 19. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100
2	Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemprov Sumbar	BB	BB	100
3	Indeks e-Government Provinsi	2,2	2,01	91,36
4	Indeks keterbukaan informasi publik	55	73,05	132,82
5	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,5	2,46	98,40
Rata-rata Capaian				104,52

Dari tabel 3.3.19 dapat dilihat rata-rata capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebesar 104,52% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:



1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari tabel 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah target WTP, realisasi WTP dengan tingkat capaian 100%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2015 Nomor LHP.No.23A/LHPXVIII.PDG/05/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2015.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD dapat dilihat pada tabel 3.3.20

Tabel 3.3. 20. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	100	WTP

Dari tabel 3.3.20 dapat dilihat realisasi indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan di tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan opini WTP yang diperoleh di tahun 2015. Untuk capaian indikator kinerja ini menunjukkan trend yang tetap yaitu 100%, artinya realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD tahun 2016 adalah WTP dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah WTP, jika dilihat dari trend realisasi 2015-2016 maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- Komitmen pimpinan di seluruh instansi di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).



- c. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tingkat maturitas SPID Provinsi Sumatera Barat berada pada level 2 (berkembang).

Upaya untuk mempertahankan pencapaian indikator kinerja opini BPK terhadap LKPD adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara konsisten antara DPKD-Bidang akuntansi, DPKD Bidang BUD dan DPKD-UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi dan SKPD.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara DPKD-bidang akuntansi, Biro Pengelolaan Aset Daerah, Biro Perekonomian, Bank Nagari dan SKPD
- c. Melaksanakan reviu laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala (semesteran dan tahunan)
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator opini BPK terhadap LKPD adalah sebesar Rp. 17.640.959.900,- terealisasi Rp. 15.705.819.387,- atau sebesar 89,03%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 10,97% atau Rp. 1.935.140.513,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap LKPD adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

2. Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat target BB terealisasi BB dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB di tahun 2016 yang disampaikan dengan surat Nomor: B/506/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016.

Hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.21.

Tabel 3.3. 21. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	24,14
2	Pengukuran Kinerja	25	16,52
3	Pelaporan Kinerja	15	11,44
4	Evaluasi Internal	10	6,98
5	Capaian Kinerja	20	12,64
NILAI HASIL EVALUASI		100	71,72
TINGKAT AKUNTABILITAS			BB

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.3.22.

Tabel 3.3. 22. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB 71,72	BB 70,52	100	100,74	A

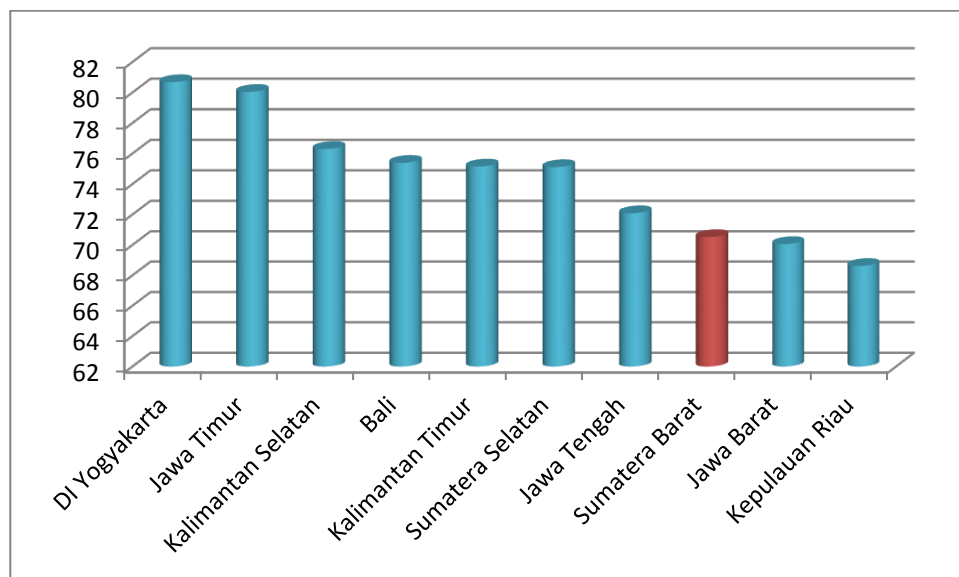
Dari tabel 3.3.22 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2016 menunjukkan realisasi yang sama. Akan tetapi, nilai hasil evaluasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 1,20 dibandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun 2015. Untuk capaian indikator kinerja ini tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan di tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh prediket penilaian melebihi target yang ditetapkan.



Realisasi indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah BB, dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah A, untuk mencapai target indikator tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berupaya maksimal untuk mencapainya.

Dari hasil evaluasi di tahun 2015 terhadap 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat memperoleh peringkat 8, sebagaimana tergambar pada grafik 3.4

Grafik 3. 4 Nilai Akuntabilitas 10 Provinsi di Indonesia



Capaian indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini disebabkan oleh tingginya komitmen dari pimpinan perangkat daerah untuk mendukung penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 952.760.238,- terealisasi Rp. 800.406.673,- atau sebesar 84,01%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,99% atau Rp. 152.353.565,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Peringkat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Program Peningkatan Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi.



3. Indeks e-Government Provinsi

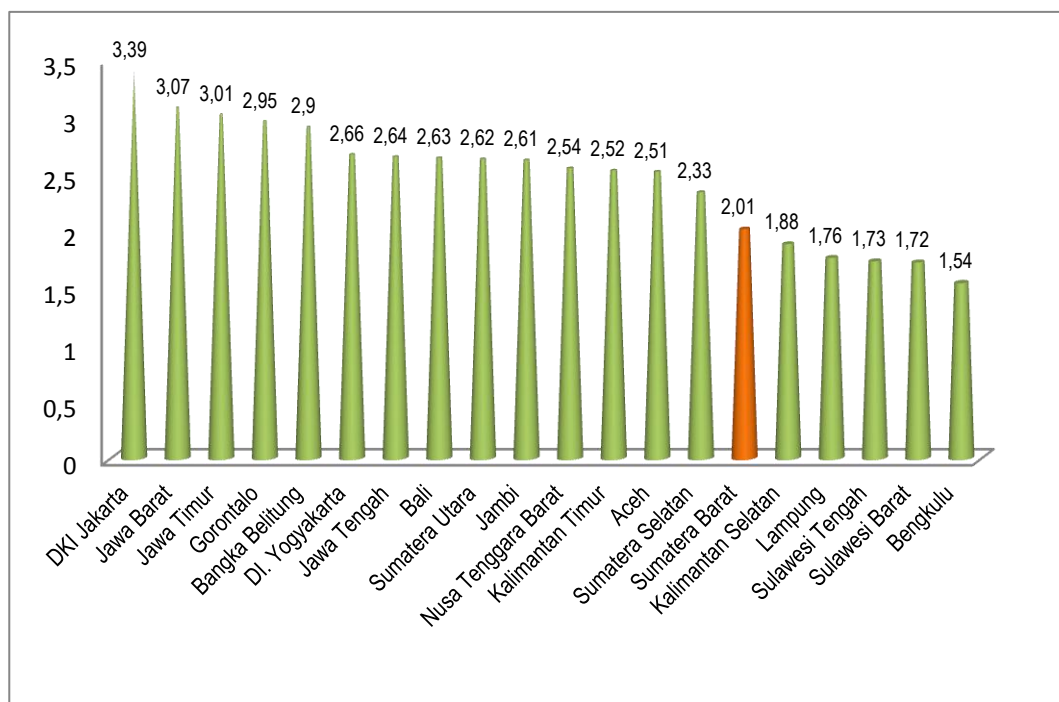
Dari tabel 3.3.19 indikator kinerja indeks e-government provinsi target 2,2, terealisasi 2,01 dengan tingkat capaian 91,36%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja diukur berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya. Dikarenakan hasil penilaian tahun 2016 belum dikeluarkan oleh Kementerian terkait maka angka realisasi yang dipakai dalam laporan ini merupakan hasil penilaian di tahun 2015. Indeks e-government Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,01 termasuk kategori kurang. Hal ini didasarkan pada range penilaian terhadap indeks e-Government berikut ini:

Indeks e-Government	Kategori
Nilai 1,0 – 1,49	Sangat Kurang
Nilai 1,5 – 2,49	Kurang
Nilai 2,5 – 3,49	Baik
Nilai 3,5 – 4,00	Sangat Baik

Tahun 2015 Provinsi Sumatera Barat untuk skor Indeks e-government berada di urutan ke 15 dari 20 Provinsi dengan skor yang masih sama dengan tahun 2014 yaitu 2,01. Peningkatan Indeks e-government tingkat Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3. 5 Indeks e-Government tingkat Provinsi Tahun 2015





Capaian indikator kinerja Indeks *e-government* Provinsi Sumatera Barat sebesar 91,36% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Akan tetapi jika dilihat dari Indeks *e-government* sebesar 2,01 termasuk kategori kurang. Hal ini disebabkan oleh:

- Belum adanya *grand design* dan dasar regulasi yang memayungi pengembangan e-Government di Provinsi Sumatera Barat sehingga pengembangan aplikasi pendukung e-government belum terarah;
- Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi-aplikasi e-Gov yang dirancang oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan aplikasi yang dirancang belum sempurna
- Kurangnya kesadaran masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dalam percepatan penetrasi TI ke sistem Pemerintahan dan membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan sejalan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk meningkatkan Indeks *e-government* Provinsi Sumatera Barat tahun yang akan datang maka akan diupayakan penyusunan dokumen *grand design* dan payung hukum penerapan e-Government Sumatera Barat.

4. Indeks keterbukaan Informasi Publik

Dari tabel indikator 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik target 55, realisasi 73,05 dengan tingkat capaian 132,82%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel 3.3.23

Tabel 3.3. 23. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73,05	46,97	132,82		80



Dari tabel 3.3.23 dapat dilihat realisasi indikator kinerja indeks keterbukaan informasi publik dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 29,08. Untuk capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi Indeks keterbukaan informasi publik tahun 2016 sebesar 73,05 dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 80, menunjukkan peningkatan sebesar 6,95 dari realisasi di tahun 2016. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi di tahun 2016 sebesar 29,08, maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja indeks keterbukaan informasi publik sebesar 132,82% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indeks keterbukaan informasi publik didukung oleh dibentuknya website Provinsi Sumatera Barat (www.sumbarprov.go.id) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan meningkatnya ketersediaan data digital yang ingin diakses oleh pengguna informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah melalui internet dengan peningkatan data sebesar 17,61% di tahun 2016.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks *e-government* dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebesar Rp. 11.628.551.062,- terealisasi Rp. 9.237.650.510,- atau sebesar 79,44%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 20,56% atau Rp. 2.390.900.552,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian Indeks *e-government* dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program Keterbukaan Informasi, Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Mass, Program Informasi dan komunikasi publik, Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dan Program Pengelolaan *e-government* Pemerintah Daerah.



5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)

Dari tabel indikator 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) target 2,5, realisasi 2,46 dengan tingkat capaian 98,40%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja EKPPD diukur berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2014, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan skor 2,46 (Tinggi).

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja EKPPD dapat dilihat pada tabel 3.3.24.

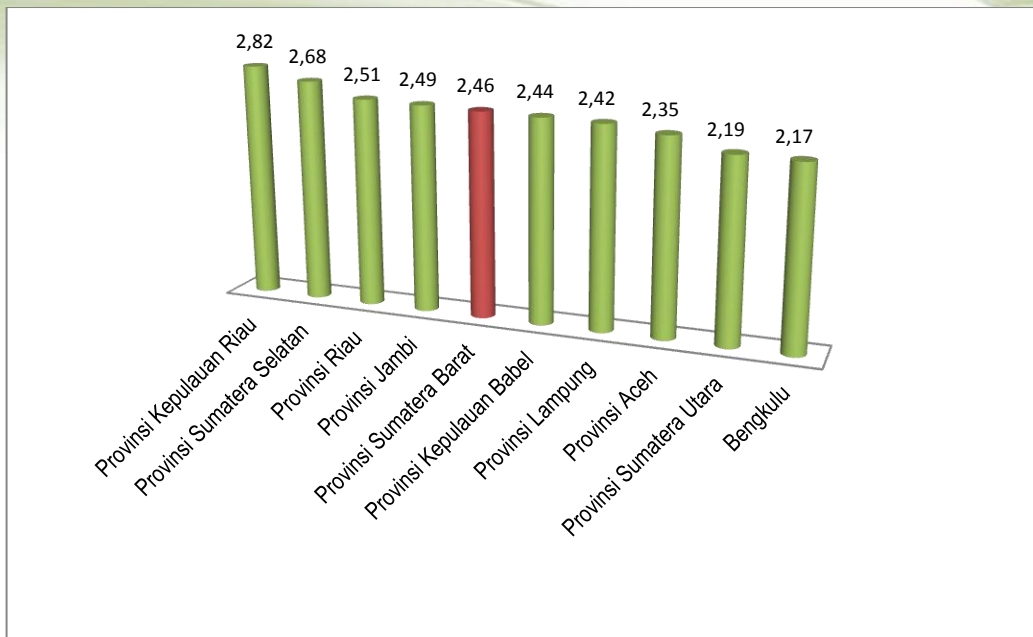
Tabel 3.3. 24. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja EKPPD

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	EKPPD	2,46	2,23	98,4	89,2	3

Dari tabel 3.3.24 dapat dilihat realisasi indikator kinerja EKPPD tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,23. Untuk capaian kinerjanya juga menunjukkan tren peningkatan seiring dengan peningkatan realisasi kinerjanya.

Realisasi indikator kinerja EKPPD tahun 2016 sebesar 2,46 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 3, menunjukkan peningkatan 0,54. Jika mempertimbangkan peningkatan realisasi tahun 2015-2016 sebesar 0,23 maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 16 se Indonesia. Jika dibandingkan dengan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera maka Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat kelima sebagaimana tergambar pada grafik 3.6.

**Grafik 3. 6. Skor EKPPD Provinsi di Pulau Sumatera**

Capaian indikator kinerja EKPPD sebesar 98,4% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh percepatan pengumpulan data dan dokumen pendukung terkait dengan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan data IKK yang bersumber dari data akumulasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dibuktikan dengan dokumen/bukti fisik oleh Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan skor hasil penilaian EKPPD di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempersiapkan lebih awal dokumen pendukung untuk provinsi dan kabupaten/kota dan memaksimalkan sosialisasi terkait penyusunan LPPD.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 87.318.306.052,- terealisasi Rp. 79.354.160.826,- atau sebesar 90,88%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,12% atau Rp. 7.964.145.226,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator EKPPD adalah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Program Pembangunan Materi Hukum, Program Peningkatan Budaya Hukum, Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Program Sarana dan Informasi



Hukum, Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Program Kerjasama Pembangunan, Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Otonomi Daerah, Program Koordinasi Pemerintahan, Program Pengembangan Data dan Informasi, Penyusunan Profil Kependudukan, Pengelolaan Pertanahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban, Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Pengembangan Data dan Informasi, Penataan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Nagari, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari, Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sasaran Strategis 2.2.2.



Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.25

Tabel 3.3. 25. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota	80	91,97	114,96

Dari tabel 3.3.25 dapat dilihat indikator kinerja kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota target 80%, terealisasi 91,97% dengan tingkat capaian 114,96%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan perhitungan jumlah prioritas Provinsi yang didukung oleh program prioritas di Kabupaten/Kota. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota} = \frac{1747,5}{19} \times 100\% = 91,97\%$$

Ket = Persentase kesesuaian prioritas provinsi dan kab/kota tahun 2016 = 1747,5
Jumlah kab/kota = 19



Kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.3.26.

Tabel 3.3. 26. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KAB/KOTA	KESESUAIAN PRIORITAS	% KESESUAIAN
1	Kota Bukittinggi	10	9	9	100
2	Kota Solok	10	13	9	90
3	Kota Padang Panjang	10	10	10	100
4	Kab. Sijunjung	10	11	10	100
5	Kota Dhamasraya	10	5	4	80
6	Kab. Pesisir Selatan	10	6	5	83,33
7	Kota Payakumbuh	10	9	9	100
8	Kab. Lima Puluh Kota	10	6	6	100
9	Kab. Pasaman	10	8	8	100
10	Kab. Agam	10	9	8	88,89
11	Kab. Kepulauan Mentawai	10	5	4	80
12	Kab. Padang Pariaman	10	9	9	100
13	Kota Pariaman	10	8	7	87,50
14	Kab.Solok	10	8	8	100
15	Kab. Tanah Datar	10	10	9	90
16	Kab. Solok Selatan	10	12	9	90
17	Kab. Pasaman Barat	10	18	10	100
18	Kota Sawahlunto	10	9	7	77,78
19	Kota Padang	10	10	8	80
TOTAL					1.747,50

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 3.3.27.

Tabel 3.3. 27. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Kesesuaian Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota	91,97		114,96		90

Dari tabel 3.3.27 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2015-2016. Realisasi dan capaian indikator ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan



indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2016 sebesar 91,97%, dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, jelas terlihat realisasi indikator kinerja ini tahun 2016 telah di atas target tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target di tahun 2021.

Capaian indikator kinerja kesesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota tahun 2016 sebesar 114,96% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh dilaksanakannya forum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan adalah sebesar Rp. 10.116.147.000,- terealisasi Rp. 8.620.587.690,- atau sebesar 85,22%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,78% atau Rp. 1.495.559.310,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian adalah Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan.

Tujuan 2.3 Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.

Pelayanan publik kepada masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani maka pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif. Pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 3.3. 28 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.3**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Rata-rata Indeks Kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	91,81	80,16

Dari tabel 3.3.28 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 11,65 dari 80,16 di tahun 2015 menjadi 91,81 di tahun 2016. Berdasarkan realisasi dari indikator kinerja yang dijadikan alat ukur untuk pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif maka dalam mewujudkan tujuan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2.3.1.****Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.29.

Tabel 3.3. 29. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	70	91,81	131,16

Dari tabel 3.3.29 dapat dilihat indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik target 70, realisasi 91,81 dengan tingkat capaian 131,16% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang melaksanakan survei di tahun 2016. Pada tahun 2016



survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada 9 (sembilan) UKPP. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Pelayanan Publik} = \frac{734,45}{9} \times 100\% = 91,81\%$$

Ket = Total Hasil survei IKM pada 8 UKPP tahun 2016 = 734,45
Jumlah UKPP yang melaksanakan survei IKM tahun 2016= 9 UKPP

Rincian Hasil survei IKM masing-masing UKPP dapat dilihat pada tabel 3.3.30.

Tabel 3.3. 30 Hasil Survei IKM tahun 2016

NO	UKPP	HASIL SURVEI IKM	KATEGORI
1	RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	81,27	A
2	RSUD Pariaman	75,81	B
3	RSU Hb. Saanin	78,23	B
4	Bidang Pelayanan Perizinan pada BKPMMD dan PPT	84,64	A
5	Lingkup Pelayanan Bapedalda	87,99	A
6	KPP Provinsi di Kabupaten Sijunjung	75,05	B
7	KPP Provinsi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan	77,92	B
8	KPP Provinsi di Padang Aro Kabupaten Solok Selatan	89,42	A
9	RSUD Solok	84,12	A
TOTAL		734,45	
RATA-RATA		91,81	

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit kerja pelayanan publik dapat dilihat pada tabel 3.3.31.

Tabel 3.3. 31. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Kerja Pelayanan Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Kerja Pelayanan Publik	91,81	80,12	131,16		80

Dari tabel 3.3.31 dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 11,69. Jumlah UKPP yang diukur IKMnya di tahun 2016 sebanyak 9 UKPP sedangkan di tahun 2015 sebanyak 6 UKPP. Untuk capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.



Realisasi indikator kinerja ini tahun 2016 sebesar 91,81 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD tahun 2016-2021, menunjukkan realisasi tahun 2016 telah di atas target tahun 2021. Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali target tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi dan ketersediaan anggaran Provinsi Sumatera Barat.

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada UKPP sebesar 131,16% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Adanya evaluasi ombudsman terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2015 tentang Pelayanan Publik sehingga mendorong setiap organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang tata cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang tata cara Penyusunan, Penetapan, standar Pelayanan dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebesar Rp. 53.907.935.610,- terealisasi Rp. 52.253.393.022,- atau sebesar 96,93%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,07% atau Rp. 1.654.542.588,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik, Program Peningkatan Pelayanan Publik, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.

**MISI 3****MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI**

Untuk mewujudkan misi meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan. Uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 3.1 *Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.*

Tujuan pertama dari misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan karakter. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 32 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	69,36
2	Harapan Lama Sekolah	13,6	13,48
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,42	8,29

Dari tabel 3.3.32 diketahui bahwa:

1. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,54%.
2. Realisasi harapan lama sekolah tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,12. Dengan angka harapan lama sekolah sebesar 13,6 berarti harapan lama sekolah yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di Sumatera Barat pada tahun mendatang adalah selama 13, 6 tahun atau setara dengan lulus perguruan tinggi.
3. Realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,13%. Dengan angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,42 maka rata-rata pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah SMP kelas 3.



Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan karakter yang diukur berdasarkan realisasi tiga indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan karakter telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 3.1.1.



Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.33.

Tabel 3.3. 33. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,41	69,98	99,39
2	Harapan Lama Sekolah	13,94	13,6	97,56
3	Rata-rata lama sekolah	8,46	8,42	99,53
Rata-rata Capaian				98,83

Dari tabel 3.3.33 dapat dilihat rata-raa capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 98,83% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,



pendidikan dan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dari tabel 3.3.33. dapat dilihat, indikator Indeks Pembangunan Manusia target 70,41, terealisasi 69,98 dengan tingkat capaian 99,39%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel 3.3.34.

Tabel 3.3. 34. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	69,36	99,39		72,56

Dari tabel 3.3.34 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,62%. Angka realisasi tahun 2015 diperoleh dari data BPS Sumatera Barat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan. Capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena indikator kinerja baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016 sebesar 69,98% dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 72,56% atau peningkatan rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,52%. Dengan memperhatikan tren peningkatan tahun 2015-2016 sebesar 0,62% maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 99,39% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan melalui pemberian beasiswa, perbaikan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur dasar.



2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dari tabel 3.3.33. dapat dilihat, indikator Harapan Lama Sekolah target 13,94, terealisasi 13,6 dengan tingkat capaian 97,56%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel 3.3.35.

Tabel 3.3. 35. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Harapan Lama Sekolah	13,6	13,48	97,56		15,09

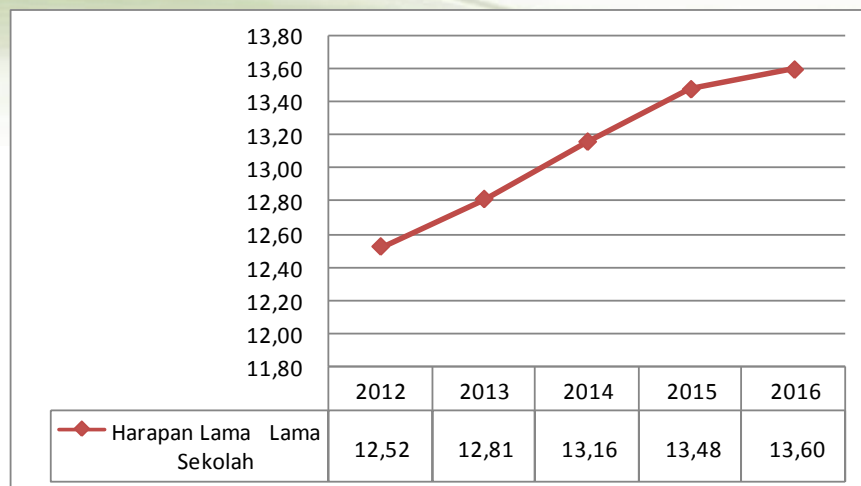
Dari tabel 3.3.35 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,12 Angka harapan lama sekolah sebesar 13,6 berarti lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di Sumatera Barat pada tahun mendatang adalah selama 13,6 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus perguruan tinggi (setingkat sarjana). Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2016 sebesar 13,6 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 15,09 menunjukkan peningkatan sebesar 1,49. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tahun 2021.

Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan, sebagaimana tergambar pada grafik 3.7 berikut:



Grafik 3. 7 Trend Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan grafik 3.7, diketahui Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Sumatera Barat yang bersekolah sampai ke perguruan tinggi. Guna terus meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan di sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah di beberapa lokasi terutama di kabupaten/kota yang memiliki angka Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, penambahan kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah, serta mengencakan paket A, B, dan C.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Dari tabel 3.3.33. dapat dilihat, indikator Rata-rata lama sekolah target 8,46, terealisasi 8,42 dengan tingkat capaian 99,53%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel 3.3.36.

Tabel 3.3. 36. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,42	8,29	99,53	100,34	8,66

Dari tabel 3.3.36 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,13. Dengan angka rata-rata lama

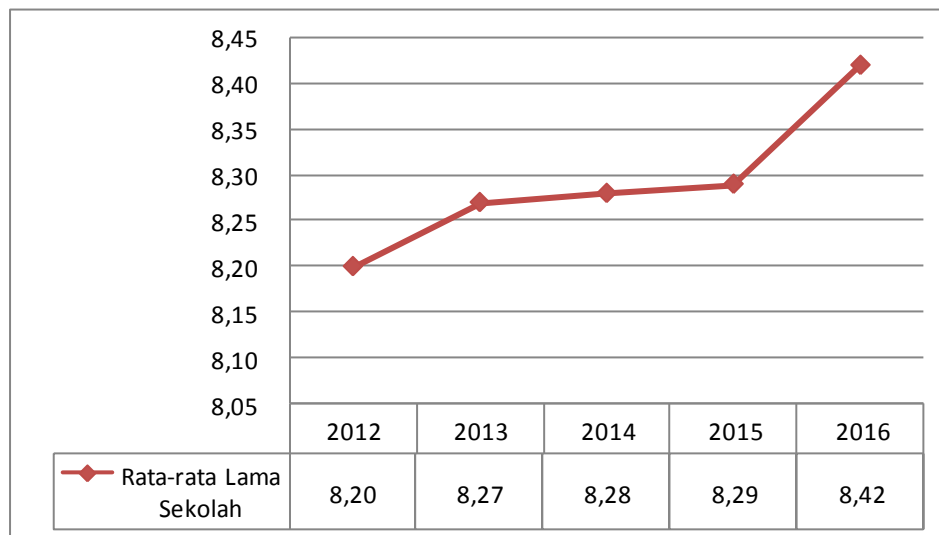


sekolah sebesar 8,42 berarti rata-rata pendidikan penduduk provinsi Sumatera Barat adalah SMP kelas 3. Capaian indikator kinerja ini tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan sebesar 0,81%.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2016 sebesar 8,42 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 8,66 menunjukkan peningkatan sebesar 0,24. Artinya, dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis mencapai target tahun 2021.

Pada grafik 3.8 berikut dapat dilihat trend perkembangan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat rentang waktu 2012-2016.

Grafik 3. 8 Trend Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2012-2016)



Dari grafik 3.8 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah pada 5 tahun terakhir mengalami trend peningkatan yaitu 8,20 pada tahun 2012, meningkat menjadi 8,27 tahun pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi 8,28 dan pada tahun 2015 menjadi 8,29, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 8,42.

Capaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 99,53% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh upaya berikut ini: Pembangunan unit sekolah atau kelas baru; Pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu; Pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi; Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan melalui Bimtek dan Sosialisasi; Penyelenggaraan ujian paket A setara SD, penyelenggaraan ujian paket B setara SMP dan penyelenggaraan ujian paket C setara SMA.



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar Rp. 28.951.811.408,- terealisasi Rp. 23.876.428.273,- atau sebesar 82,47%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,53% atau Rp. 5.075.383.135,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ada 7 (tujuh) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar, Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Tujuan 3.2 *Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.*

Tujuan kedua dari misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 37 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,08	73,1
2	Angka Putus SMA	0,88	0,95
3	Angka Putus SMK	1,53	0,95
4	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di PT	31,37	41,32

Dari tabel 3.3. 37 diketahui bahwa:

1. Realisasi APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,02



2. Realisasi angka putus SMA tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,07. Dengan penurunan angka putus SMA berarti tingkat pendidikan SMA sudah semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Realisasi angka putus SMK tahun 2015-2016 menunjukkan peningkatan sebesar 0,58. Artinya siswa SMK yang putus sekolah lebih tinggi di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.
4. Realisasi lulusan Sekolah menengah yang diterima di PT tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 9,97%.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat yang diukur berdasarkan realisasi empat indikator kinerja di atas belum dapat dicapai dengan maksimal.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 3.2.1.

Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.38.

Tabel 3.3. 38. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C	73,15	73,08	99,90
2	Angka Putus SMA	0,83	0,88	93,98
3	Angka Putus SMK	0,82	1,53	13,41
4	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	42,98	31,37	72,99
Rata-rata Capaian				70,07



Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat, rata-rata capaian 4 indikator kinerja utama sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan adalah 70,07%, termasuk kategori keberhasilan cukup. Masing-masing indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat, target indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C adalah sebesar 73,15%, terealisasi 73,08% dan tingkat capaian 99,90% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C diperoleh dengan membandingkan jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C usia 16 s.d 18 tahun dengan jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2016 yang berusia 16 s.d 18 tahun. Perhitungan APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C adalah sebagai berikut:

$$\text{APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C} = \frac{231.140}{316.284} \times 100\% = 73,08\%$$

Ket = Jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C usia 16-18 tahun tahun 2016 = 231.140
Jumlah penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2016 = 316.284

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dapat dilihat pada tabel 3.3.39.

Tabel 3.3. 39. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN (%)		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,08	73,1	99,9	91,38	73,35

Dari tabel 3.3.39 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,02%. Capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan dengan peningkatan sebesar 8,52%.

Realisasi indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C tahun 2016 sebesar 73,08% dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 73,35% menunjukkan peningkatan sebesar 0,27%. Jika dilihat dari tren peningkatan realisasi tahun 2015-2016 dan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.



Capaian indikator kinerja persentase APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 99,9% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini tidak luput dari usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui penyelenggaraan paket C setara SMA, penambahan ruang kelas sekolah dan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang rusak.

2. Angka Putus SMA

Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat indikator kinerja angka putus SMA target sebesar 0,83%, terealisasi sebesar 0,88%, dengan tingkat capaian 93,98% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Perhitungan angka putus sekolah adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Putus SMA} = \frac{981 \text{ orang}}{111.000 \text{ orang}} \times 100\% = 0,88\%$$

Ket = Jumlah siswa putus SMA tahun 2016 = 981 orang
Jumlah siswa pada jenjang SMA di tahun 2016 = 111.000 orang

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja angka putus SMA dapat dilihat pada tabel 3.3.40.

Tabel 3.3. 40. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Putus SMA

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Angka Putus SMA	0,88	0,95	93,98		0,58

Dilihat dari tabel 3.3.40 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja angka putus SMA tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,07. Hal ini berarti kondisi pendidikan yang semakin membaik, karena semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja angka putus SMA tahun 2016 sebesar 0,88% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 0,58% atau



menurun sebesar 0,3% dari realisasi tahun 2016. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang tersedia, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja angka putus SMA sebesar 93,98% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh adanya Program Bantuan Operasional Sekolah Menengah, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Paket C setara SMA.

3. Angka Putus SMK

Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat indikator kinerja angka putus SMK target sebesar 0,82%, terealisasi sebesar 1,53%, dengan tingkat capaian 13,41%, termasuk kategori keberhasilan kurang.

Perhitungan angka putus sekolah adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Putus SMK} = \frac{1.261 \text{ orang}}{82.646 \text{ orang}} \times 100\% = 1,53$$

Ket = Jumlah siswa putus SMK tahun 2016 = 1.261 orang
Jumlah siswa pada jenjang SMK di tahun 2016 = 82.646 orang

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja angka putus SMK dapat dilihat pada tabel 3.3.41.

Tabel 3.3. 41. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Putus SMK

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Angka Putus SMK	1,53	0,95	13,41		0,58

Dilihat dari tabel 3.3.41 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja angka putus SMK tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,58. Hal ini berarti kondisi pendidikan yang kurang baik. Capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja angka putus SMA tahun 2016 sebesar 1,53% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 0,58% atau menurun sebesar 0,95% dari realisasi tahun 2016. Untuk mencapai target tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada.



Capaian indikator kinerja angka putus SMK tahun 2016 sebesar 13,41% termasuk kategori keberhasilan kurang. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh meningkatnya angka putus SMA. Peningkatan angka putus SMK ini disebabkan karena besarnya biaya magang dan praktek yang tidak bisa ditanggung oleh siswa SMK yang mengakibatkan siswa tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mengajukan usulan dana bantuan sosial untuk siswa SMK yang magang dan praktek. Diharapkan melalui bantuan sosial ini mereka dapat menyelesaikan tahap akhir dari proses kejuruannya.

4. Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi

Dari tabel 3.3.38 dapat dilihat, indikator kinerja Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi target 42,98%, terealisasi 31,37% dengan tingkat capaian 72,99%, termasuk kategori keberhasilan cukup.

Indikator kinerja lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi diukur dengan membandingkan jumlah siswa tamatan Sekolah Menengah se Sumatera Barat tahun ajaran 2015/2016 yang diterima di perguruan tinggi negeri/swasta dengan jumlah siswa lulus pada tahun ajaran 2015/2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi} = \frac{11.314 \text{ orang}}{36.069 \text{ orang}} \times 100\% = 31.37\%$$

Ket = Jumlah siswa tamatan Sekolah Menengah tahun ajaran 2015/2016 yang diterima di perguruan tinggi sebanyak= 11.314 orang
Jumlah siswa sekolah menengah yang lulus tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 36.069 orang

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi dapat dilihat pada tabel 3.3.42.

Tabel 3.3. 42. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	31,37	41,32	72,99	118,06	52,05

Dari tabel 3.3.42 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Tinggi tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 9,95%. Capaian indikator kinerja ini tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren penurunan sebesar



45,07% dikarenakan target yang ditetapkan tahun 2015 lebih rendah dibandingkan target tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi tahun 2016 sebesar 31,37% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan sebesar 20,68%. Dengan memperhatikan tren tahun 2015-2016 yang menunjukkan penurunan maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada untuk mencapai target tahun 2021.

Capaian indikator kinerja lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi sebesar 72,99% termasuk kategori keberhasilan Cukup. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- a. Meningkatnya kompetensi lulusan sehingga mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia untuk merebut kursi di Perguruan tinggi,
- b. Meningkatnya kinerja guru sehingga mampu mempersiapkan tamatan yang kompeten.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan lulusan sekolah menengah yang diterima di perguruan tinggi adalah dengan meningkatkan kualitas anak didik sekolah menengah melalui pendalaman materi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBDP Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan adalah sebesar Rp. 45.502.410.060,- terealisasi Rp. 23.102.134.695,- atau sebesar 50,77%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 49,23% atau Rp. 22.400.275.365,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan adalah program peningkatan akses, perluasan dan mutu pendidikan menengah.



Tujuan 3.3 *Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak*

Tujuan ketiga dari misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 43 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.3

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Angka Harapan Hidup	68,66	68,32
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71	na
3	IPG	94,74	94,04
4	IDG	62,42	61,86
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100,000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi	6,8	na

Dari tabel 3.3.43 di atas diketahui bahwa realisasi tiga indikator kinerja yang dijadikan ukuran pencapaian tujuan 3.3 yaitu indikator kinerja Angka harapan hidup, IPG dan IDG tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan. Sementara itu realisasi dua indikator lainnya yaitu indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk dan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi tidak dapat dibandingkan dikarenakan data 2015 tidak tersedia. Akan tetapi, realisasi ke 2 indikator tersebut tergolong sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak yang diukur berdasarkan realisasi lima indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 3.3.1.****Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Merata**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.44.

Tabel 3.3. 44. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Angka Harapan Hidup	68,79	68,66	99,81

Dari tabel 3.3.44 dapat dilihat bahwa indikator kinerja Angka harapan hidup target 68,79 terealisasi 68,66 dengan tingkat capaian 99,81% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi Angka harapan hidup diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh BPS Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 36/6/13/ThXIX tanggal 15 Juni 2016.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Angka Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel 3.3.45.

Tabel 3.3. 45. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Angka Harapan Hidup	68,66	68,32	99,81	95,58	69,44

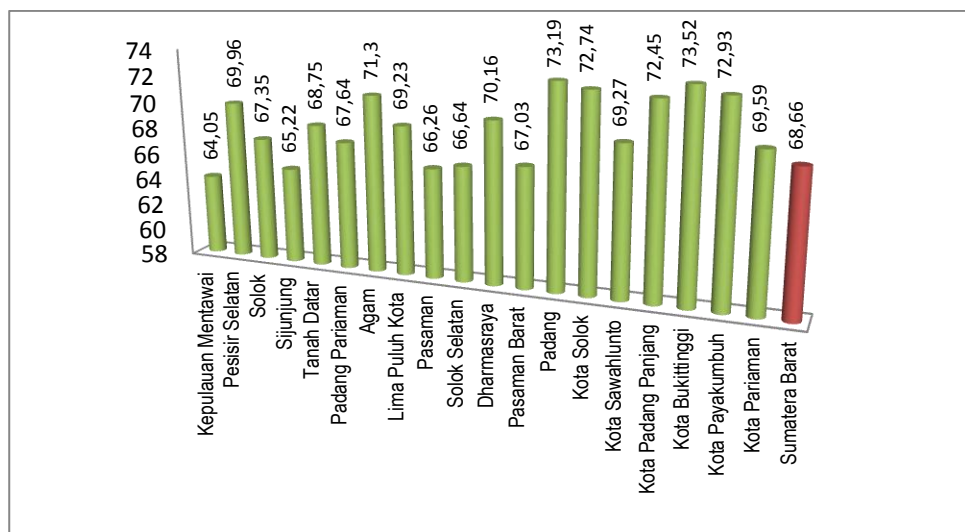
Dari tabel 3.3.45 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja angka harapan hidup dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan angka harapan hidup penduduk Provinsi Sumatera Barat semakin tinggi. Capaian kinerja indikator kinerja ini dari tahun 2015-2016 juga menunjukkan peningkatan sebesar 4,23%.

Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2016 sebesar 68, 66 dibandingkan target tahun terakhir RRJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan

peningkatan sebesar 0,78. Dengan mempertimbangkan tren peningkatan tahun 2015-2016 maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

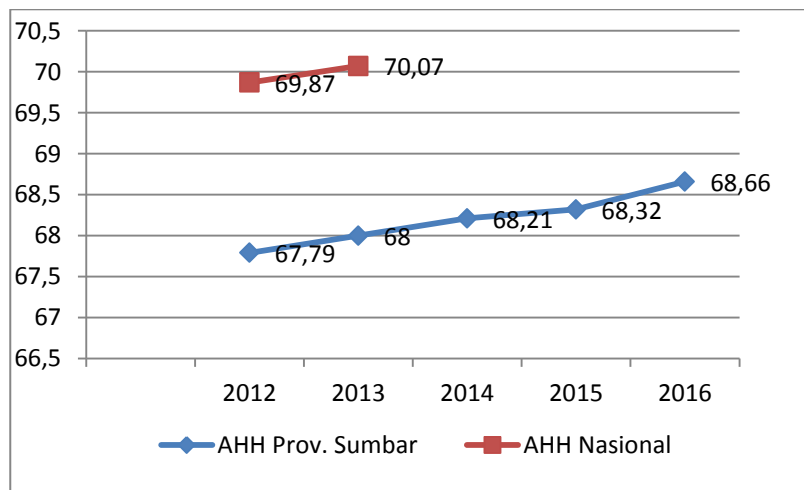
Dari 19 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka harapan hidup 12 Kabupaten/Kota sudah di atas angka harapan hidup Provinsi. Lima Kabupaten/Kota dengan AHH tertinggi adalah Kota Bukittinggi (73,52), Kota Padang (73,19), Kota Payakumbuh (72,93), Kota Solok (72,74) dan Kota Padang Panjang (72,45). Sementara itu AHH terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (64,05). AHH masing-masing Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.9.

Grafik 3. 9 AHH Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Selama lima tahun terakhir, angka umur harapan hidup Provinsi Sumatera Barat memang telah meningkat secara signifikan. Perbandingan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional tergambar pada grafik 3.10

Grafik 3. 10 Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi dengan Nasional





Dari grafik 3.10 terlihat, jika dibandingkan dengan tingkat nasional, angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah nasional. Angka harapan hidup nasional cenderung lebih tinggi sebesar 1,41. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyingkapi ini dengan perubahan kebijakan dan program/kegiatan terkait peningkatan kualitas hidup sebagai prioritas pembangunan.

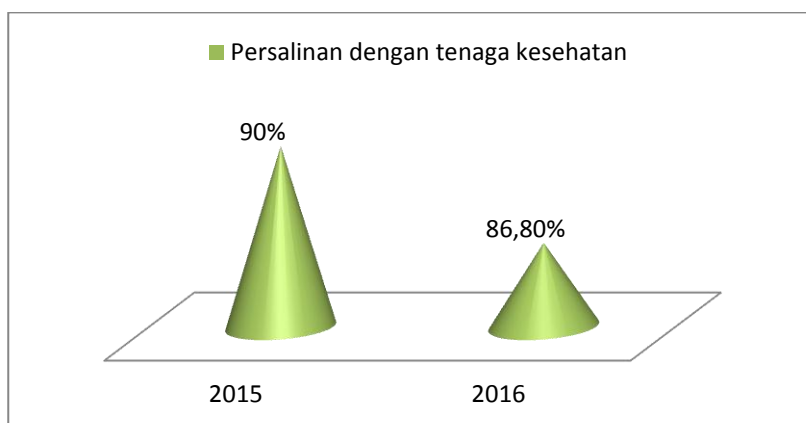
Capaian indikator kinerja Angka umur harapan hidup sebesar 99,81%, termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan adanya dukungan lintas sektor terkait yang berperan dalam meningkatkan kesehatan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup sebesar 99,81% didukung oleh keberhasilan capaian beberapa indikator kinerja lain sebagai berikut:

1. Persalinan dengan tenaga kesehatan

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Data tentang persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes) diperoleh berdasarkan laporan rutin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Pada tahun 2016, persentase cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan sebesar 86,80%. Dibandingkan dengan tahun 2015, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di tahun 2016 menurun sebesar 3,2%. Tren realisasi indikator kinerja persalinan dengan tenaga kesehatan sebagaimana tergambar pada grafik 3.11.

Grafik 3. 11. Tren Realisasi Persalinan dengan Tenaga Kesehatan tahun 2015-2016

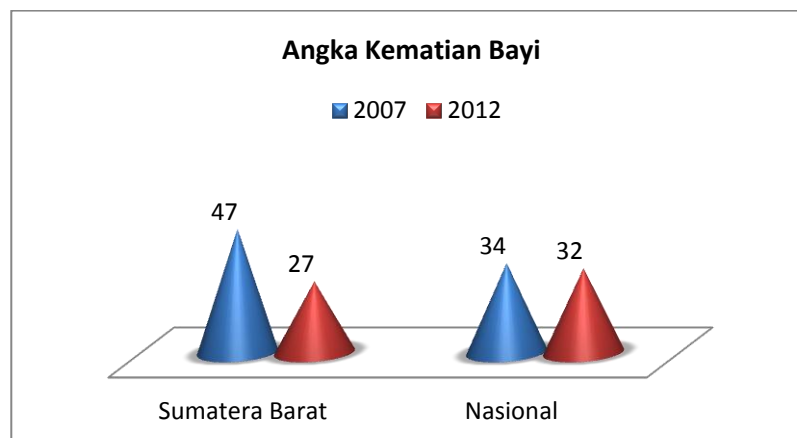




2. Penurunan Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap umur harapan hidup yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan dan merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (MDGs 4) yaitu mengurangi kematian bayi menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui survey yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh BPS. Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orangtua si bayi. Pada tahun 2007, Angka kematian bayi Provinsi Sumatera Barat turun sebesar 47/1000 kelahiran hidup dan menjadi 27/1000 kelahiran hidup tahun 2012. Tren realisasi Angka Kematian Bayi tahun 2007 dan 2012 Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebagaimana tergambar pada grafik 3.12.

Grafik 3. 12 Perbandingan AKB Provinsi Sumbar dengan Nasional



3. Angka Kematian Ibu

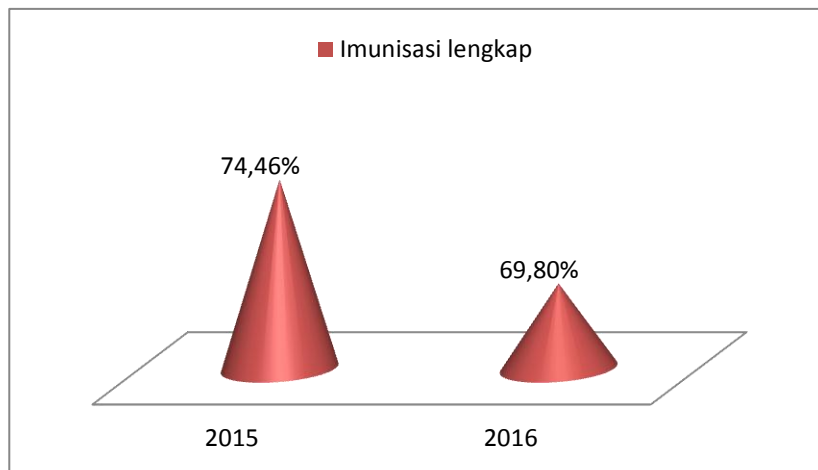
Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sumatera Barat belum keluar dikarenakan AKI ditetapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS setiap 5 (lima) tahun sekali. sampai saat ini AKI masih berdasarkan hasil survei FK Unand tahun 2008 yaitu 212/100.000 kelahiran hidup. Namun berdasarkan data dari kabupaten/kota se Sumatera Barat, dari tahun 2011-2015, *trend* angka kematian ibu menunjukkan *trend* yang fluktuatif. Dibandingkan dengan AKI di tahun 2011, terjadi penurunan AKI sebesar 19 kasus di tahun 2015.



4. Imunisasi lengkap anak usia di bawah 1 tahun.

Realisasi imunisasi lengkap anak usia di bawah 1 tahun tahun 2016 sebesar 69,8% lebih rendah sebesar 4,66% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, sebagaimana tergambar pada grafik 3.13.

Grafik 3. 13. Tren Realisasi Imunisasi lengkap anak usia di bawah 1 tahun 2015-2016



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBDP Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata adalah sebesar Rp. 541.693.550.836- terealisasi Rp. 481.812.655,43,- atau sebesar 88,95%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,05% atau Rp. 59.881.429.180,57,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata adalah program obat dan perbekalan kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular/tidak menular, Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru/RS Mata, Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

**Sasaran Strategis 3.3.2.****Meningkatnya Kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.46.

Tabel 3.3. 46. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	2,61	2,79	93,10
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22	0,71	141,80
Rata-Rata Capaian				117,45

Dari tabel 3.3.46 dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana sebesar 117,45% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun

Dari tabel 3.3.46 dapat dilihat, indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun target 2,61%, terealisasi 2,79% dengan tingkat capaian sebesar 93,10% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dengan asumsi tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 dapat dilihat pada tabel 3.3.47



Tabel 3.3. 47. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49

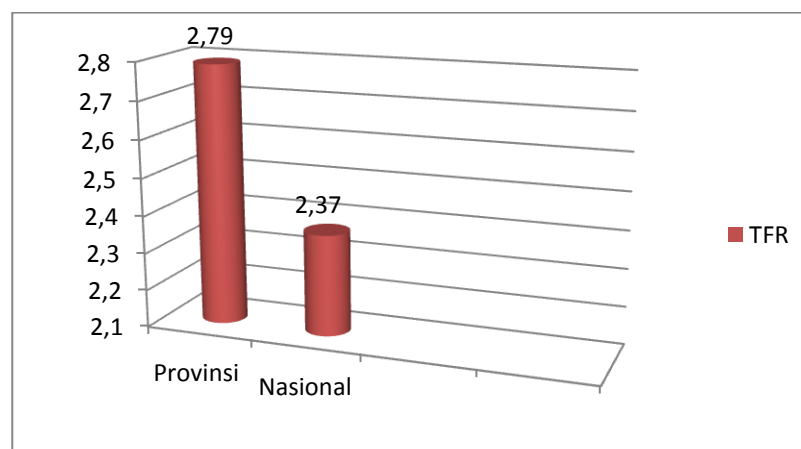
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49	2,79	2,7	93,1	-	2,33

Dari tabel 3.3.47 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,9%. Capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun 2016 sebesar 2,79 dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 2,33 menunjukkan penurunan sebesar 0,46. Berdasarkan tren realisasi tahun 2015-2016 yang menunjukkan peningkatan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada untuk mencapai target tahun 2021 tersebut.

Dibandingkan dengan angka Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tingkat nasional di tahun 2016 sebesar 2,37, angka Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi sebesar 0,42 sebagaimana tergambar pada grafik 3.14.

Grafik 3. 14. Perbandingan TFR Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016





2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari tabel 3.3.46 dapat dilihat, indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk target 1,22%, terealisasi 0,71% dengan tingkat capaian 141,80% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk diukur berdasarkan data Kependudukan Bersih (DKB) semester II tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Perhitungan realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Penduduk} = \frac{5.452.274 \text{ jiwa} - 5.491.074 \text{ jiwa}}{5.491.074 \text{ jiwa}} \times 100\% = 0,71\%$$

Ket = Jumlah penduduk tahun 2016 = 5.452.274 jiwa
Jumlah penduduk tahun 2015 = 5.491.074 jiwa

Rekapitulasi data kependudukan tahun 2016 pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.3.48.

Tabel 3.3. 48. Data Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			%
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Kota Padang Panjang	26,701	26,234	52,935	0.97
2	Kota Sawahlunto	32,100	32,006	64,106	1.18
3	Kota Solok	34,027	33,915	67,942	1.25
4	Kepulauan Mentawai	43,551	39,716	83,267	1.53
5	Kota Pariaman	44,714	44,003	88,717	1.63
6	Kota Bukittinggi	57,930	57,709	115,639	2.12
7	Kota Payakumbuh	65,016	64,346	129,362	2.37
8	Solok Selatan	90,695	86,236	176,931	3.25
9	Dharmasraya	104,132	100,017	204,149	3.74
10	Sijunjung	118,042	114,707	232,749	4.27
11	Pasaman	158,662	155,868	314,530	5.77
12	Tanah Datar	182,954	182,086	365,040	6.70
13	Lima Puluah Kota	186,608	186,341	372,949	6.84
14	Solok	190,078	184,598	374,676	6.87
15	Pasaman Barat	217,877	209,481	427,358	7.84
16	Padang Pariaman	234,146	226,596	460,742	8.45
17	Pesisir Selatan	262,416	254,303	516,719	9.48
18	Agam	264,555	258,780	523,335	9.60
19	Kota Padang	443,839	437,289	881,128	16.16
Sumatera Barat		2,758,043	2,694,231	5,452,274	100



Dilihat dari tabel 3.3.48, dari Kabupaten/Kota yang tercakup dalam wilayah Sumatera Barat, bahwa pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kota Padang (16,16%), Agam (9,60%) dan Pesisir Selatan (9,48%). Tingginya jumlah penduduk di tiga kabupaten/kota tersebut karena Padang merupakan Ibu Kota Provinsi dan juga sebagai pusat pendidikan di Sumatera Barat, Agam sebagai pusat Perdagangan dan Pesisir Selatan merupakan daerah wisata yang sedang dikembangkan saat ini.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel 3.3.49.

Tabel 3.3. 49. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71	na	141,8	-	1,02

Dilihat dari tabel 3.3.49 diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 karena ketidaktersediaan data. Pada beberapa tahun terakhir, realisasi laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan data sensus penduduk, terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2010 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,33%.

Realisasi indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 0,71 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 1,02 telah melebihi target yang ditetapkan. Artinya pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hal tersebut, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 dan laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2016 sebesar 93,10 dan 141,8% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh program pemerintah untuk mensosialisasikan Program Keluarga Berencana dengan menekan angka kelahiran, seperti peningkatan jumlah aseptor.

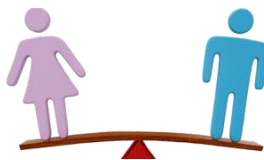
Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana



adalah sebesar Rp. 16.350.854.243,- terealisasi Rp. 15.592.066.537,- atau sebesar 95,36. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,64% atau Rp. 758.787.706,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana adalah Program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak, Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Manajemen Layanan teknis lainnya, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Pengembangan organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga dan Program Peningkatan Penyadaran Pemuda.

Sasaran Strategis 3.3.3.



Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta Pemenuhan Terhadap Hak Anak

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.50.

Tabel 3.3. 50. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3.3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,74	100,06
2	Indeks Pemberdayaan Gender	62,02	62,42	100,64
3	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi	8,04	6,8	115,42
Rata-Rata Capaian				105,38

Dari tabel 3.3.50 dapat dilihat, rata-rata capaian ketiga indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak adalah sebesar 105,38% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:



1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG juga merupakan ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dari tabel 3.3.50 dapat dilihat indikator kinerja IPG target 94,68, terealisasi 94,74 dengan tingkat capaian 100,06% termasuk kategori penilaian sangat baik.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dari tabel 3.3.50 dapat dilihat indikator kinerja IDG target 62,02, terealisasi 62,42 dengan tingkat capaian 100,64% termasuk kategori penilaian sangat baik.

Realisasi indikator kinerja IPG dan IDG diukur berdasarkan data dari Laporan BPS Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja IPG dan IDG dapat dilihat pada tabel 3.3.51

Tabel 3.3. 51. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja IPG dan IDG

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	IPG	94,74	94,04	100,06	130,38	95,08
2	IDG	62,42	61,86	100,64	100	62,42

Dari tabel 3.3.51 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja IPG dan IDG tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan masing-masing sebesar 0,7 dan 0,56. Sementara itu untuk capaian indikator kinerja IPG tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 30,32%, dan untuk indikator kinerja IDG tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,64%.

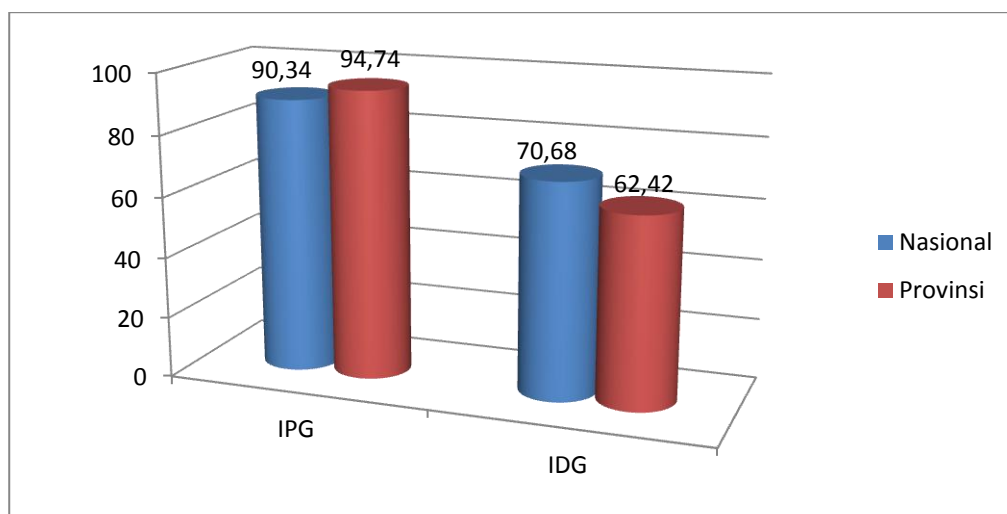


Realisasi indikator kinerja IPG tahun 2016 sebesar 94,74% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan sebesar 0,34%. dengan mempertimbangkan akumulasi peningkatan sebesar 0,7 per tahun selama 5 tahun maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Realisasi indikator kinerja IDG tahun 2016 sebesar 62,42% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 62,42% menunjukkan target tahun 2021 telah tercapai. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional tahun 2016 capaian IPG Provinsi Sumatera Barat diatas rata-rata nasional. Selanjutnya IDG Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan Nasional tahun 2016 berada di bawah capaian nasional, artinya pemberdayaan gender di Sumatera Barat masih kurang dan belum optimal, salah satunya adalah masih rendahnya dimensi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Perbandingan realisasi IPG dan IDG nasional dengan provinsi sebagaimana tergambar pada grafik 3.15.

Grafik 3. 15 Perbandingan Realisasi IPG Nasional dengan Provinsi Tahun 2016



Capaian kinerja IPG sebesar 100,06% dan IDG sebesar 100,64% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Artinya implementasi terhadap pembangunan gender di Sumatera Barat telah terwujud terbukti dengan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah peringkat ke-1 (kesatu) pada Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja IPG dan IDG adalah pembentukan pokja PUG Provinsi, Kabupaten/Kota,



meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi kegiatan terkait PUG melalui Rakorda Pembangunan Pemberdayaan Perempuan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Penguatan sistem data terpilah gender.

Untuk menilai pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap suatu daerah dan hubungannya dengan IPG, bisa dibandingkan dan di analisa dengan analisis quadran. Klarifikasi Provinsi-Provinsi di Indonesia di bagi kedalam 4 quadran dengan menggunakan nilai nasional sebagai *cut off point*. Ke Empat quadran itu adalah sebagai berikut :

1. Kuadran I : IPG tinggi dan IDG tinggi
2. Kuadran II : IPG rendah dan IDG tinggi
3. Kuadran III : IPG rendah dan IDG rendah
4. Kuadran IV : IPG tinggi dan IDG rendah

Apabila dilakukan analisa quadran dari trend kinerja tahun 2014-2015, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam quadran IV yaitu IPG tinggi dan IDG rendah. Ini berarti pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, di tandai dengan nilai IPG di atas *cut off point* (IPG Nasional), namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang tercermin dari nilai IDG yang rendah.

Salah satu penyebab masih rendahnya IDG di Sumatera Barat, karena masih rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik, dimana keterwakilan perempuan di bidang politik untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebanyak 7,38% dari anggota legislatif. sedangkan untuk Pejabat Struktural di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.3.52.

Tabel 3.3. 52 Komposisi Pejabat Struktural Di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Esselon II		Esselon III		Esselon IV		Jumlah
	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	
2015	4	43	81	216	299	426	1066
2016	6	44	93	223	336	463	1165

Dari tabel 3.3.52 di atas, tahun 2015 komposisi eselon II yang perempuan adalah sebesar 8,50% dari jumlah eselon II di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan



keputusan. Ke depan, diharapkan peranan perempuan mampu ditingkatkan lebih optimal agar terjadi peningkatan indeks pemberdayaan gender mencapai rata-rata nasional.

3. Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi

Dari tabel 3.3.50 dapat dilihat indikator kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi target 8,04%, terealisasi 6,8% dengan tingkat capaian 84,58% termasuk kategori penilaian sangat baik.

Realisasi indikator kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi diukur berdasarkan data yang terdapat pada laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Perhitungan realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi} = \frac{6.800 \text{ orang}}{100.000} \times 100\% = 6,8\%$$

Ket = Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus tahun 2016 = 6800 anak

Rincian anak yang memerlukan perlindungan khusus tahun 2016 adalah sebagai berikut

1	Anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)	=	614 orang
2	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba	=	9
3	Anak dengan HIV/AIDS	=	0
4	Anak korban kekerasan fisik dan psikis	=	394
5	Anak penyandang disabilitas	=	5.783
JUMLAH		=	6.800

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.3. 53

Tabel 3.3. 53. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi	6,8	-	115,42		7,8



Dari tabel 3.3.53 realisasi dan capaian indikator kinerja ini tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi tahun 2016 sebesar 6,8% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 menunjukkan realisasi tahun 2016 telah melebihi target tahun 2021. Oleh karena itu, penetapan target tahun 2021 akan dikaji kembali.

Capaian indikator kinerja Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi sebesar 115,42% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh penyusunan, pengkoordinasian, dan harmonisasi berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, adanya penghargaan menuju kota layak anak. Di tahun 2016, di Provinsi Sumatera Barat ada 6 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan menuju kota layak anak yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan gender serta pemenuhan terhadap hak anak adalah sebesar Rp. 3.718.675.450- terealisasi Rp. 3.572.587.319,- atau sebesar 96,07%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,93% atau Rp. 146.008.131,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja IPG dan IDG adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan, Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

**MISI 4****MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH.**

Misi ke empat dari RPJMD tahun 2016-2021 adalah meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah. Untuk mewujudkan misi ini telah ditetapkan 4 (empat) tujuan. Uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 4.1 *Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.*

Tujuan pertama dari misi ke empat RPJMD 2016-2021 adalah meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 54 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,52

Pembangunan ekonomi yang berkualitas dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Dari tabel 3.3.54 dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat melambat sebesar 0,26 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan belum tercapai secara maksimal.

Untuk pencapaian tujuan meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 4.1.1.****Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.55.

Tabel 3.3. 55. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pertumbuhan ekonomi	5,58	5,26	94,27
2	PDRB per kapita	36,48	37,21	102,00
3	Investasi (Rp. Triliyun)	3,11	4,87	156,59
4	Peningkatan Nilai Ekspor	1,5	-2,28	-152,00
Rata-Rata Capaian				50,21

Dari tabel 3.3.55 dapat dilihat rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah adalah sebesar 50,21% termasuk kategori keberhasilan kurang. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 3.3.55 dapat dilihat indikator kinerja pertumbuhan ekonomi target 5,58%, terealisasi 5,26% dengan tingkat capaian 94,27% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh BPS Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 9/02/13/Th. XX tanggal 6 Februari 2017. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% dapat dilihat dari sisi lapangan usaha dan sisi pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 3.3.56.

**Tabel 3.3. 56. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016**

Lapangan Usaha		Triw IV- 2016 terhadap Triw-2015	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan 2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.48	1.96	0.47
B	Pertambangan dan Penggalian	9.26	2.00	0.09
C	Industri Pengolahan	4.74	4.90	0.54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.32	10.94	0.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	7.58	6.40	0.01
F	Konstruksi	7.40	6.59	0.58
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.71	5.32	0.82
H	Transportasi dan Pergudangan	4.50	7.65	0.88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.45	11.15	0.11
J	Informasi dan Komunikasi	12.35	9.17	0.59
K	Jasa keuangan dan asuransi	10.22	8.03	0.24
L	Real Estate	3.68	5.37	0.10
M	Jasa Perusahaan	5.02	5.63	0.02
N	Adm Pemerintahan, pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	1.09	4.96	0.28
O	Jasa Pendidikan	6.19	8.49	0.31
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.79	4.58	0.06
Q	Jasa Lainnya	12.16	9.95	0.16
Total Pertumbuhan		4.86	5.26	5.26

Dari tabel 3.3.56 diketahui bahwa dari 17 (tujuh belas) jenis lapangan usaha, laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh bidang penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,15%, Pengadaan Listrik dan Gas 10,94% dan laju pertumbuhan terendah pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran dapat dilihat pada tabel 3.3.57.

Tabel 3.3. 57. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016

Komponen		Triw IV-2016 terhadap Triw- 2015	Laju Pertumbuhan 2016	Sumber Pertumbuhan 2016
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.38	4.39	2.28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.46	4.67	0.05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0.83	1.20	0.14
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.85	3.36	0.99
5	Perubahan Inventori	816.83	-2.34	-0.01
6	Ekspor Barang dan Jasa LN	-4.87	-12.84	-1.90
7	Dikurangi Impor Barang & Jasa LN	-54.15	-23.04	-1.43
8	Net Ekspor Antar Daerah	4.49	-68.32	2.26
Total Pertumbuhan		4.86	5.26	5.26



Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar 4,67% merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi yang kemudian diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,39% dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,36%.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.3.58.

Tabel 3.3. 58. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,52	94,27		6,54

Dari tabel 3.3.58 dapat dilihat realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 0,26%. Artinya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 melambat sebesar 0,26% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,26% dibandingkan dengan target di tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 6,54%, menunjukkan target di tahun 2021 meningkat sebesar 1,28. Dengan upaya yang optimal, target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar optimis dapat dicapai.

2. PDRB Perkapita

Dari tabel 3.3.55 dapat dilihat indikator kinerja PDRB Perkapita target 36,48%, terealisasi 37,21% dengan tingkat capaian 102% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja PDRB Perkapita diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh BPS Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 9/02/13/Th. XX tanggal 6 Februari 2017. Perhitungan PDRB perkapita adalah dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Total PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 berdasarkan pada harga berlaku adalah sebesar Rp. 195,68 T.

Komponen penunjang PDRB berdasarkan Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 3.3.59.

**Tabel 3.3. 59. PDRB menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2016 (Triliun Rp)**

Lapangan Usaha		Tahun 2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47.09
B	Pertambangan dan Penggalian	8.88
C	Industri Pengolahan	19.79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.18
F	Konstruksi	18.21
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	29.16
H	Transportasi dan Pergudangan	24.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.60
J	Informasi dan Komunikasi	9.52
K	Jasa keuangan dan asuransi	6.23
L	Real Estate	3.94
M	Jasa Perusahaan	0.85
N	Adm Pemerintahan, pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	11.43
O	Jasa Pendidikan	7.65
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.46
Q	Jasa Lainnya	3.50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		195.68

Komponen penunjang PDRB berdasarkan Pengeluaran atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 3.3.60.

Tabel 3.3. 60 PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2014-2016 Atas dasar harga berlaku (Triliun Rp)

Komponen		Tahun 2016
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103.79
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.19
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.14
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	58.90
5	Perubahan Inventori	0.28
6	Ekspor Barang dan Jasa LN	21.29
7	Dikurangi Impor Barang & Jasa LN	6.50
8	Net Ekspor Antar Daerah	-9.41
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		195.68

Dari sisi Lapangan usaha, Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 47,09 Triliun Rupiah, disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,16 Triliun Rupiah, serta transportasi dan pergudangan sebesar 24 Triliun Rupiah. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terdapat PDRB sebesar 103,79 Triliun Rupiah, disusul oleh pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 58,90 Triliun rupiah.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja PDRB Perkapita dapat dilihat pada tabel 3.3.61.

**Tabel 3.3. 61. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja PDRB Perkapita**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	PDRB Perkapita	37,21	34,53	102		48,91

Dari tabel 3.3.61 dapat dilihat tren realisasi dan capaian indikator kinerja PDRB Perkapita tahun 2015-2016. Realisasi indikator kinerja ini menunjukkan tren peningkatan sebesar 2,68%. Capaian indikator kinerja PDRB Perkapita di tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja PDRB Perkapita tahun 2016 sebesar 37,21% dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 48,91, menunjukkan peningkatan sebesar 11,7% dari realisasi tahun 2016. Dengan mempertimbangkan akumulasi peningkatan 2,68% selama lima tahun maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 94,27% dan PDRB perkapita sebesar 102% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi, peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum dan lapangan usaha transportasi

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita adalah sebesar Rp. 29.533.167.535,- terealisasi Rp. 26.752.799.574,- atau sebesar 90,59%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,41% atau Rp. 2.780.367.961,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi, Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Ekonomi Maritim, Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Program Peningkatan Perlindungan



Konsumen, Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Program Pengembangan Perwilayahan.

3. Investasi

Dari tabel 3.3.55 dapat dilihat indikator kinerja investasi target 3,11%, terealisasi 4,87% dengan tingkat capaian 156,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja investasi diukur berdasarkan data investasi BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat dari 51 (lima puluh satu) Perusahaan Penanaman Modal Asing dan 74 (tujuh puluh empat) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri selama tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Investasi PMA (79.268,10 RibU USD)	= Rp.1.078.046.160.000
Investasi PMDN	= <u>Rp.3.795.575.500.000</u> +
Total Investasi	= Rp.4.873.621.660.000

Realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada tabel 3.3.62

Tabel 3.3. 62. Realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2016

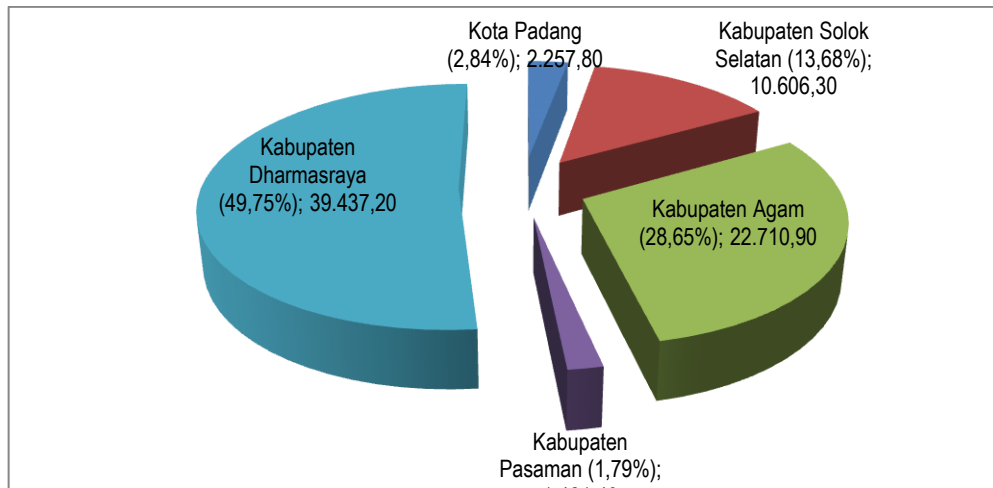
No	Sektor Usaha	Investasi PMA		Investasi PMDN	
		US \$ (ribu)	%	Juta Rupiah	%
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	25.031,70	31.58	60.283,80	1.59
2	Pertambangan	1.778,40	2.24	48.818,90	1.29
3	Industri Makanan	37.451,90	47.25	724.590,40	19.09
4	Industri Kayu	218,10	0.28	4.745,00	0.13
5	Listrik, Gas dan Air	11.926,30	15.05	73.296,50	1.93
6	Perdagangan dan Reparasi	977,70	1.23	9.412,70	0.25
7	Hotel dan Restoran	573,10	0.72	30.572,50	0.81
8	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	102,00	0.13	3.661,90	0.10
9	Jasa lainnya	1.208,90	1.53	4.446,00	0.12
10	Peternakan			5.241,70	0.14
11	Industri Kimia dan Farmasi			4.500,00	0.12
12	Industri Mineral Non Logam			2.749.252,40	72.43
13	Industri Logam, Mesin dan Elektronika			51.500,00	1.36
14	Konstruksi			25.253,70	0.67
	TOTAL	79.268,10		3.795.575,50	

Dari tabel 3.3.62 dapat dilihat, investasi PMA terbesar adalah pada sektor usaha industri makanan (47,25%), tanaman pangan dan perkebunan 31,58% dan listrik, gas dan air (15,05%). Sementara itu untuk investasi PMDN terbesar adalah pada sektor industri mineral non logam (72,43%) dan industri makanan (19,09%).

Berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMA di 5 besar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada di Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi terhadap realisasi investasi PMA sebesar 49,75% (US \$ 39.437,20 ribu). Kemudian secara berurutan di Kabupaten Agam

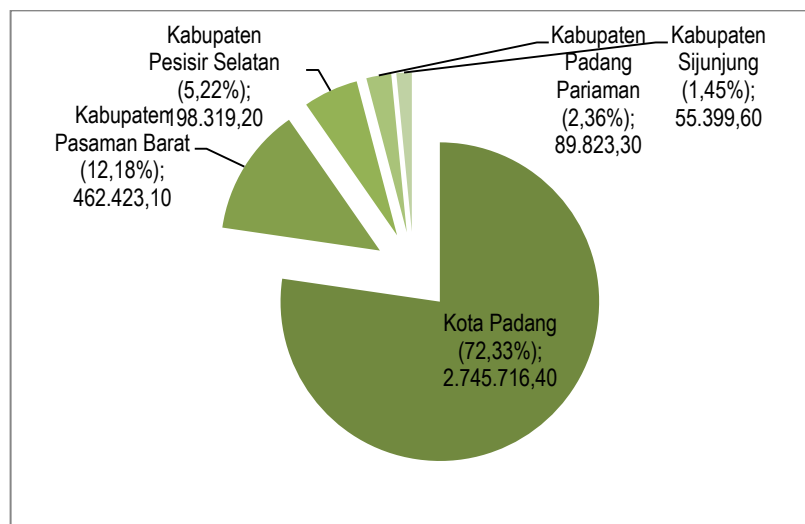
sebesar 28,65% (US\$ 22.710,9 ribu), Kabupaten Solok Selatan sebesar 13,68% (US \$ 10.606,30 ribu), Kota Padang sebesar 2,84% (US\$ 2.257,80 ribu) dan Kabupaten Pasaman sebesar 1,79% (US\$ 1.421,40 ribu) sebagaimana tergambar pada grafik 3.16.

Grafik 3. 16 Penyebaran Realisasi PMA di Sumatera Barat Tahun 2016 (Ribu US\$)



Realisasi investasi PMDN di 5 besar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat berada di Kota Padang sebesar 72,33% (Rp. 2.745.716,40 juta). Kemudian secara berurutan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 12,18% (Rp. 462.423,10 juta), Kabupaten Pesisir Selatan 5,22% (Rp. 198.319,20 juta), Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2,36% (Rp. 89.823,30 juta) dan Kabupaten Sijunjung sebesar 1,45% (Rp. 55.399,60 juta) sebagaimana tergambar pada grafik 3.17.

Grafik 3. 17 Penyebaran Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2016 (Juta Rp)



Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja investasi dapat dilihat pada tabel 3.3.63.

**Tabel 3.3. 63. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Investasi**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Investasi (Rp Triliun) (Kurs; 13.600)	4,48	3,72	156,59		4,76
2	Penambahan Realisasi Investasi					-
-	PMDN (Rp. M)		3.185,08		455,01	
-	PMA (US\$ Juta)		39,75		159	

Dari tabel 3.3.63 diketahui realisasi indikator kinerja investasi tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar Rp 0,76 T. Jika dilihat data realisasi investasi tahun 2015 maka peningkatan investasi ini berasal dari peningkatan investasi PMA. Untuk capaian indikator kinerja investasi tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan adanya penyempurnaan indikator kinerja.

Realisasi indikator kinerja investasi tahun 2016 sebesar Rp. 4,48 T dibandingkan dengan target tahun 2016-2021 sebesar 4,76 T, menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 0,28 T dari realisasi tahun 2016. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi dari tahun 2015-2016 sebesar 0,76 T maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja investasi sebesar 156,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Dilaksanakannya sosialisasi kebijakan penanaman modal, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat serta dunia usaha mengenai kebijakan/aturan dibidang penanaman modal.
- Dilaksanakannya bimbingan dan penyuluhan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan tujuan agar penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal memahami tentang kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal.
- Melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, sebagai upaya guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Barat di tahun yang akan datang maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan:



- a. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi yang lebih baik dan ketersediaan energi.
- b. Mengintegrasikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi, dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menekan *high cost economy* yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang memberatkan investor.
- d. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan inventarisasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan mengoptimalkan kinerja tim *task force* penanaman modal.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja investasi adalah sebesar Rp. 2.458.858.000,- terealisasi Rp. 2.221.653.990,- atau sebesar 90,35%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,65% atau Rp. 237.204.010,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja investasi adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

4. Peningkatan Nilai Ekspor

Dari tabel 3.3.55 dapat dilihat indikator kinerja peningkatan nilai ekspor target 1,5%, terealisasi -2,28% dengan tingkat capaian -152% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja peningkatan nilai ekspor diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh BPS Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 5/01/13/Th. XX tanggal 16 Januari 2017. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Nilai Ekspor} = \frac{1.708,1 \text{ Juta US\$} - 1.748 \text{ Juta US\$}}{1.748 \text{ Juta US\$}} \times 100\% = -2,28\%$$

Ket : Nilai ekspor tahun 2016 = 1.708,1 Juta US\$
Nilai Ekspor tahun 2015 = 1.748 Juta US\$



Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 seluruhnya berasal dari komoditi non migas. Ekspor non migas berasal dari 10 (sepuluh) golongan barang dengan rincian pada tabel 3.3.64.

Tabel 3.3. 64. Ekspor Komoditi Non Migas Tahun 2015-2016

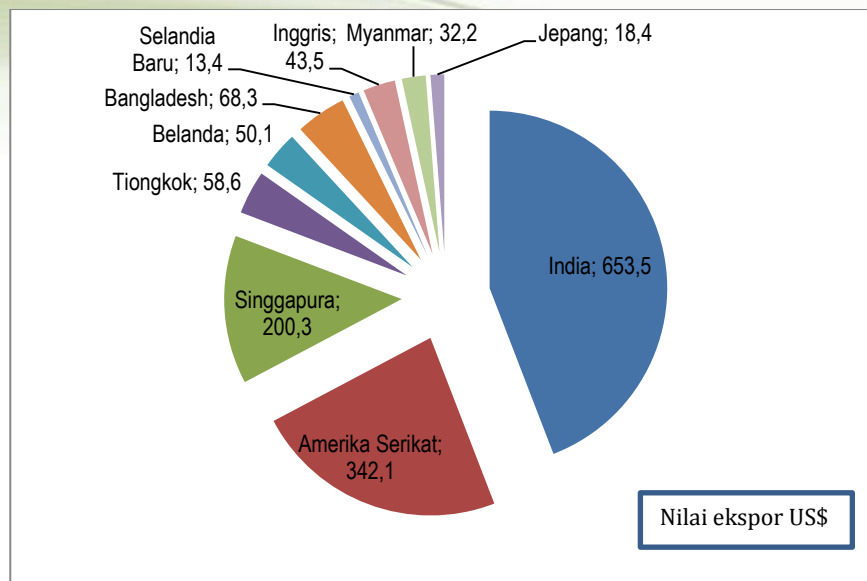
No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US \$)		Perubahan Jan-Des 2016 thd 2015 (%)	Peran thd Total Jan-Des 2016 (%)
		Jan-Des 2015	Jan-Des 2016		
1	Lemak & Minyak Hewan/nabati	1207.7	1177.1	-2.53	68.91
2	Karet & barang dari karet	362.7	358.9	-1.05	21.01
3	Ampas/ sisa industri makanan	25.9	23.4	-9.42	1.37
4	Bahan bakar mineral	12.9	15.3	18.79	0.89
5	Berbagai produk kimia	22.6	28.9	27.87	1.69
6	Sari bahan samak dan celup	4.7	13.3	185.58	0.78
7	Kopi, Teh, Rempah-rempah	28.2	24.0	-14.94	1.40
8	Garam, Belerang, Kapur	19.4	19.5	0.82	1.14
9	Minyak atsiri, Kosmetik wangi-wangian	8.7	8.4	-3.51	0.49
10	Bahan-bahan nabati	13.2	21.0	59.41	1.23
	Total 10 Golongan barang	1705.8	1689.8	-0.94	98.93
	Lainnya	42.2	18.3	-56.67	1.07
	Total ekspor	1748.0	1708.1	-2.28	100.00

Dari tabel 3.3.64 diketahui bahwa kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor tahun 2016 adalah golongan Lemak dan Minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1177,1 juta (68,91%), diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 358,9 juta (21,01%) dan golongan berbagai produk kimia sebesar US\$ 28,9 juta (1,69%). Dari sisi perubahan nilai ekspor 2016 terhadap 2015, penurunan nilai yang paling besar terhadap nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2016 berasal dari Golongan Kopi, Teh, Rempah-rempah menurun sebesar 14,94%, kemudian golongan Ampas/Sisa Industri Makanan menurun sebesar 9,42%, Golongan Minyak Atsiri, Kosmetik wangi-wangian menurun sebesar 3,51%, golongan lemak dan minyak hewan/nabati menurun sebesar 2,53% dan golongan Karet dan Barang dari karet menurun sebesar 1,05%.

Berdasarkan negara tujuan ekspor Provinsi Sumatera Barat periode Januari-Desember 2016, ekspor terbesar adalah ke negara India sebesar 653,5 Juta US\$, Amerika Serikat sebesar 342,1 US\$ dan Singapura sebesar 200,6 US\$ dengan persentase peran total ekspor ketiga negara tersebut sebesar 70,04% sebagaimana tergambar pada grafik 3.18.



Grafik 3. 18. Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016



Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja peningkatan nilai ekspor dapat dilihat pada tabel 3.3.65.

Tabel 3.3. 65. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Ekspor

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Peningkatan Nilai Ekspor	-2,28	-16,98	-152	-849	3

Dari tabel 3.3.65 dapat dilihat realisasi indikator kinerja peningkatan nilai ekspor tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 14,7%, walaupun realisasi tersebut masih jauh dari pencapaian target yang ditetapkan. Sama halnya dengan realisasi, capaian indikator kinerja ini tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren peningkatan sebesar 697% .

Realisasi indikator kinerja peningkatan nilai ekspor sebesar -2,28% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebesar 3% menunjukkan realisasi tahun 2016 masih jauh di bawah target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang optimal dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target tersebut.

Capaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor sebesar -152% termasuk kategori keberhasilan kurang. Ketidaktercapaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor disebabkan oleh:

- Daya saing produk masih relatif rendah, yang meliputi mutu produk, kemasan, standar, merek barang olahan.



- b. Kedatangan kapal yang belum sesuai kebutuhan pelaku ekspor;
- c. Diversifikasi produk belum berkembang, masih didominasi barang setengah jadi;
- d. Negara tujuan ekspor sebahagian besar masih terpaut ke negara tujuan tradisional;
- e. Kapasitas produksi terbatas dan tidak kontinyu

Untuk mencapai target indikator kinerja peningkatan nilai ekspor, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan terhadap pelaku IKM (teknis dan permodalan) sehingga produk bisa lebih berkualitas, berproduksi secara kontinyu, memenuhi standar yang ditentukan, merek terdaftar, memiliki label halal, dan kemasan yang lebih baik;
- b. Pengembangan Produk dan Akses Pasar melalui penciptaan brand, identifikasi potensi ekspor, dan pengembangan produk;
- c. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke wilayah pasar tersebut.
- d. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) barang dari negara mitra FTA, guna melindungi produk dalam negeri;
- e. Meningkatkan upaya fasilitasi kepada dunia usaha/UKM eksportir dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor, pengembangan pasar komoditi Sumatera Barat ke luar negeri, dan pelatihan-pelatihan teknik peningkatan daya saing lainnya. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbaru di bidang ekspor.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor adalah sebesar Rp. 998.292.000,- terealisasi Rp. 828.371.874,- atau sebesar 82,98%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,02% atau Rp. 169.920.126,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor adalah Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.



Tujuan 4.2 *Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.*

Tujuan ke dua dari misi ke empat RPJMD tahun 2016-2021 adalah meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 66 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.2

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Skor Pola Pangan Harapan	84,3	83,8
2	Persentase peningkatan produksi pangan	1,86	4,21
3	Nilai tukar petani	97,87	97,75

Dari tabel 3.3.66 diketahui:

- Realisasi skor pola pangan harapan dari tahun 2015-2016 menunjukkan peningkatan sebesar 0,5. Skor pola pangan harapan menunjukkan keanekaragaman pangan. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang.
- Realisasi persentase peningkatan produksi pangan dari tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan sebesar 2,35%. Hal ini menunjukkan peningkatan produksi pangan di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015.
- Realisasi Nilai tukar Petani dari tahun 2015-2016 menunjukkan peningkatan 0,12%. Hal ini menunjukkan kemampuan/daya beli petani semakin kuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan realisasi ke tiga indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 4.2.1.****Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.67.

Tabel 3.3. 67. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2.1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Skor Pola Pangan Harapan	85	84,3	99,18
2	Persentase Peningkatan Produksi Pangan			
a	Padi	3,65	0,07	1,92
b	Jagung	7,87	15,51	197,08
c	Daging	1,22	1,16	95,08
d	Telur	0,69	-1,05	-152,17
e	Ikan	5,78	-3,23	-55,88
f	Kakao	2	1,98	99,00
g	Kopi	2	0,14	7,00
h	Karet	2	0,33	16,50
Rata-Rata Capaian				62,62

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan adalah sebesar 62,62% termasuk kategori keberhasilan cukup. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja skor pola pangan harapan target 85, terealisasi 84,3 dengan tingkat capaian 99,18% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data olahan Badan Ketahanan Pangan terhadap konsumsi 9 (sembilan) kelompok bahan pangan. Skor PPH yang tinggi menunjukkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Perhitungan skor PPH dapat dilihat pada tabel 3.3.68.



Tabel 3.3. 68. Skor PPH Sumatera Barat Tahun 2016 *) Angka sementara Tahun 2016

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) Tahun 2016*	% Aktual	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1168.0	55.70	58.40	0.5	27.85	29.20	25	25.00
2	Umbi-umbian	50.0	2.38	2.50	0.5	1.19	1.25	2.5	1.25
3	Pangan Hewani	190.2	9.07	9.51	2	18.14	19.02	24	19.02
4	Minyak & lemak	265.3	12.65	13.27	0.5	6.33	6.63	5	5.00
5	Buah/ biji berlemak	105.1	5.01	5.26	0.5	2.51	2.63	1	1.00
6	Kacang-kacangan	55.7	2.66	2.79	2	5.31	5.57	10	5.57
7	Gula	90.7	4.33	4.54	0.5	2.16	2.27	2.5	2.27
8	Sayur dan buah	113.0	5.39	5.65	5	26.94	28.25	30	28.25
9	Lain-lain	38.2	1.82	1.91	0	0	0	0	0.00
Total		2097.0	103.83					100	84.3

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel 3.3.69.

Tabel 3.3. 69. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Skor Pola Pangan Harapan	84,3	83,8	99,18	-	87

Dari tabel 3.3.69 dapat dilihat realisasi indikator kinerja skor pola pangan harapan tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,5. Artinya, konsumsi pangan penduduk provinsi Sumatera Barat lebih beragam. Untuk capaian indikator kinerja tahun 2016 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja skor pola pangan harapan tahun 2016 sebesar 84,3 dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 87 atau mengalami peningkatan sebesar 2,7 dari realisasi tahun 2016. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi di tahun 2015-2016 dan sumber daya yang ada maka target tahun 2017 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja skor pola pangan harapan sebesar 99,18% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh:



- a. Adanya sosialisasi, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media informasi.
- b. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal dan lomba cipta menu.
- c. Adanya promosi olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat Provinsi sendiri maupun tingkat nasional.
- d. Kemitraan dengan perguruan tinggi, sosialisasi dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan alternatif ragam pangan.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja skor pola pangan harapan adalah sebesar Rp. 6.603.049.000,- terealisasi Rp. 5.754.010.198,- atau sebesar 87,14%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,86% atau Rp. 849.038.802,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja skor pola pangan harapan adalah Program Diversifikasi Pangan dan Program Ketahanan Pangan.

2. Persentase Peningkatan Produksi Pangan

a. Padi

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi padi target 3,65%, terealisasi 0,07% dengan tingkat capaian 1,92% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Padi} = \frac{2.606.640 \text{ ton} - 2.604.785 \text{ ton}}{2.604.785 \text{ ton}} \times 100\% = 0,07\%$$

Ket : Produksi Padi tahun 2016 = 2.606.640 ton
Produksi Padi tahun 2015 = 2.604.785 ton

Produksi dan peningkatan produksi padi tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.70.

**Tabel 3.3. 70 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014-2016**

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Padi (ton)	2.519.020	2.604.785	2.606.640
Peningkatan Produksi (ton)		85.765	1.855
% Peningkatan		3,40	0,07

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi padi dapat dilihat pada tabel 3.3.71.

Tabel 3.3. 71. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Padi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi padi	0,07	3,4	1,92	85	5,26

Dari tabel 3.3.71 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi padi tahun 2015-2016 menunjukkan trend penurunan sebesar 3,33%. Begitu pula dengan capaian kinerja tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan sebesar 83,08%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi padi tahun 2016 sebesar 0,07% dibandingkan dengan target tahun 2017 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, sebesar 1,89% menunjukkan peningkatan sebesar 1,82%. Sehingga untuk mencapai target di tahun yang akan datang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan usaha yang lebih keras dan optimal.

Capaian indikator kinerja tahun 2016 sebesar 1,92% termasuk kategori keberhasilan kurang. Kegagalan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan oleh terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan petani gagal panen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi padi adalah dengan:

- Melakukan usaha pemasyarakatan padi tanam sabatang melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas;
- Penggunaan Benih bersertifikat padi selama tahun 2016 sebanyak 2.588.510 ton
- Pengembangan padi organik seluas 180 ha yang tersebar pada beberapa kab/Kota,
- Perbaikan irigasi perpipaan/perpompaan sebanyak 8 unit di kab/kota,



- e. Perluasan sawah seluas 599,04 Ha yang tersebar di beberapa kab/kota dan melakukan penumbuhan dan pengembangan Desa Mandiri benih berupa pelatihan penangkar benih.
- f. Penyaluran pupuk bersubsidi;
- g. Melakukan pengembangan kawasan padi.

b. Jagung

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi jagung target 7,87%, terealisasi 15,51% dengan tingkat capaian 197,08% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Jagung} = \frac{714.820 \text{ ton} - 618.883 \text{ ton}}{618.883 \text{ ton}} \times 100\% = 15,51\%$$

Ket : Produksi Jagung tahun 2016 = 714.820 ton
Produksi Jagung tahun 2015 = 618.833 ton

Produksi dan peningkatan produksi jagung tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.72.

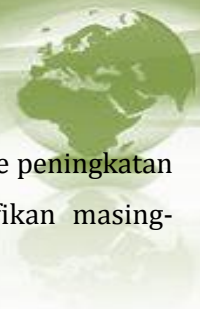
Tabel 3.3. 72 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014-2016

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Jagung (ton)	605.347	618.833	714.820
Peningkatan Produksi (ton)		13.486	95.987
% Peningkatan		2,23	15,51

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi Jagung dapat dilihat pada tabel 3.3.73

Tabel 3.3. 73. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Jagung

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi Jagung	15,51	2,23	197,08	22,3	5,88



Dari tabel 3.3.73 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi jagung tahun 2015-2016 menunjukkan trend peningkatan signifikan masing-masing sebesar 13,28% dan 174,78%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi jagung tahun 2016 sebesar 15,51% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, sebesar 5,88% menunjukkan realisasi tahun 2016 telah di atas target tahun 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali target tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016 dan sumber daya yang tersedia.

Capaian indikator kinerja peningkatan produksi jagung tahun 2016 sebesar 197,08% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mendorong tercapainya keberhasilan ini antara lain melakukan pengembangan kawasan jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas terutama melalui bantuan benih unggul dan GPPTT Jagung sebanyak 41 unit dengan 779 ha yang tersebar di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, melakukan pendampingan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengelolaan irigasi partisipatif, serta pendampingan dan pembinaan SDM Petani dalam teknik penangkaran benih, panen, dan mutu.

c. Daging

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging target 1,22%, terealisasi 1,16% dengan tingkat capaian 95,08% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Daging} = \frac{64.299 \text{ ton} - 63.564 \text{ ton}}{63.564 \text{ ton}} \times 100\% = 1,16\%$$

Ket : Produksi Daging tahun 2016 = 64.299 ton
Produksi Daging tahun 2015 = 63.564 ton

Produksi dan peningkatan produksi daging tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.74.

**Tabel 3.3. 74 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Daging Tahun 2014-2016**

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Daging (ton)	61.637	63.564	64.299
Peningkatan Produksi (ton)		1.927	735
% Peningkatan		3,13	1,16

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi daging dapat dilihat pada tabel 3.3.75.

Tabel 3.3. 75. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Daging

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi Daging	1,16	3,13	95,08	98,12	2,21

Dari tabel 3.3.75 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging tahun 2015-2016 menunjukkan trend penurunan sebesar 1,97%. Artinya peningkatan produksi daging di tahun 2016 lebih rendah dari peningkatan produksi di tahun 2015. Capaian indikator kinerja tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren penurunan.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi daging tahun 2016 sebesar 1,16% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, sebesar 2,21%, berarti untuk dapat mencapai target tahun 2021 diperlukan peningkatan sebesar 1,05%. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang tersedia, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja peningkatan produksi daging tahun 2016 sebesar 95,08% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mendorong tercapainya keberhasilan ini antara lain melakukan penyelamatan sapi betina produktif, mengoptimalkan potensi sapi betina lokal melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan peningkatan aplikasi teknologi inovatif bidang pakan dan reproduksi, menekan angka kematian ternak, peningkatan kualitas pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH), meningkatkan kualitas pelayanan pasar ternak, meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong/kerbau.



d. Telur

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur target 0,69%, terealisasi -1,05% dengan tingkat capaian -152,17% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Telur} = \frac{77.206 \text{ ton} - 78.024 \text{ ton}}{78.024 \text{ ton}} \times 100\% = -1,05\%$$

Ket : Produksi telur tahun 2016 = 77.206 ton
Produksi telur tahun 2015 = 78.024 ton

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi telur dapat dilihat pada tabel 3.3.76.

Tabel 3.3. 76. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Telur

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi telur	-1,05		-152,17		2,04
2	Produksi telur (ton)	77.206	78.024			

Dari tabel 3.3.76 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan indikator ini baru diukur di tahun 2016. Akan tetapi, dari data yang ada dapat diketahui bahwa produksi telur di tahun 2016 menurun -1,05% atau 818 ton dari produksi tahun 2015.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi telur tahun 2016 sebesar -1,05, dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 2,04, dibutuhkan peningkatan sebesar 3,09% dari realisasi tahun 2016. Oleh karena itu dengan memperhatikan realisasi tahun 2016, maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja peningkatan produksi telur tahun 2016 sebesar -152,17 termasuk kategori keberhasilan kurang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan



pencapaian target indikator tersebut adalah berkurangnya jumlah rumah tangga pemelihara ayam ras petelur dari 1.541 RTP pada tahun 2015 menjadi 1.413 RTP pada tahun 2016, terus melonjaknya harga pakan ayam ras petelur, serta tidak sesuainya antara biaya produksi dengan penjualan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja peningkatan produksi telur di tahun yang akan datang adalah dengan memberikan subsidi makanan ayam ras petelur.

e. Ikan

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi ikan target 5,78%, terealisasi -3,23% dengan tingkat capaian -55,88% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Ikan} = \frac{485.936 \text{ ton} - 502.172 \text{ ton}}{502.172 \text{ ton}} \times 100\% = -3,23\%$$

Ket : Produksi ikan tahun 2016 = 485.936 ton
Produksi ikan tahun 2015 = 502.172 ton

Produksi Perikanan di Sumatera Barat tahun 2014-2016, dapat dilihat pada tabel 3.3.77.

Tabel 3.3. 77 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun 2014-2016

Ket	Realisasi Produksi		
	2014	2015	2016
Produksi Perikanan Laut (ton)	214.734,00	204.771,40	207.268,00
Produksi Perairan umum (ton)	10.464,90	10.688,90	10.814,60
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	262.863,21	286.711,58	267.853,39
Total Produksi	488.062,11	502.171,88	485.935,99
Peningkatan Produksi (ton)		14.109,77	-16.235,89
% Peningkatan		2,89	-3,23

Dari tabel 3.3.77 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi Perikanan tahun 2015 meningkat 14.109,77 ton (2,89%) dibanding tahun 2014, dan terjadi penurunan sebesar 16.235,89 ton (3,23%) di tahun 2016.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi ikan dapat dilihat pada tabel 3.3.78.

**Tabel 3.3. 78. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Ikan**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi ikan	-3,23	2,89	-55,88		8,64

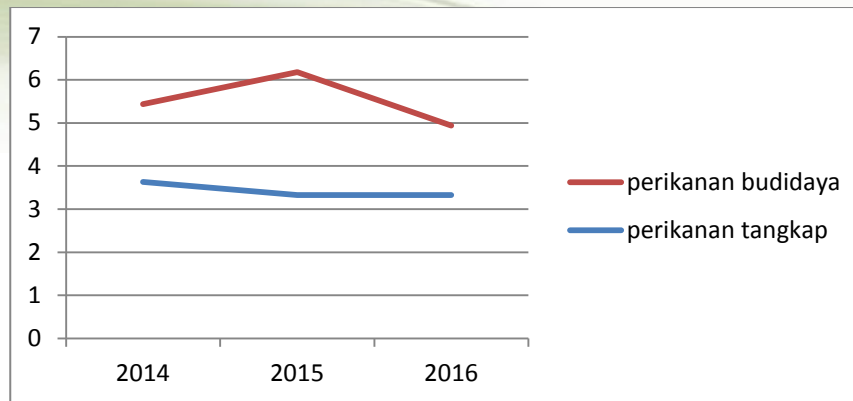
Dari tabel 3.3.78 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi ikan tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 6,12%. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi ikan tahun 2016 sebesar -3,23, dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 8,64%. Berarti, untuk mencapai target tahun 2021 dibutuhkan peningkatan sebesar 11,87%. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali target yang ditetapkan di tahun 2021.

Sebagai salah satu pusat industrialisasi di Indonesia, Sumatera Barat juga turut berkontribusi terhadap produksi Perikanan Nasional. Kontribusi produksi perikanan Sumatera Barat terhadap capaian produksi nasional dapat digambarkan pada tabel 3.3.79 dan grafik 3.79.

Tabel 3.3. 79 Produksi Perikanan Sumatera Barat secara Nasional

	2014	2015	2016
Tangkap			
Nasional (ton)	6.199.900,00	6.520.330,00	6.831.330,00
Sumatera Barat (ton)	225.198,90	215.460,30	218.082,60
kontribusi (%)	3,63	3,30	3,19
Budidaya			
Nasional (ton)	14.520.000	10.070.000	16.675.031
Sumatera Barat (ton)	262.863,20	286.711,58	267.853,39
Kontribusi (%)	1,81	2,85	1,61

**Grafik 3. 19 Kontribusi produksi perikanan Sumatera Barat terhadap Capaian Produksi Nasional**

Capaian indikator kinerja peningkatan produksi ikan tahun 2016 sebesar -55,88% termasuk kategori keberhasilan kurang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian target indikator tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi perikanan budidaya sebesar 18.858 ton yang dikarenakan oleh terjadinya musim kemarau yang menyebabkan terhentinya aktivitas produksi budidaya, terjadinya curah hujan yang cukup tinggi dan disertai angin kencang disalingka Danau Maninjau yang menyebabkan kematian massal pada ikan KJA sejak bulan November 2016 sampai sekarang, kemudian terjadinya penurunan kualitas air Danau Maninjau dimana air danau mengeluarkan bau belerang yang menyengat dan berubah warna menjadi hijau pekat.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja peningkatan produksi ikan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM Nelayan dan pembudidaya ikan agar menghasilkan benih yang berkualitas, memberikan bantuan-bantuan guna meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, mandorong kemandirian pembudidaya ikan untuk mampu memproduksi pakan sendiri dengan harga yang lebih murah sehingga biaya produksi dapat diperkecil serta berbagai program dan kegiatan yang sifatnya mendorong peningkatan produksi perikanan.

f. Kakao

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi kakao target 2%, terealisasi 1,98% dengan tingkat capaian 99% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Kakao} = \frac{85.946 \text{ ton} - 84.279 \text{ ton}}{84.279 \text{ ton}} \times 100\% = 1,98\%$$

Ket : Produksi Kakao tahun 2016 = 85.946 ton
Produksi kakao tahun 2015 = 84.279 ton

Produksi dan peningkatan produksi kakao tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.80

Tabel 3.3. 80 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Kakao Tahun 2014-2016

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Kakao (ton)	83.492	84.279	85.946
Peningkatan Produksi (ton)		787	1.667
% Peningkatan		0,94	1,98

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi kakao dapat dilihat pada tabel 3.3.81

Tabel 3.3. 81. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Kakao

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi Kakao	1,98	0,94	99	23,5	0,95

Dari tabel 3.3.81 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi kakao tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 1,04%. Capaian indikator kinerja ini dari tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren peningkatan sebesar 75,5%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi kakao tahun 2016 sebesar 1,98% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 0,95%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Capaian indikator kinerja produksi kakao sebesar 99% termasuk keberhasilan sangat baik. Keberhasilan ini didukung oleh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain dengan memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan bibit kakao, alat pangkas, alat UPH dan meningkatkan SDM petani melalui pelatihan, sekolah lapangan dan studi banding.

**g. Kopi**

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi kopi target 2%, terealisasi 0,14% dengan tingkat capaian 7% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Kopi} = \frac{34.206 \text{ ton} - 34.158 \text{ ton}}{34.158 \text{ ton}} \times 100\% = 0,14\%$$

Ket : Produksi Kopi tahun 2016 = 34.206 ton
Produksi Kopi tahun 2015 = 34.158 ton

Produksi dan peningkatan produksi Kopi tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.82.

Tabel 3.3. 82 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Kopi Tahun 2014-2016

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Kopi (ton)	32.891	34.158	34.206
Peningkatan Produksi (ton)		1.267	48
% Peningkatan		3,85	0,14

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi Kopi dapat dilihat pada tabel 3.3.83.

Tabel 3.3. 83. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Kopi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Persentase peningkatan produksi Kopi	0,14	3,85	7	385	0,39

Dari tabel 3.3.83 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi kopi tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan sebesar 3,71%. Artinya, peningkatan produksi kopi di tahun 2016 lebih rendah dari peningkatan tahun 2015. Capaian indikator kinerja ini dari tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan sebesar 378%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi kopi tahun 2016 sebesar 0,14% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 0,39%. Berarti, untuk pencapaian target tahun 2021 dibutuhkan peningkatan



tertinggi sebesar 0,25%. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

h. Karet

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase peningkatan produksi karet target 2%, terealisasi 0,33% dengan tingkat capaian 16,50% termasuk kategori keberhasilan kurang.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari dokumen laporan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Produksi Karet} = \frac{153.746 \text{ ton} - 153.245 \text{ ton}}{153.245 \text{ ton}} \times 100\% = 0,33\%$$

Ket : Produksi Karet tahun 2016 = 153.746 ton
Produksi Karet tahun 2015 = 153.245 ton

Produksi dan peningkatan produksi Karet tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.84.

Tabel 3.3. 84 Jumlah Produksi dan Peningkatan Produksi Karet Tahun 2014-2016

Ket	Tahun		
	2014	2015	2016
Produksi Karet (ton)	152.962	153.245	153.746
Peningkatan Produksi (ton)		283	501
% Peningkatan		0,19	0,33

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase peningkatan produksi karet dapat dilihat pada tabel 3.3.85.

Tabel 3.3. 85. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Karet

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase peningkatan produksi Karet	0,33	0,19	16,5	7,6	0,95

Dari tabel 3.3.85 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi karet tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,14%. Artinya, peningkatan produksi kopi di tahun 2016 lebih tinggi 0,14% dari peningkatan tahun 2015. Capaian



indikator kinerja ini dari tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren peningkatan sebesar 8,9%.

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi karet tahun 2016 sebesar 0,33% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 0,95%. Berarti, untuk pencapaian target tahun 2021 dibutuhkan peningkatan tertinggi sebesar 0,66%. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi kopi dan karet tahun 2016 masing-masing sebesar 7% dan 16,50% termasuk kategori keberhasilan kurang. Kegagalan pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan oleh terjadinya cuaca ekstrim yang cukup panjang yang mempengaruhi minat petani untuk melakukan pengolahan lahannya, kurang optimalnya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat. Khusus untuk komoditi karet, harga komoditi karet yang menurun drastis menurunkan minat petani karet untuk menyadap karet.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi pangan adalah sebesar Rp. 127.287.507.189,- terealisasi Rp. 113.039.922.579,- atau sebesar 88,81%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,19% atau Rp. 14.247.584.610,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi pangan adalah Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis, Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Program Pengamanan Sumber Daya Hewani, Program Pemberdayaan Penyuluhan, Program Peningkatan SDM Pertanian, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian.

**Sasaran Strategis 4.2.2.****Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.86.

Tabel 3.3. 86. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2.2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Tukar Petani	106,15	97,87	92,20

Dari tabel 3.3.86 dapat dilihat indikator kinerja Nilai Tukar Petani target 106,15, terealisasi 97,87 dengan tingkat capaian sebesar 92,20% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 03/01/13/Th XX tanggal 3 Januari 2017. Perhitungan realisasi Nilai Tukar Petani adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tukar Petani} = \frac{122,58}{125,24} \times 100\% = 97,87\%$$

Ket : Indeks harga yang ditukar petani = 122,58
Indeks harga yang dibayar petani = 125,24

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Penetapan NTP di Sumatera Barat diukur dari 5 subsektor sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.87.

Tabel 3.3. 87 Nilai Tukar Petani per Sub sektor Tahun 2015-2016

Kelompok dan Sub kelompok	Bulan		% Perubahan
	Desember 2015	Desember 2016	
1 Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	98.30	94.89	-3.41
b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	104.69	103.73	-0.96
c. Indeks Harga yg diterima Petani	119.43	120.38	0.95



Kelompok dan Sub kelompok		Bulan		%
		Desember 2015	Desember 2016	Perubahan
2	d. Indeks harga yg dibayar Petani	121.50	126.86	5.36
	Holtikultura			
	a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	93.66	91.84	-1.82
	b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	102.69	103.99	1.3
	c. Indeks Harga yg diterima Petani	112.89	115.25	2.36
3	d. Indeks harga yg dibayar Petani	120.54	125.49	4.95
	Tanaman Perkebunan Rakyat			
	a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	96.07	91.60	-4.47
	b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	105.78	97.72	-8.06
	c. Indeks Harga yg diterima Petani	117.96	114.80	-3.16
4	d. Indeks harga yg dibayar Petani	122.78	125.33	2.55
	Peternakan			
	a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	101.87	103.64	1.77
	b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	108.62	113.13	4.51
	c. Indeks Harga yg diterima Petani	117.59	122.48	4.89
5	d. Indeks harga yg dibayar Petani	115.44	118.17	2.73
	Perikanan			
	a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	105.73	106.32	0.59
	b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	114.20	117.23	3.03
	c. Indeks Harga yg diterima Petani	123.46	128.19	4.73
6	d. Indeks harga yg dibayar Petani	116.76	120.57	3.81
	Gabungan			
	a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	97.75	97.87	0.12
	b. Nilai Tukar Usaha Pertanian	105.80	109.22	3.42
	c. Indeks Harga yg diterima Petani	117.66	122.58	4.92
	d. Indeks harga yg dibayar Petani	120.36	125.24	4.88

Dibandingkan dengan tahun 2015, pada bulan Desember 2016 NTP 3 (tiga) subsektor mengalami penurunan dengan penurunan tertinggi pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar -4,47%, yang kemudian diikuti oleh subsektor tanaman pangan -3,41% dan subsektor Holtikultura -1,82%. Sementara itu subsektor Peternakan dan Perikanan mengalami kenaikan.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Nilai Tukar Petani dapat dilihat pada tabel 3.3.88.

Tabel 3.3. 88. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Nilai Tukar Petani

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Nilai Tukar Petani	97,87	97,75	92,2	88,86	109,65

Dari tabel 3.3.88 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Tukar Petani tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,12%. Hal ini berarti kemampuan/daya beli



petani semakin meningkat. Capaian indikator kinerja tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren peningkatan sebesar 3,34%.

Realisasi indikator kinerja NTP tahun 2016 sebesar 97,87% dibandingkan target tahun terakhir RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 109,65% atau meningkat sebesar 11,78% maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkaji kembali penetapan target di tahun 2021.

Capaian indikator kinerja Nilai Tukar Petani sebesar 92,20% termasuk keberhasilan sangat baik. Keberhasilan ini merupakan dampak dari berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya OPD lingkup pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pencapaian indikator kinerja Nilai Tukar Petani didukung oleh berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang berada di bidang pertanian.

Tujuan 4.3 *Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya.*

Tujuan ketiga misi ke empat RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini;

Tabel 3.3. 89 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.3

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan		
-	Wisatawan Nusantara	5,3	11,38
-	Wisatawan Mancanegara	7,54	39,49

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 6,08% dan 31,95%. Artinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan di tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya yang diukur berdasarkan indikator kinerja di atas telah dapat dicapai dengan baik.



Untuk mencapai tujuan menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 4.3.1.

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.90.

Tabel 3.3. 90. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
-	Wisatawan Nusantara	5	5,3	106
-	Wisatawan Mancanegara	7,5	7,54	100,53
Rata-rata Capaian				103,27

Dari tabel 3.3.90 dapat dilihat, capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 103,27 termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini memiliki 2 sub indikator kinerja yaitu sub indikator kinerja wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Masing-masing sub indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Wisatawan Nusantara

Dari tabel 3.3.90 dapat dilihat, sub indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara Tahun 2016, target 5%, realisasi 5,30% dengan tingkat capaian 106%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi sub indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara diukur berdasarkan data hasil akumulasi perhitungan kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



$$\text{Persentase peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara} = \frac{7.343.282 - 6.973.678}{6.973.678} \times 100\% = 5.30\%$$

Ket : Jumlah Wisnus tahun 2016 = 7.343.282 orang
Jumlah Wisnus tahun 2015 = 6.973.678 orang
Sumber data dari Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

2. Wisatawan Mancanegara

Dari tabel 3.3.90 dapat dilihat, sub indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan mancanegara Tahun 2016, target 7,5%, realisasi 7,54% dengan tingkat capaian sebesar 100,53%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi sub indikator kinerja persentase peningkatan wisatawan mancanegara diukur berdasarkan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Barat yang dihitung dari jumlah wisman yang datang dari pintu kedatangan Internasional (direct flight/pintu imigrasi) dan pintu kedatangan domestik BIM (hasil survei *exit gate domestic flight*). Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara} = \frac{84.177 - 78.274}{78.274} \times 100\% = 7.54\%$$

Ket : Jumlah Wisman tahun 2016 = 84.177 orang
Jumlah Wisman tahun 2015 = 78.274 orang
Sumber data dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel 3.3.91.

Tabel 3.3. 91. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan					
-	Wisatawan Nusantara	5,3	11,38	106	206,91	30
-	Wisatawan Mancanegara	7,54	39,49	100,53	315,52	44,5

Dari tabel 3.3.90 diketahui bahwa:

- Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan. Artinya,



peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2016 lebih rendah sebesar 6,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara tahun 2016 juga lebih rendah 31,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015.

- b. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara tahun 2015-2016 juga menunjukkan tren penurunan. Untuk sub indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2016, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 100,91%. Demikian juga halnya dengan sub indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara tahun 2016, dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 214,99%.

Realisasi sub indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, tahun 2016 sebesar 5,30%, dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 30%, menunjukkan peningkatan sebesar 24,7%. Dengan mempertimbangkan realisasi di tahun sebelumnya dan dengan mengoptimalkan sumber daya, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Realisasi sub indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2016 sebesar 7,54%, dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 44,5%, menunjukkan peningkatan sebesar 36,96% dibandingkan realisasi tahun 2016. Oleh karena itu, dengan melakukan upaya yang optimal target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2016 sebesar 103,27% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Keberhasilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan berbagai event baik yang berskala nasional maupun internasional.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas destinasi pariwisata Sumatera Barat.
3. Kemenangan Sumatera Barat pada ajang *World's Halal Tourism Awards* tahun 2016 untuk dua kategori yaitu *World's Best Halal Culinary Destination* dan *World's Best halal Destination*, telah meningkatkan citra positif Pariwisata Sumatera Barat baik dimata nasional maupun internasional.
4. Tingginya minat wisatawan mancanegara untuk surfing di pantai Kepulauan Mentawai.



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara adalah sebesar Rp. 12.180.071.350,- terealisasi Rp. 10.314.691.005,- atau sebesar 84,68%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,32% atau Rp. 1.865.380.345,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Tujuan 4.4 *Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.*

Tujuan ke empat misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 92 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.4

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Tingkat Kemiskinan	7,14	6,71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,09	6,89

Dari tabel 3.3.92 diketahui bahwa:

1. Realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2015-2016 menunjukkan peningkatan sebesar 0,43. Artinya di tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang ditandai dengan naiknya tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan sebesar 1,8. Artinya di tahun 2016 jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan.



Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan menurunkan tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan indikator kinerja tingkat kemiskinan belum tercapai dengan baik. Sementara itu, dalam hal menurunkan pengangguran sudah dapat tercapai dengan baik

Untuk pencapaian tujuan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penangannan daerah tertinggal telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 4.4.1. **Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis menurunnya jumlah penduduk miskin ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.93.

Tabel 3.3. 93. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.4.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Kemiskinan	6,43	7,14	88,96

Dari tabel 3.3.93 dapat dilihat indikator kinerja tingkat kemiskinan target 6,43%, terealisasi sebesar 7,14% dengan tingkat capaian 88,96 termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan diukur berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan melalui Berita Resmi Statistik Nomor 04/01/13/Th. XX tanggal 3 Januari 2017. Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang dihitung pada bulan September 2016 adalah 7,14%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat berjumlah 376.510 jiwa yang tersebar pada daerah perkotaan sebanyak 119.510 jiwa dan daerah pedesaan sebanyak 257.000 jiwa. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung penduduk miskin September 2015 adalah sebesar Rp. 403.947 (kapita/bulan).

Tahun 2016, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.3.94.

**Tabel 3.3. 94. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2015-2016**

P1/P2	Kota	Desa	Kota + Desa
P1			
September 2015	1.056	1.392	1.259
September 2016	1.038	1.180	1.122
P2			
September 2015	0.245	0.320	0.290
September 2016	0.249	0.299	0.278

Dari tabel 3.3.94, terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat dari September 2015 ke September 2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1.259 pada tahun 2015 menjadi 1.122 pada tahun 2016. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan turun dari 0.290 menjadi 0.278 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai indeks di daerah perkotaan. Pada periode September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan hanya 1.038 sementara di daerah perdesaan mencapai 1.180. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan hanya 0,249 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,299.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja tingkat kemiskinan dapat dilihat pada tabel 3.3.95

Tabel 3.3. 95. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Tingkat Kemiskinan	7,14	6,71	88,96	103,45	5,09

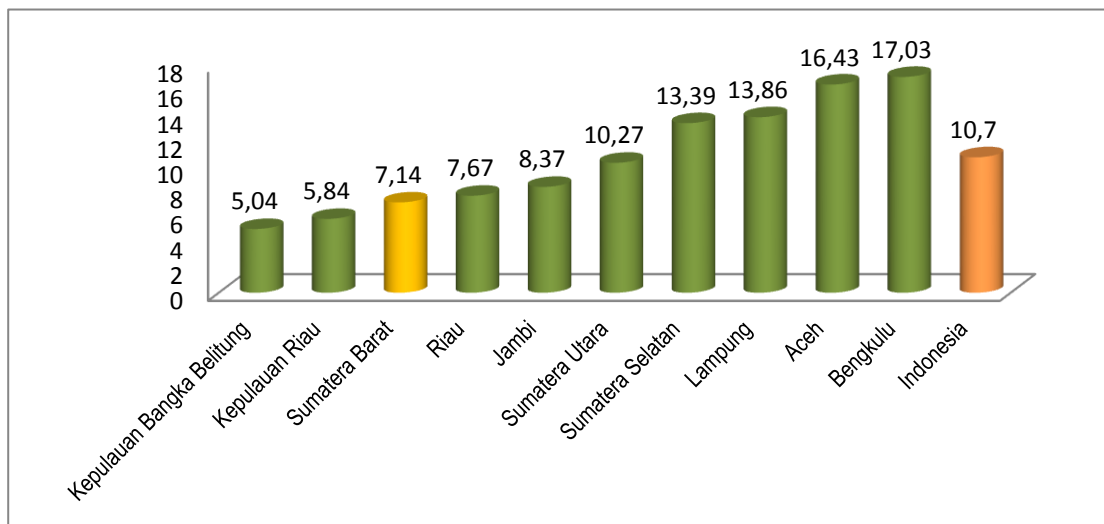
Dari tabel 3.3.95 dapat dilihat realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,43. Artinya, di tahun 2016 pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum berhasil menurunkan angka kemiskinan dari kondisi tahun 2015. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan sebesar 14,49%.



Realisasi indikator kinerja tingkat kemiskinan sebesar 7,14, dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 5,09, menunjukkan penurunan sebesar 2,05. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Lain yang berada di Pulau Sumatera maka Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke tiga setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah sebesar 3,56 dibandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional sebesar 10,7. Perbandingannya dapat dilihat pada grafik 3.20.

Grafik 3. 20 Tingkat Kemiskinan Tahun 2016



Capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan sebesar 88,96% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menekan tingkat kemiskinan antara lain;

1. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengkoordinasikan dan memadukan Program Penanggulangan Kemiskinan antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta.
2. Dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
3. Pelaksanaan program pengentasan daerah tertinggal.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis menurunkan jumlah penduduk miskin adalah sebesar Rp. 25.085.852.470,- terealisasi Rp. 23.851.574.639,- atau sebesar 95,08%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang



menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4,92% atau Rp. 1.234.277.831,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis menurunnya jumlah penduduk miskin ada 13 (tiga belas) program yaitu adalah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin, Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan, Program Pengembangan Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.



Sasaran Strategis 4.4.2.

Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.96

Tabel 3.3. 96. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.4.2.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,5	5,09	121,69

Dari tabel 3.3.96 dapat dilihat, indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka target 6,5, terealisasi 5,09 dengan tingkat capaian 121,69% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka diukur berdasarkan data dari BPS yang dimuat pada BRS No.66/11/13/Th XIX tanggal 7 November 2016. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{125.900 \text{ orang}}{2.473.810 \text{ orang}} \times 100\% = 7.54\%$$

Ket : Jumlah Pengangguran tahun 2016 = 125.900 orang
Jumlah angkatan kerja = 2.473.810 orang

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 3.3.97.

Tabel 3.3. 97. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran terbuka

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,09	6,89	121,69	65,69	5,6

Dari tabel 3.3.97 diketahui realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2015-2015 menunjukkan tren penurunan sebesar 1,8. Hal ini menunjukkan perkembangan positif di pasar tenaga kerja Sumatera Barat yang tergambar dari naiknya jumlah angkatan kerja dan turunnya tingkat pengangguran dibandingkan dengan tahun 2015. Untuk capaian indikator kinerja ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2015-2016 sebesar 56%.

Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 5,09 dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD tahun 2016-2021 sebesar 5,6, menunjukkan realisasi tahun 2016 telah tercapai melebihi target di tahun 2017-2021. Oleh karena itu, penetapan target tahun 2017-2021 akan dikaji kembali dengan mempertimbangkan realisasi dan sumber daya yang tersedia.

Secara Nasional tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 adalah sebesar 5,61. Hal ini berarti, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat sudah lebih kecil sebesar 0,52 dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 121,69% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh:

- Adanya pelatihan kerja dan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja.
- Adanya pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja Indonesia dan Bursa Kerja Khusus



c. Perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar Rp. 8.455.049.500,- terealisasi Rp. 7.251.993.117,- atau sebesar 85,77%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,23% atau Rp. 1.203.056.383,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka ada 5 (lima) program yaitu adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.

MISI 5 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Misi ke lima dari RPJMD tahun 2016-2021 adalah meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan misi ini telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan. Uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 5.1 Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.

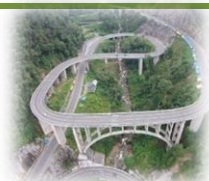
Tujuan pertama dari misi lima RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam rangka pengembangan ekonomi dan wilayah infrastruktur yang harus dibangun antara lain, jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan jaringan listrik. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 3.3. 98. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Persentase Kemantapan jalan provinsi	69,24	91,13
2	Indeks Kinerja infrastruktur irigasi Provinsi	67,31	67,01
3	Rasio elektrifikasi	86,42	83,38

Dari tabel 3.3.98 dapat dilihat realisasi indikator kinerja terkait dengan pencapaian tujuan meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam rangka memenuhi infrastruktur, di tahun 2016 pemerintah provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan, jaringan irigasi dan jaringan listrik. Dibandingkan dengan tahun 2015, infrastruktur yang mengalami peningkatan adalah jaringan irigasi dan jaringan listrik. Untuk infrastruktur jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan, dikarenakan adanya penambahan panjang jalan provinsi di tahun 2016, yang berdampak pada penurunan jalan berkategori mantap dan peningkatan jalan dalam kondisi tidak mantap. Berdasarkan realisasi dari 3 (tiga) indikator yang diuraikan dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah telah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 5.1.1.****Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi**

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan provinsi ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.99.

Tabel 3.3. 99. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	69	69,24	100,35



Dari tabel 3.3.99 dapat dilihat indikator kinerja persentase kemantapan jalan provinsi tahun 2016 target 69%, realisasi 69,24% dengan tingkat capaian 100,35% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan Provinsi tahun 2016 diukur berdasarkan Nilai IRI. Realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan Provinsi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kemantapan Jalan Provinsi} = \frac{1055,99 \text{ km}}{1.525,20} \times 100\% = 69,24 \%$$

Ket = Panjang jalan yang mantap 2016 = 1.055,99 km
Panjang jalan Provinsi = 1.525,20 km

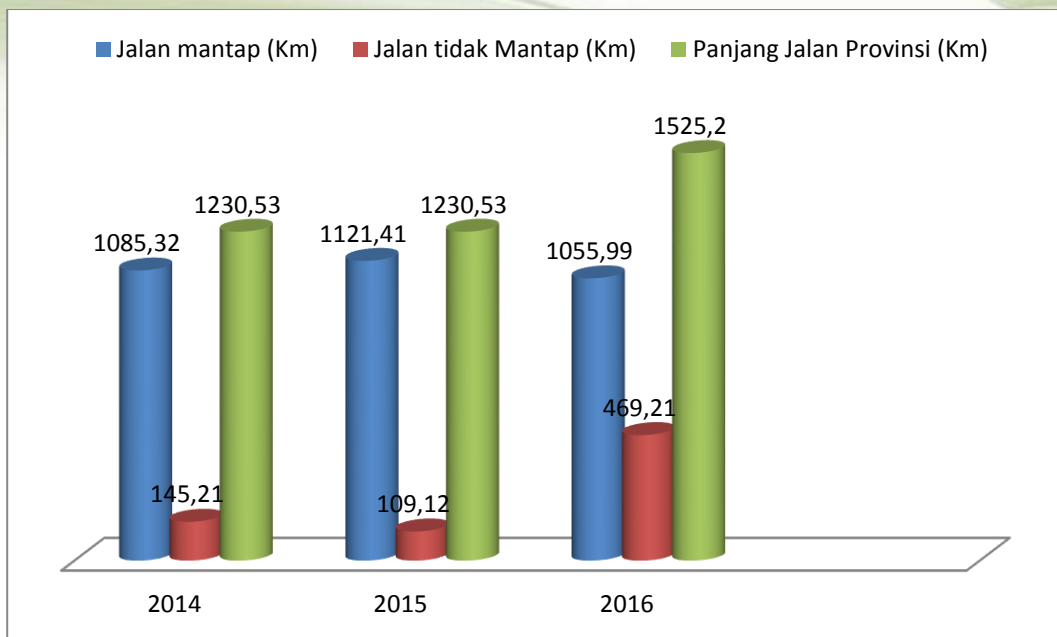
Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase Kemantapan Jalan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.3.100.

Tabel 3.3. 100. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Kemantapan Jalan Provinsi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	69,24	91,13	100,35	101,82	74

Dari tabel 3.3.100 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan provinsi tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 21,89% di tahun 2016. Penurunan realisasi ini disebabkan oleh pertambahan panjang jalan Provinsi sebesar 294,67 km, dari 1.230,53 km menjadi 1.525,20 km. Tingkat capaian indikator kinerja ini juga menunjukkan tren penurunan sebesar 1,47%.

Kondisi kemantapan jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2016 dapat dilihat pada grafik 3.21.

**Grafik 3. 21. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2016**

Dari grafik 3.21 diketahui bahwa di tahun 2016 terjadi penambahan panjang jalan provinsi dan peningkatan jumlah jalan tidak mantap. Panjang jalan provinsi bertambah sebesar 294,67 km menjadi 1525,2 Km. Dari total panjang jalan provinsi tersebut 69,24% berada dalam kondisi mantap dan 30,76% berada dalam kondisi tidak mantap. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah jalan dalam kondisi mantap menurun sebanyak 65,42 Km. Sedangkan untuk jalan dalam kondisi tidak mantap meningkat 360,09 Km.

Realisasi indikator kinerja persentase kemantapan jalan provinsi di tahun 2016 sebesar 69,24% dibandingkan dengan target 2021 sebesar 74% menunjukkan peningkatan sebesar 4,76% optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 100,35% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan capaian indikator kinerja disebabkan oleh upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kualitas melalui rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan Provinsi adalah sebesar Rp. 317.475.315.327,- terealisasi Rp. 294.156.028.080,- atau sebesar 92,65%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,35% atau Rp. 23.319.287.247,-.



Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan Provinsi adalah program pembangunan jalan dan jembatan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dan Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi.



Sasaran Strategis 5.1.2.

Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya keselamatan lalu lintas ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.101

Tabel 3.3. 101. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.2.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	2,71	2,35	113,28

Dari tabel 3.3.101 dapat dilihat indikator kinerja rasio angka kecelakaan lalu lintas target 2,71, terealisasi 2,35 dengan tingkat capaian 113,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja rasio angka kecelakaan lalu lintas dihitung berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas} = \frac{525 \text{ orang}}{2.229.349 \text{ unit}} \times 10.000 = 2,35 \%$$

Ket = Jumlah korban kecelakaan yang meninggal 2016 = 525 orang
Jumlah Kendaraan bermotor = 2.229.349 unit

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja rasio angka kecelakaan lalu lintas dapat dilihat pada tabel 3.3.102.



Tabel 3.3. 102. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Rasio Angka Kecelakaan Lalu Lintas	2,35		113,28		2,67

Dari tabel 3.3.102 dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja rasio angka kecelakaan lalu lintas tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sasaran dan indikator kinerja ini baru digunakan di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja Rasio angka kecelakaan lalu lintas di tahun 2016 sebesar 2,35 dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 2,67 menunjukkan peningkatan sebesar 0,32. Dengan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang tersedia maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja rasio angka kecelakaan lalu lintas sebesar 113,28% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh upaya berikut ini:

- Pelaksanaan sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada sekolah-sekolah, ustad/dai, pengemudi angkutan penumpang umum, pengusaha angkutan orang dan barang;
- Pemeriksaan kendaraan bermotor secara gabungan dengan instansi terkait;
- Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu jalan, guardrail, marka jalan, deliniator, cermin tikungan, *traffic light*, RPPJ dan *warning light*.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya keselamatan lalu lintas adalah sebesar Rp. 14.945.759.775,- terealisasi Rp. 13.075.970.807,- atau sebesar 87,49%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 12,51% atau Rp. 1.869.788.968,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya keselamatan lalu lintas adalah Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.



Sasaran Strategis 5.1.3.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber daya air

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.103.

Tabel 3.3. 103. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.3.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks kinerja infrastruktur irigasi	67,3	67,31	100,01

Dari tabel 3.3.103 dapat dilihat, indikator kinerja indeks kinerja infrastruktur irigasi tahun 2016 target 67,30%, terealisasi sebesar 67,31% dengan tingkat capaian 100,01% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan perhitungan kinerja mengacu pada Lampiran Permen PUPR No. 12 Tahun 2015. Rincian perhitungan realisasi indikator kinerja peningkatan rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi adalah sebagai berikut:

1	Indeks kinerja eksisting		30,150 %
2	Peningkatan indeks kinerja tahun 2016 terdiri atas		0,289%
-	Bendung 14 unit	0,076%	
-	Bangunan saluran	0,062%	
-	Saluran Pembawa	0,146%	
-	Saluran Pembuang	0,005%	
-	Asumsi Penyusutan kinerja per tahun		(0,150%)
3	Total Peningkatan Indeks Kinerja		0.139 %
Total Indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan Provinsi Tahun 2016			30,289 %
Indeks Kinerja Infrastruktur Maksimum			45,000 %
Persentase Nilai Indeks kinerja terhadap maksimum			67,31 %

$$\text{Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi} = \frac{30,289 \%}{45 \%} \times 100\% = 67,31 \%$$

Ket = Persentase Nilai Indeks Infrastruktur irigasi tahun 2016 = 30,289 %
 Persentase Nilai Indeks Kinerja Infrastruktur maksimum = 45 %

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi dapat dilihat pada tabel 3.3.104.



Tabel 3.3. 104. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur Irigasi

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	67,31	67,01	100,01		68,8

Dari tabel 3.3.104 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,30%. Untuk capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dikarenakan indikator kinerja ini baru digunakan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi di tahun 2016 sebesar 67,31% dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 68,8%, menunjukkan peningkatan sebesar 1,49%. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016 dan sumber daya yang tersedia, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi sebesar 100,01% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Hal ini didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi pada 30 (tiga puluh) Daerah Irigasi Provinsi Sumatera Barat dan terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Adapun 30 (tiga puluh) daerah irigasi yang direhabilitasi sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.105.

Tabel 3.3. 105. Daerah Irigasi yang direhabilitasi tahun 2016

No	Nama Daerah Irigasi	No	Nama Daerah Irigasi
1	DI Bt. Partupangan Kab Pasaman Barat	16	DI. Batang Lampasi Kab 50 kota- Kota Payakumbuh
2	DI Rimbo Tampuruang Kab. Pasaman Barat	17	DI Batang Selo
3	DI. Kapar Ampu Kab. Pasaman barat	18	DI Bandar Sei Aro
4	DI. Bdr Bangko Kab Solok Selatan	19	DI Bdr Batang Dareh
5	DI. Koto Salapan Kab. Pessel	20	DI Banda Sawah Gadang
6	DI Lb. Sariak Kab Pessel	21	DI Paneh Gadang
7	DI Bt. Bayang Kab Pessel	22	DI Koto Kandis
8	DI. Amping Parak Kab Pessel	23	DI Sei Samek
9	DI Malepang Kab Pessel	24	DI Batang Gumarang
10	DI Gunung Nago Kota Padang	25	DI Ladang Laweh
11	DI Btg Lembang Kab. Solok- Kota Solok	26	DI Bdr Kubu Banda
12	DI Btg Tabik Kab 50 kota- Kota Payakumbuh	27	DI Batang Agam
13	DI Bdr Hali, Kab Solok- Kota Solok	28	DI Batang sianok
14	DI Banda Bintungan Nagari Talang	29	DI Gadang Sini Air
15	DI Bandar Ipuh	30	DI Batang Tingkarang



Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air adalah sebesar Rp. 171.987.936.900,- terealisasi Rp. 165.278.434.520,- atau sebesar 96,10%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,90% atau Rp. 6.709.502.380,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya air adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, Program Pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.



Sasaran Strategis 5.1.4.

Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.106.

Tabel 3.3. 106. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1.4.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rasio Elektrifikasi	85	86,42	101,67

Dari tabel 3.3.106 dapat dilihat, indikator kinerja rasio elektrifikasi target 85%, realisasi 86,42% dengan tingkat capaian 101,67%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Perhitungan realisasi indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio elektrifikasi} = \frac{1.080.660 \text{ RT}}{1.250.476 \text{ RT}} \times 100\% = 86,42\%$$

Ket = RT yang terlistriki tahun 2016 = 1.080.660 RT (1.065.372 RT Pelanggan PLN dan 15.288 RT Pelanggan Non PLN)
Jumlah RT tahun 2016 di Sumatera Barat = 1.250.476 RT



Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja rasio elektrifikasi dapat dilihat pada tabel 3.3.107

Tabel 3.3. 107. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

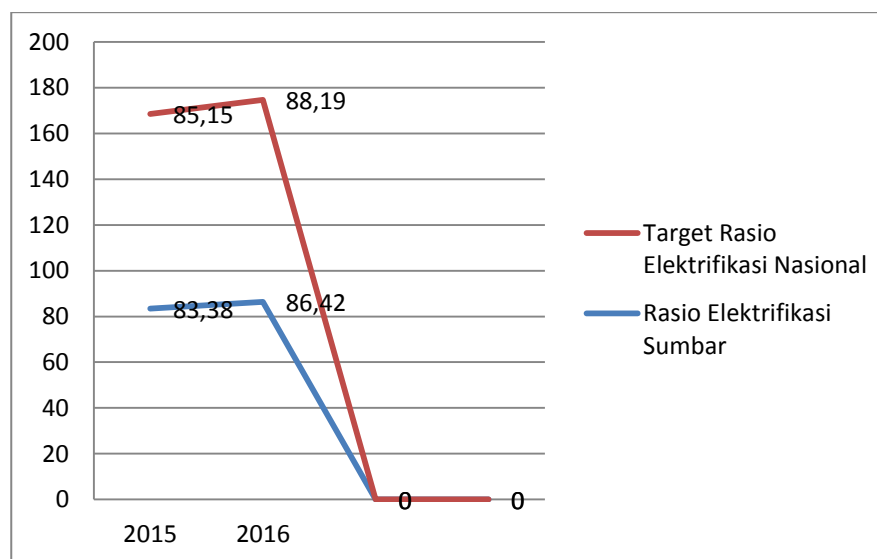
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Rasio Elektrifikasi	86,42	83,38	101,67	99,26	97

Dari tabel 3.3.107 terlihat realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan. Untuk realisasi di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,04% dari realisasi di tahun 2015. Persentase capaian indikator kinerja ini juga menunjukkan tren peningkatan seiring dengan peningkatan realisasinya. Dibandingkan dengan capaian di tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 2,41%.

Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2016 sebesar 86,42 dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 97, menunjukkan peningkatan sebesar 10,58. Dengan mempertimbangan realisasi di tahun 2016 maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dibanding dengan target nasional, rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015-2016 masih berada di bawah target rasio elektrifikasi nasional, sebagaimana tergambar pada grafik 3.22.

Grafik 3. 22. Perbandingan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional





Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebesar 101,67% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh:

- a. pemasangan jaringan listrik desa yang langsung dipasang ke rumah-rumah oleh masyarakat setempat
- b. adanya program bantuan pemasangan listrik gratis dari pemerintah pusat untuk rumah tangga sederhana
- c. adanya pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan oleh kementerian SDM melalui Ditjen Energi Baru terbarukan dengan Pembangunan 8 unit PLTS Terpusat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman masing-masing 1 unit.

Dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi untuk tahun 2017 direncanakan akan membangun pembangkit energi baru terbarukan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan PLTS terpusat sebanyak 2 (dua) unit di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. Pembangunan PLTS tersebar (SHS) sebanyak 40 (empat puluh) unit di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Pembangunan PLTMH sebanyak 1 (satu) unit di Kabupaten Solok.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah sebesar Rp. 2.526.657.660,- terealisasi Rp. 2.063.502.412,- atau sebesar 81,67%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 18,33% atau Rp. 463.155.248,-.

Program yang dilaksanakan untuk menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan, Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi.



Tujuan 5.2 *Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.*

Tujuan ke dua dari misi lima RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan tata ruang yang baik akan berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penataan ruang adalah lingkungan hidup. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3. 108. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,18	70,56

Dari tabel 3.3.108 dapat dilihat Indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2015-2016. mengalami penurunan sebesar 0.38. Walaupun mengalami penurunan, tetapi masih dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuensi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,18 sudah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 5.2.1.

Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.109.

**Tabel 3.3. 109. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.1.**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,88	70,18	99,01

Dari tabel 3.3.109 dapat dilihat indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup target 70,88, terealisasi 70,18 dengan tingkat capaian 99,01% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kualitas Lingkungan Hidup} = (0,3 \times 65,4) + (0,3 \times 82,9) + (0,4 \times 64,23) = 70,18\%$$

Ket = IKA (Indeks Kualitas Air) tahun 2016= 65,4
IKU (Indeks Kualitas Udara) tahun 2016= 82,9
ITH (Indeks Tutupan Lahan) tahun 2016= 64,23

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja IKLH dapat dilihat pada tabel 3.3.110

Tabel 3.3. 110. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja IKLH

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,18	70,56	99,01		71,66

Dari tabel 3.3.110 dapat dilihat realisasi Indikator kinerja IKLH dari tahun 2015-2016 menunjukkan penurunan sebesar 0,38. Sementara itu, untuk capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru digunakan sebagai indikator kinerja utama pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2016 sebesar 70,18 dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 71,66 atau meningkat sebesar 1,48 dari realisasi tahun 2016, maka untuk mencapai target di tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang optimal dalam hal peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebesar 99,01% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis di dukung oleh:

1. Pengawasan dan pengendalian pencemaran untuk mempertahankan mutu kualitas air sungai
2. Kualitas udara Provinsi Sumatera Barat yang masih unggul dikarenakan daya serap lingkungan yang masih bagus dan baiknya penyerapan ruang terbuka hijau dan hutan terhadap sumber pencemaran;
3. Tutupan hutan Provinsi Sumatera Barat yang masih unggul dikarenakan geografi wilayah Provinsi Sumatera Barat yang agak ekstrim (bukit dan lembah) yang kurang cocok dijadikan kawasan pembangunan, adanya kawasan yang dijadikan sebagai cagar alam maupun hutan lindung, kebijakan pemerintah untuk memorandum pemanfaatan kawasan hutan tertentu untuk pemanfaatan/usaha non kehutanan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas air dan kualitas udara secara rutin dan upaya pengendalian sumber pencemar melalui program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
2. Menciptakan program-program yang dapat mengurangi pencemaran udara seperti memberlakukan *care free day*, penggunaan moda angkutan umum yang lebih terarah, dan penanaman pohon-pohon yang lebih banyak; pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar dan pengendalian pencemaran udara melalui surat *follow up* kepada masing-masing kabupaten/kota;
3. Mempertahankan tutupan hutan Sumatera Barat melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan secara ketat, penegakkan hukum terhadap perambah liar, pengendalian perizinan pada usaha/kegiatan yang memanfaatkan kawasan hutan, pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran hutan.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah sebesar Rp. 219.312.609.211,- terealisasi Rp. 203.259.817.660,- atau sebesar 92,68%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,32% atau Rp. 16.052.791.551,-.



Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah, Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Penataan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional



Sasaran Strategis 5.2.2.

Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.111.

Tabel 3.3. 111. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2.2.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase penurunan lahan kritis	0,18	0,18	100
2	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100	100	100
3	Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	5	82,88	1657,6
Rata-Rata Capaian				619,2

Dari tabel 3.3.111 dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan adalah sebesar 619,2% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Masing-masing indikator akan diuraikan sebagai berikut:



1. Persentase Penurunan Lahan Kritis

Dari tabel 3.3.111 dapat dilihat indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis target 0,18%, terealisasi 0,18% dengan capaian kinerja 100%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Perhitungan realisasi persentase penurunan lahan kritis adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase penurunan lahan kritis} = \frac{1134,34}{630.695} \times 100\% = 0.18\%$$

Ket = luas lahan yang ditumbuhi tanaman hutan hasil evaluasi penanaman tahun 2011 di tahun 2016 = 1.134,34 ha
Luas lahan kritis di Sumatera Barat = 630.695 ha

Hasil evaluasi penanaman tahun 2011 di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.3.112

Tabel 3.3. 112. Hasil Evaluasi Penanaman Tahun 2011 di tahun 2016

No.	Kab/ Kota	Luas Penanaman di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan pada Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang Tumbuh di Tahun 2011 (Ha)	Luas Tanaman yang tumbuh Hasil evaluasi Penanaman Tahun 2011 di Tahun 2016 (Ha)
1.	Kabupaten Tanah Datar	750	450	270
2.	Kabupaten Agam	450	270	216.27
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	150	90	59.022
4.	Kabupaten Solok Selatan	150	90	68.571
5.	Kabupaten Solok	200	120	113.28
6.	Kabupaten Pasaman Barat	200	120	84
7.	Kota Sawah Lunto	75	45	31.5
8.	Kabupaten Sijunjung	246	147.6	180.564
9.	Kabupaten Pasaman	170	102	73.5624
10.	Kota Solok	75	45	37.575
JUMLAH		2466	1479.6	1134.34

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis dapat dilihat pada tabel 3.3.113.

Tabel 3.3. 113. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Lahan Kritis

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase penurunan lahan kritis	0,18	2,58	100	96,27	1,71

Dari tabel 3.3.113 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis tahun 2015-2016 menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi di tahun 2016 menurun sebesar 2,4%. Penurunan realisasi indikator kinerja ini dikarenakan



adanya perbedaan cara perhitungan pencapaian target dan realisasi antara tahun 2015 dan tahun 2016. Akan tetapi untuk capaian dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 3,73%. Jumlah lahan kritis di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 630.695 ha dibandingkan dengan perhitungan jumlah lahan kritis di tahun 2010 (372.386 ha). Kenaikan jumlah lahan kritis ini dikarenakan oleh perbedaan kriteria yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghitung jumlah lahan kritis.

Realisasi indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis sebesar 0,18 dibandingkan dengan target 2021 sebesar 1,71% atau meningkat sebesar 1,53% dari realisasi di tahun 2016. Dengan mempertimbangan capaian di tahun 2016 dan mengoptimalkan sumber daya yang ada maka target di tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis 100% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh penanaman bibit/benih tanaman hutan sebanyak 200 batang, penanaman rotan dan pembangunan bank buah 50 ha, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanaman hutan.

2. Persentase jumlah kasus *illegal logging* yang tertangani

Dari tabel 3.3.111 dapat dilihat indikator kinerja persentase jumlah kasus *illegal logging* yang tertangani target 100%, terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Data realisasi indikator kinerja persentase jumlah kasus *illegal logging* yang tertangani berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut:

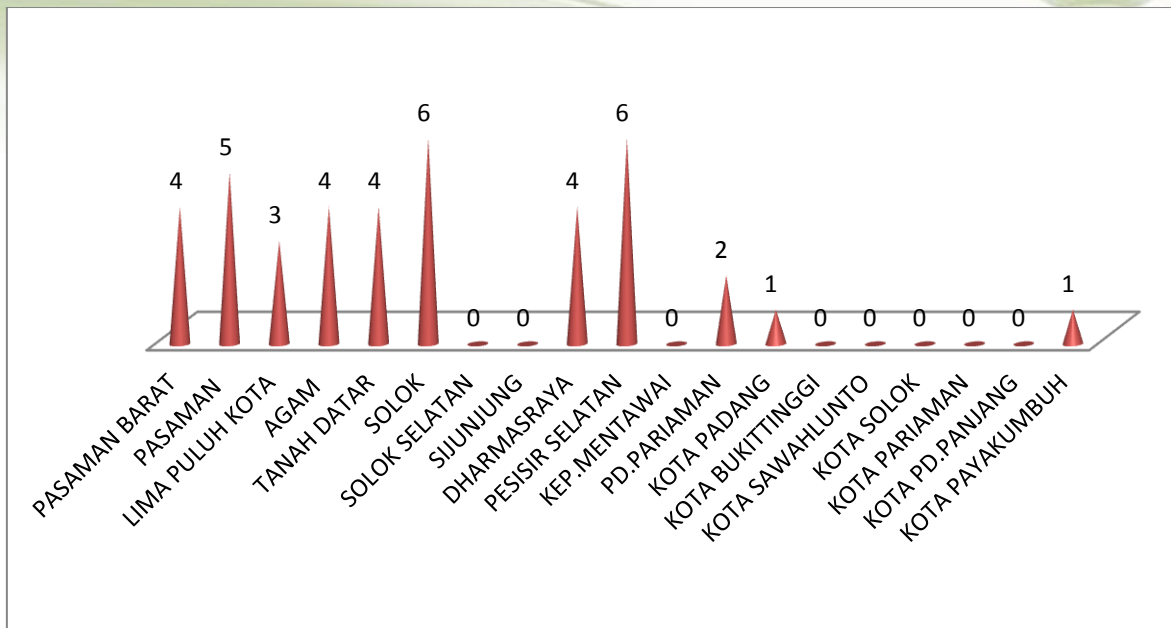
$$\text{Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani} = \frac{40 \text{ kasus}}{40 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$$

Ket = Jumlah kasus illegal logging yang tertangani di tahun 2016 = 40 kasus
Jumlah kasus illegal logging yang dilaporkan di tahun 2016 = 40 kasus

Kasus *Illegal logging* yang terjadi Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.23.



Grafik 3. 23. Sebaran Kasus Illegal Logging berdasarkan Kabupaten/Kota



Dari grafik 3.23 dapat diketahui bahwa dari 40 (empat puluh) kasus *illegal logging* yang terjadi di tahun 2016 berasal dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Kasus *illegal logging* paling banyak terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis dapat dilihat pada tabel 3.3.114

Tabel 3.3. 114. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target 2017 dan 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan Lahan Kritis

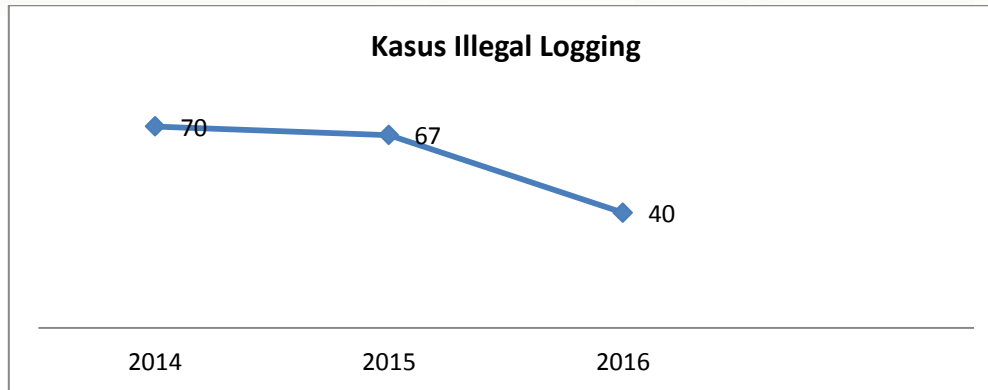
NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase Jumlah kasus Illegal logging yang ditangani	100		100		100
2	Persentase penurunan kasus illegal logging		4,29		107,25	

Dari tabel 3.3.114 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase jumlah kasus *illegal logging* yang ditangani tahun 2015-2016. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan indikator ini baru digunakan pada tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari indikator kinerja sebelumnya. Jumlah kasus *illegal logging* yang terjadi di tahun 2016 sebanyak 40 kasus mengalami penurunan sebesar 40,3% dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di tahun 2015. Perbandingan jumlah



kasus illegal logging yang terjadi selama tiga tahun terakhir digambarkan pada grafik 3.24 di bawah ini:

Grafik 3. 24 Penurunan Kasus Illegal Logging tahun 2014-2016



Realisasi indikator kinerja persentase penurunan illegal logging tahun 2016 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 100%. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2016 dan sumber daya yang dimiliki maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase jumlah kasus illegal logging yang ditangani sebesar 100% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pelaksanaan Patroli simpatik pengamanan hutan, Penyusunan Perda Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Penyidikan dan pengamanan hutan dan Pembentukan 159 kelompok kerangka PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari) yang tersebar di 159 nagari yang terdiri dari 620 personil satgas.

3. Persentase penurunan jumlah titik panas

Dari tabel 3.3.111 dapat dilihat indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas target 5%, terealisasi 82,88% dengan capaian kinerja 1.657,6%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Data realisasi indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut:

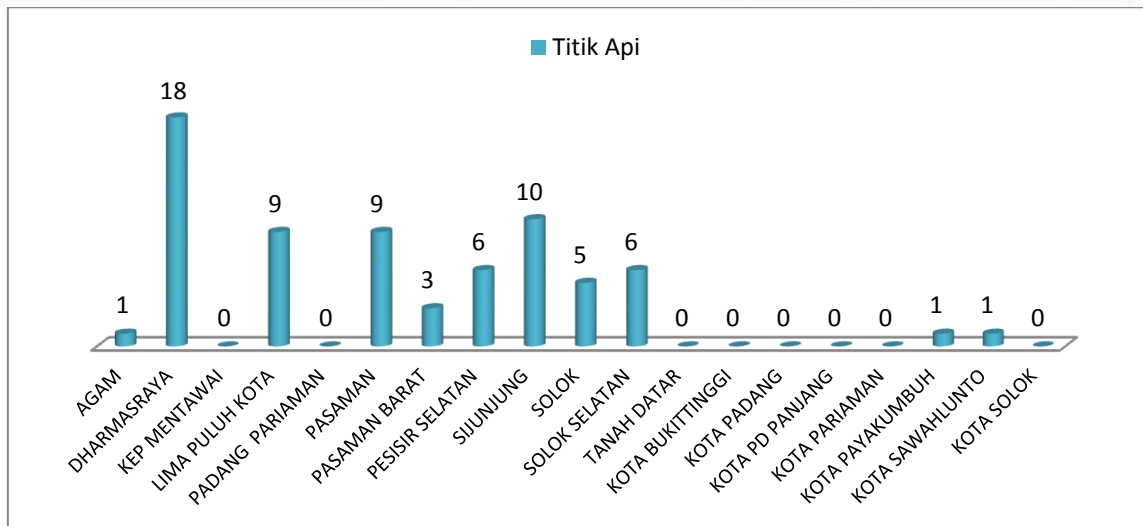
$$\text{Persentase penurunan jumlah titik panas} = \frac{69 - 403}{403} \times 100\% = 82,88\%$$

Ket = Jumlah titik panas di akhir tahun 2016= 69 titik panas
Rerata titik panas pada periode (2011-2015)= 403 titik panas



Jumlah titik panas di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 berdasarkan pantauan Satelit NOAA tergambar pada grafik 3.25.

Grafik 3. 25. Jumlah titik panas berdasarkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat



Dari grafik 3.25 diketahui bahwa dari 19 (sembilan) kabupaten/kota di Sumatera Barat, jumlah titik api tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya (18 titik api), Kabupaten Sijunjung (10 titik api) dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman masing (9 titik api). Lokasi titik api yang terjadi umumnya berada pada lahan di luar kawasan hutan dan ada beberapa yang berada dalam kawasan hutan. Titik api yang berada pada lahan di luar kawasan hutan terjadi sebagai akibat masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan.

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas dapat dilihat pada tabel 3.3.115.

Tabel 3.3. 115. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target 2017 dan 2021 Indikator Kinerja Persentase Penurunan jumlah titik panas

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	
1	Persentase penurunan jumlah titik panas	82,88	-	1657,6	-	30

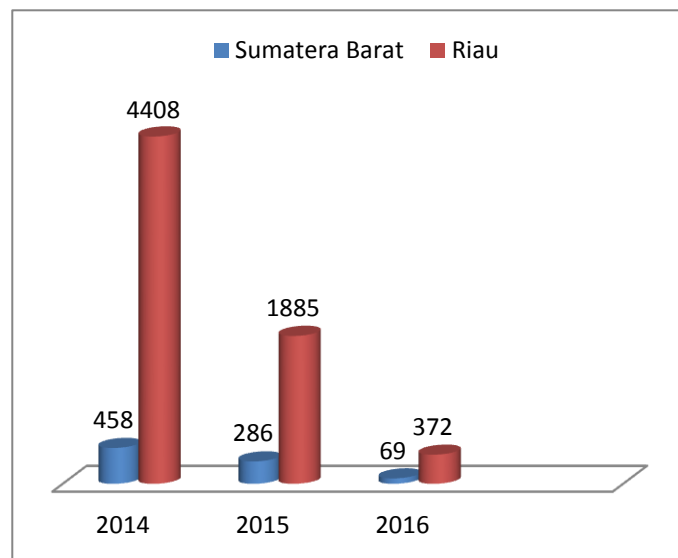
Dari tabel 3.3.115 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase penurunan jumlah titik panas di tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru digunakan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2016.



Realisasi indikator persentase penurunan jumlah titik panas tahun 2016 sebesar 82,88% dibandingkan dengan target tahun 2021 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebesar 30% menunjukkan realisasi 2016 sudah melebihi target 2016. Berdasarkan hal tersebut target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Berdasarkan hasil pantauan dari satelit NOAA dalam 3 tahun terakhir jumlah titik panas di Provinsi Sumatera Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan titik panas di Provinsi Riau. Hal ini digambarkan pada grafik 3.26.

Grafik 3. 26. Jumlah titik Panas Tahun 2014-2016



Capaian indikator kinerja penurunan jumlah titik panas sebesar 1657,6% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh pengawasan dan pencegahan dini yang optimal oleh Satgas Damkarhutla (Satuan tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan), pemantauan melalui satelit NOAA dalam mendeteksi api yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu iklim dan curah hujan serta tidak terjadinya kebakaran hutan/lahan dalam skala besar juga sangat mempengaruhi penurunan jumlah titik panas.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis terpeliharanya ekosistem dan kualitas lahan adalah sebesar Rp. 2.459.905.500,- terealisasi Rp. 1.991.147.450,- atau sebesar 80,94%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 19,06% atau Rp. 468.758.050,-.



Program yang dilaksanakan adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, Program Pengendalian kebakaran hutan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis terpeliharanya ekosistem dan kualitas lahan.

Tujuan 5.3 *Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.*

Tujuan ke tiga dari misi lima adalah meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana. Dengan meningkatnya budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana maka akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana. Pencapaian tujuan meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana dapat diukur dengan indikator berikut ini:

Tabel 3.3. 116. Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.3

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2016	2015
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	70

Dari tabel 3.3.116 dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dari tahun 2015-2016 menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana jika diukur dari persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan telah

bencana telah dapat dicapai dengan baik.

Untuk pencapaian tujuan meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu penanganan tanggap darurat dan pemulihab wilayah/daerah pasca bencana. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 5.3.1.**

Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama. Realisasi dan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.117

Tabel 3.3. 117. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.3.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	71	100

Dari tabel 3.3.117 dapat dilihat, indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana target 71%, terealisasi 71% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Data realisasi indikator kinerja ini diperoleh dari rekapitulasi data bencana Kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2016 yang dihimpun oleh Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat. Perhitungan realisasi persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{479 \text{ kejadian}}{674 \text{ kejadian}} \times 100\% = 71\%$$

Ket = Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani tahun 2016 = 479 kejadian
Jumlah kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat = 674 kejadian

Rincian kejadian bencana dapat dilihat pada tabel 3.3.118.

Tabel 3.3. 118 Jumlah Peristiwa per Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Jenis Bencana	Jumlah
Abrasi	1
Abrasi Pantai	2
Angin Kencang	112
Banjir	62
Banjir Bandang	8



Jenis Bencana	Jumlah
Banjir Rob	1
Gempa Bumi	1
Hanyut/Tenggelam	13
Kebakaran	221
Kebakaran Lahan	164
Ledakan Tambang	1
Longsor	78
Orang Hilang	6
Tersambar Petir	4
Total	674

Sumber : Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan realisasi dan capaian Kinerja tahun 2015-2016 serta target tahun 2021 sasaran strategis meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana dapat dilihat pada tabel 3.3.119

Tabel 3.3. 119. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 serta Target Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2016	2015	2016	2015	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	70	100	87,5	75

Dari tabel 3.3.119 dapat dilihat realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dari tahun 2015-2016 menunjukkan trend peningkatan sebesar 1% dan 12,5%. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah kejadian yang terjadi dan yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana mengalami penurunan di tahun 2016. Untuk jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2016 menurun sebanyak 12 kejadian bencana dibandingkan jumlah kejadian bencana yang terjadi di tahun 2015.

Realisasi indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2016 sebesar 71% dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 75% sesuai dengan sumber daya yang tersedia optimis dapat dicapai.

Capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Akan tetapi, tidak semua bencana yang terjadi bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan beberapa jenis bencana seperti kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung serta frekuensi terjadinya bencana terjadi pada bulan September hingga Februari 2017.
2. Kurangnya kesiapan tim yang turun ke lokasi bencana yang salah satunya disebabkan oleh kejadian bencana yang berturut-turut di daerah Kabupaten/Kota.
3. Informasi dan Sosialisasi Daerah rawan bencana belum tepat sasaran karena peserta yang hadir pada kegiatan informasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana bukan dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
4. Belum tersedianya tenaga pendamping kegiatan untuk masing-masing lokasi desa/kelurahan di tingkat kabupaten.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas relawan (TRC) dalam hal tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan.
2. Peningkatan instrumen penanggulangan bencana seperti: fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando.
3. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik.
4. Penyediaan data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat serta data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha.
5. Penyediaan tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando.
6. Peningkatan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.
7. Peningkatan pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang), sumber daya khusus tanggap darurat, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat *relief*).
8. Peningkatan perspektif gender dan kelompok rentan dalam hal pemenuhan hak-hak dan kebutuhan, pelayanan medis darurat, serta pelibatan sektor swasta.

Pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan dalam APBD/APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana adalah sebesar Rp. 30.653.173.941,- terealisasi Rp. 25.873.913.395,- atau sebesar



84,41%. Artinya, dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15,59% atau Rp. 4.779.260.546,-.

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Mitigasi Bencana, Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebencanaan, Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam, Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.118.212.282.270,-. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebagaimana tercantum pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4 1. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	7.671.484.850	6.766.881.857	88,21
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	6.173.692.213	5.857.402.813	94,88
3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	787.433.613	757.281.962	96,17
4	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	8.683.775.310	8.067.653.494	92,90
5	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	12.024.820.834	11.179.454.871	92,97
6	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	6.201.553.115	5.998.599.995	96,73
7	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	117.540.577.252	105.098.037.396	89,41
8	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	10.116.147.000	8.620.587.690	85,22
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	53.907.935.610	52.253.393.022	96,93



NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
10	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	28.951.811.408	23.876.428.273	82,47
11	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	45.502.410.060	23.102.134.695	50,77
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	541.693.550.836	481.812.121.655,43	88,95
13	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	16.350.854.243	15.592.066.537	95,36
14	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.718.675.450	3.572.587.319	96,07
15	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	32.990.317.535	29.802.825.438	90,34
16	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	133.890.556.189	118.793.932.777	88,72
17	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan			
18	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	12.180.071.350	10.314.691.005	84,68
19	Menurunnya jumlah penduduk miskin	25.085.852.470	23.851.574.639	95,08
20	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	8.455.049.500	7.251.993.117	85,77
21	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	317.475.315.327	294.156.028.080	92,65
22	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	14.945.759.775	13.075.970.807	87,49
23	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	171.987.936.900	165.278.434.520	96,10
24	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	2.526.657.660	2.063.502.412	81,67
25	Meningkatnya kualitas lingkungan	219.312.609.211	203.259.817.660	92,68
26	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	2.459.905.500	1.991.147.450	80,94
27	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	30.653.173.941	25.873.913.395	84,41
TOTAL		1.831.287.927.152	1.648.268.462.879,43	90,01

Sumber data: DPKD Provinsi Sumatera Barat (data diolah)

Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat bahwa:

1. Untuk menunjang pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.831.287.927.152,- atau 86,45% dari total anggaran belanja langsung tahun 2016.
2. Sementara itu, sebesar 13,35% atau Rp 286.924.355.118,- dialokasikan untuk belanja langsung Pokok.



3. Anggaran untuk menunjang pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar Rp. 1.831.287.927.152,-, direalisasi sebesar Rp. 1.648.268.462.879,43 atau 90,01%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 183.019.464.272,57 atau 9,99%
4. Sisa anggaran sebesar Rp. 183.019.464.272,57,- mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber dana lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016;
- b. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian target 27 (dua puluh tujuh) Sasaran strategis dengan 46 (empat puluh enam) Indikator Kinerja Utama.
- c. Rata-rata capaian 46 (empat puluh enam) Indikator Kinerja Utama sebesar 135,05%. Artinya secara umum capaian indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 termasuk kategori keberhasilan sangat baik.
- d. Kategori penilaian keberhasilan 46 (empat puluh enam) Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
 1. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Sangat Baik** (85% - 100% atau > 100%) sebanyak **40** indikator kinerja utama;
 2. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Cukup** (56% - 74%) sebanyak **3** indikator kinerja utama;
 3. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori **Kurang** (< 55%) sebanyak **3** indikator kinerja utama;
- e. Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian 27 (dua puluh tujuh) sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 1.831.287.927.152,- atau 86,45% dari total anggaran belanja langsung tahun 2016.



4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya didorong oleh penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP merupakan sistem yang dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pejabat pimpinan tinggi sampai ke seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas yang langsung dikoordinasikan oleh Gubernur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.
2. Meningkatkan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dokumen akuntabilitas kinerja SKPD Provinsi Sumatera Barat yang dimulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dengan mengimplementasikan pola pikir yang berorientasi hasil.
3. Menyelaraskan penerapan Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkesimbangan.
4. Meningkatkan pengelolaan data kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 1					
MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT					
Tujuan 1.1					
Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenteram, harmonis,					
1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1.1.1.1 Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan Sedekah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat	2,22	11,31	509,46
		1.1.1.2 Persentase penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	6	6,24	104,00
1.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1.1.2.1 Konflik dalam masyarakat bernuansa Suku, Adat, Ras dan Agama (SARA)	0	0	100,00
1.1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	1.1.3.1 Persentase penurunan kasus maksiat	10	6,7	67,00
Tujuan 1.2					
Penguatan kelembagaan agama dan adat					
1.2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	1.2.1.1 Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya			
		- KAN	90	54	60,00
MISI 2					
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL.					
Tujuan 2.1					
Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme					
2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	2.1.1.1 Penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	86	87,91	102,22
2.1.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	2.1.2.1 Perangkat Daerah Provinsi menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2	2	100,00
Tujuan 2.2					
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel					
2.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.2.1.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100,00
		2.2.1.2 Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	BB	BB	100,00
		2.2.1.3 Indeks e-Government Provinsi	2,2	2,01	91,36
		2.2.1.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	73,05	132,82
		2.2.1.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Indeks)	2,5	2,46	98,40
2.2.2	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	2.2.2.1 Kesesuaian prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	80	91,97	114,96

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan 2.3					
Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif					
2.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.3.1.1 Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat pada unit kerja pelayanan publik	70	91,81	131,16
MISI 3					
MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI					
Tujuan 3.1					
Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter					
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,41	69,98	99,39
		3.1.1.2 Harapan lama sekolah	13,94	13,6	97,56
		3.1.1.3 Rata-rata lama sekolah	8,46	8,42	99,53
Tujuan 3.2					
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat					
3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	3.2.1.1 APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	73,15	73,08	99,90
		3.2.1.2 Angka Putus SMA	0,83	0,88	93,98
		3.2.1.3 Angka Putus SMK	0,82	1,53	13,41
		3.2.1.4 Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan tinggi	42,98	31,37	72,99
Tujuan 3.3					
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak					
3.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	3.3.1.1 Angka Harapan Hidup	68,79	68,66	99,81
3.3.2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	3.3.2.1 Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	2,61	2,79	93,10
		3.3.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	1,22	0,71	141,80
3.3.3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.3.3.1 Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,68	94,74	100,06
		3.3.3.2 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	62,02	62,42	100,64
		3.3.3.3 Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 di tingkat Provinsi	8,04	6,8	115,42
MISI 4					
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH					
Tujuan 4.1					
Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan					
4.1.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,58	5,26	94,27
		4.1.1.2 PDRB per kapita (Rp. Juta)	36,48	37,21	102,00
		4.1.1.3 Investasi (Rp Triliyun)	3,11	4,87	156,59
		4.1.1.4 Peningkatan Nilai Ekspor	1,5	-2,28	-152,00

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan 4.2					
Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani					
4.2.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	4.2.1.1 Skor Pola pangan harapan	85	84,3	99,18
		4.2.1.2 Persentase peningkatan produksi			
		a Padi	3,65	0,07	1,92
		b Jagung	7,87	15,51	197,08
		c Daging	1,22	1,16	95,08
		d Telur	0,69	-1,05	-152,17
		e Ikan	5,78	-3,23	-55,88
		f Kakao	2	1,98	99,00
		g Kopi	2	0,14	7,00
		h Karet	2	0,33	16,50
4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	4.2.2.1 Nilai tukar petani	106,15	97,87	92,20
Tujuan 4.3					
Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya					
4.3.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	4.3.1.1 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan			
		a Wisatawan Nusantara	5	5,3	106,00
		b Wisatawan Mancanegara	7,5	7,54	100,53
Tujuan 4.4					
Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal					
4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	4.4.1.1 Tingkat kemiskinan	6,43	7,14	88,96
4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	4.4.2.1 Tingkat pengangguran terbuka	6,5	5,09	121,69
MISI 5					
MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN.					
Tujuan 5.1					
Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah					
5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	5.1.1.1 Persentase kemandapan jalan provinsi	69	69,24	100,35
5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	5.1.2.1 Rasio angka kecelakaan lalu lintas	2,71	2,35	113,28
5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Indeks Kinerja infrastruktur irigasi provinsi	67,3	67,31	100,01
5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	5.1.4.1 Rasio Elektrifikasi	85	86,42	101,67
Tujuan 5.2					
Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan					
5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	5.2.1 Indeks Kualitas lingkungan Hidup	70,88	70,18	99,01
5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	5.2.2.1 Persentase Penurunan Luas Lahan kritis	0,18	0,18	100,00
		5.2.2.2 Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100	100	100,00
		5.2.2.3 Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot)	5	82,88	1.657,60

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan 5.3					
Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana					
5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	5.3.1.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	71	71	100,00
Rata-rata Capaian					135,72

Padang, Maret 2017

KEPALA BIRO ORGANISASI

IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196804151989021001

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
	1.1.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	7.671.484.850,00	6.766.881.857,00	88,21	904.602.993,00	11,79
Setda	1	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1.800.000.000,00	1.335.557.980,00	74,20	464.442.020,00	25,80
Setda	2	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama	5.871.484.850,00	5.431.323.877,00	92,50	440.160.973,00	7,50
	1.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	6.173.692.213,00	5.857.402.813,00	94,88	316.289.400,00	5,12
kesbangpol	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	910.000.000,00	866.014.492,00	95,17	43.985.508,00	4,83
kesbangpol	2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	818.917.725,00	700.027.100,00	85,48	118.890.625,00	14,52
pol pp	3	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.824.353.425,00	2.779.113.871,00	98,40	45.239.554,00	1,60
pol pp	4	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	278.836.763,00	230.397.863,00	82,63	48.438.900,00	17,37
kesbangpol	5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.341.584.300,00	1.281.849.487,00	95,55	59.734.813,00	4,45
	1.1.3	Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	787.433.613,00	757.281.962,00	96,17	30.151.651,00	3,83
pol pp	1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	250.576.363,00	247.399.149,00	98,73	3.177.214,00	1,27
pol pp	2	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	230.077.250,00	223.292.363,00	97,05	6.784.887,00	2,95
kesbangpol	3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	306.780.000,00	286.590.450,00	93,42	20.189.550,00	6,58
	1.2.1	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	8.683.775.310,00	8.067.653.494,00	92,90	616.121.816,00	7,10
disdik	1	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	300.000.000,00	299.599.800,00	99,87	400.200,00	0,13
binsos		Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	220.000.000,00	215.630.700,00	98,01	4.369.300,00	1,99
setda	2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	380.000.000,00	361.101.525,00	95,03	18.898.475,00	4,97
Setda	3	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	340.000.000,00	270.431.086,00	79,54	69.568.914,00	20,46
BPM	4	Program Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	1.280.490.000,00	1.278.341.063,00	99,83	2.148.937,00	0,17
disdik	5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.024.154.000,00	1.780.097.579,00	87,94	244.056.421,00	12,06
disdik	6	Program Pengembangan Pendidikan Budaya	2.732.340.500,00	2.611.898.231,00	95,59	120.442.269,00	4,41
disdik	7	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	350.000.000,00	329.377.400,00	94,11	20.622.600,00	5,89
disdik	8	Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	1.056.790.810,00	921.176.110,00	87,17	135.614.700,00	12,83

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas dan manajemen aparatur	12.024.820.834,00	11.179.454.871,00	92,97	845.365.963,00	7,03
BKD	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.170.032.700,00	3.041.690.797,00	95,95	128.341.903,00	4,05
Diklat		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	781.362.729,00	666.694.839,00	85,32	114.667.890,00	14,68
setda		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	68.500.000,00	39.717.150,00	57,98	28.782.850,00	42,02
penghubung		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	30.937.500,00	23.211.100,00	75,03	7.726.400,00	24,97
corpri		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	642.240.000,00	636.419.475,00	99,09	5.820.525,00	0,91
Diklat	2	Program Pendidikan Kedinasan	5.513.829.905,00	5.265.539.629,00	95,50	248.290.276,00	4,50
Pustaka	3	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	360.000.000,00	346.235.225,00	96,18	13.764.775,00	3,82
dishub	4	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	800.000.000,00	684.457.162,00	85,56	115.542.838,00	14,44
Setda	5	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	593.560.000,00	411.178.294,00	69,27	182.381.706,00	30,73
KPID	6	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	64.358.000,00	64.311.200,00	99,93	46.800,00	0,07
	2.1.2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	6.201.553.115,00	5.998.599.995,00	96,73	202.953.120,00	3,27
Inspektorat	1	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	6.001.438.715,00	5.818.263.895,00	96,95	183.174.820,00	3,05
Inspektorat	2	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.114.400,00	180.336.100,00	90,12	19.778.300,00	9,88
	2.2.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	117.540.577.252,00	105.098.037.396,00	89,41	12.442.539.856,00	10,59
		1	17.640.959.900,00	15.705.819.387,00	89,03	1.935.140.513,00	10,97
DPKD	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.856.491.500,00	3.951.417.343,00	81,36	905.074.157,00	18,64
Disperindag		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	373.710.200,00	315.290.000,00	84,37	58.420.200,00	15,63
Setda		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	214.936.450,00	199.723.995,00	92,92	15.212.455,00	7,08
Prasjal		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	290.000.000,00	278.866.880,00	96,16	11.133.120,00	3,84
Naker		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	151.602.000,00	148.507.000,00	97,96	3.095.000,00	2,04
DPKD	2	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	719.840.000,00	664.713.023,00	92,34	55.126.977,00	7,66
DPKD	3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	11.034.379.750,00	10.147.301.146,00	91,96	887.078.604,00	8,04
		2	952.760.238,00	800.406.673,00	84,01	152.353.565,00	15,99
Org	1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	685.000.000,00	578.320.483,00	84,43	106.679.517,00	15,57
ORG	2	Peningkatan Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi	267.760.238,00	222.086.190,00	82,94	45.674.048,00	17,06

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
		3-4	11.628.551.062,00	9.237.650.510,00	79,44	2.390.900.552,00	20,56
KPID	1	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	476.530.062,00	456.946.341,00	95,89	19.583.721,00	4,11
Dishub		Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa	350.000.000,00	234.123.199,00	66,89	115.876.801,00	33,11
Dishub	2	Program Keterbukaan Informasi	2.075.000.000,00	1.582.094.101,00	76,25	492.905.899,00	23,75
Humas	3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	848.895.000,00	682.316.740,00	80,38	166.578.260,00	19,62
Humas	4	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.323.967.000,00	2.240.399.625,00	96,40	83.567.375,00	3,60
Humas	5	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	2.191.000.000,00	1.989.119.550,00	90,79	201.880.450,00	9,21
Dishub	6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	75.000.000,00	68.176.897,00	90,90	6.823.103,00	9,10
Dishub	7	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	825.000.000,00	763.305.537,00	92,52	61.694.463,00	7,48
	8	Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah	2.463.159.000,00	1.221.168.520,00	49,58	1.241.990.480,00	50,42
		5	87.318.306.052,00	79.354.160.826,00	90,88	7.964.145.226,00	9,12
Setda	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	7.460.378.300,00	7.157.928.706,00	95,95	302.449.594,00	4,05
penghubung		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	963.063.000,00	910.858.966,00	94,58	52.204.034,00	5,42
Setda	2	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	2.626.274.950,00	2.460.386.096,00	93,68	165.888.854,00	6,32
corpri		Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	16.455.000,00	16.455.000,00	100,00	-	0,00
Setda	3	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.826.731.880,00	2.641.909.385,00	69,04	1.184.822.495,00	30,96
Setda	4	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	2.196.657.150,00	2.170.632.601,00	98,82	26.024.549,00	1,18
penghubung		Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.108.905.000,00	1.045.763.802,00	94,31	63.141.198,00	5,69
Setda	5	Program Pembangunan Materi Hukum	1.153.954.900,00	1.061.206.462,00	91,96	92.748.438,00	8,04
Setda	6	Program Peningkatan Budaya Hukum	47.783.400,00	28.366.150,00	59,36	19.417.250,00	40,64
Setda	7	Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	605.025.100,00	521.829.700,00	86,25	83.195.400,00	13,75
Setda	8	Program Sarana dan Informasi Hukum	226.451.800,00	126.584.350,00	55,90	99.867.450,00	44,10
Setda	9	Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan	738.248.400,00	690.149.698,00	93,48	48.098.702,00	6,52
Setda	10	Program Kerjasama Pembangunan	592.152.250,00	509.541.952,00	86,05	82.610.298,00	13,95
Setda	11	Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	357.743.110,00	332.120.969,00	92,84	25.622.141,00	7,16
Setda	12	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1.374.681.762,00	1.231.261.686,00	89,57	143.420.076,00	10,43
Setda	13	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	1.635.626.000,00	1.224.197.343,00	74,85	411.428.657,00	25,15
Setda	14	Program Koordinasi Pemerintahan	546.000.000,00	475.354.736,00	87,06	70.645.264,00	12,94
Setda	15	Program Pengembangan Data dan Informasi	359.793.500,00	231.256.500,00	64,27	128.537.000,00	35,73
Setda	16	Penyusunan Profil Kependudukan	459.175.000,00	307.253.438,00	66,91	151.921.562,00	33,09
Setda	17	Pengelolaan Pertanahan	1.888.500.000,00	1.599.725.569,00	84,71	288.774.431,00	15,29
Setda	18	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	241.432.000,00	215.257.868,00	89,16	26.174.132,00	10,84

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
Setda	19	Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	564.638.000,00	440.052.163,00	77,94	124.585.837,00	22,06
	20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	45.514.412.050,00	41.880.149.118,00	92,02	3.634.262.932,00	7,98
penghubung	21	Program Pengembangan Data dan Informasi	44.618.000,00	35.451.500,00	79,46	9.166.500,00	20,54
Setda	22	Penataan Keuangan Dan Aset Pemerintahan Nagari	475.000.000,00	432.237.540,00	91,00	42.762.460,00	9,00
Setda	23	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1.393.700.000,00	1.246.201.350,00	89,42	147.498.650,00	10,58
bpm	24	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan / Nagari	4.697.541.000,00	4.409.615.284,00	93,87	287.925.716,00	6,13
bpm	25	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	6.203.364.500,00	5.952.412.894,00	95,95	250.951.606,00	4,05
	2.2.2	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	10.116.147.000,00	8.620.587.690,00	85,22	1.495.559.310,00	14,78
Bappeda	1	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	1.407.860.300,00	1.197.658.029,00	85,07	210.202.271,00	14,93
Bappeda	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.602.999.100,00	3.030.613.956,00	84,11	572.385.144,00	15,89
Bappeda	3	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.045.287.600,00	3.454.563.017,00	85,40	590.724.583,00	14,60
Bappeda	4	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	1.060.000.000,00	937.752.688,00	88,47	122.247.312,00	11,53
	2.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	53.907.935.610,00	52.253.393.022,00	96,93	1.654.542.588,00	3,07
Bappeda	1	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	1.170.154.100,00	1.112.005.857,00	95,03	58.148.243,00	4,97
Setda		Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	1.225.920.700,00	1.098.690.386,00	89,62	127.230.314,00	10,38
Setda	2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	50.499.950.000,00	49.094.871.025,00	97,22	1.405.078.975,00	2,78
Penghubung		Program Peningkatan Pelayanan Publik	396.201.560,00	359.906.482,00	90,84	36.295.078,00	9,16
Setda	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	235.709.250,00	224.341.459,00	95,18	11.367.791,00	4,82
pustaka	4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	380.000.000,00	363.577.813,00	95,68	16.422.187,00	4,32
	3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	28.951.811.408,00	23.876.428.273,00	82,47	5.075.383.135,00	17,53
disdik	1	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal (PAUDNI)	7.826.504.171,00	6.100.620.467,00	77,95	1.725.883.704,00	22,05
disdik	2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.955.380.617,00	2.688.190.797,00	90,96	267.189.820,00	9,04
disdik	3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	8.996.784.670,00	7.929.019.490,00	88,13	1.067.765.180,00	11,87
disdik	4	Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter	1.619.544.000,00	1.468.885.650,00	90,70	150.658.350,00	9,30
disdik	5	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	3.248.468.350,00	3.151.503.615,00	97,02	96.964.735,00	2,98
setda	6	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	175.000.000,00	173.150.149,00	98,94	1.849.851,00	1,06
pustaka	7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	4.130.129.600,00	2.365.058.105,00	57,26	1.765.071.495,00	42,74
	3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	45.502.410.060,00	23.102.134.695,00	50,77	22.400.275.365,00	49,23

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
disdik	1	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan Menengah	45.502.410.060,00	23.102.134.695,00	50,77	22.400.275.365,00	49,23
	3.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	541.693.550.836,00	481.812.121.655,43	88,95	59.881.429.180,57	11,05
Dinkes	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.025.278.908,00	6.006.510.875,00	99,69	18.768.033,00	0,31
	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	77.205.840.790,00	75.373.631.947,00	97,63	1.832.208.843,00	2,37
	3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.646.466.475,00	1.544.495.050,00	93,81	101.971.425,00	6,19
	4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.099.604.600,00	1.036.455.150,00	94,26	63.149.450,00	5,74
	5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	486.820.200,00	447.583.400,00	91,94	39.236.800,00	8,06
	6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2.331.765.900,00	2.205.179.350,00	94,57	126.586.550,00	5,43
	7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	21.645.964.850,00	21.363.825.080,00	98,70	282.139.770,00	1,30
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	31.336.790.950,00	20.238.755.978,43	64,58	11.098.034.971,57	35,42
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	9.249.579.884,00	8.826.191.924,00	95,42	423.387.960,00	4,58
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata	33.378.107.500,00	31.022.602.766,00	92,94	2.355.504.734,00	7,06
	8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	344.923.000,00	305.067.200,00	88,45	39.855.800,00	11,55
	9	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	2.075.674.185,00	1.730.294.765,00	83,36	345.379.420,00	16,64
	10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	721.494.300,00	519.870.855,00	72,05	201.623.445,00	27,95
	11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	425.860.000,00	375.512.731,00	88,18	50.347.269,00	11,82
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	422.466.000,00	376.861.500,00	89,21	45.604.500,00	10,79
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	425.860.000,00	272.030.660,00	63,88	153.829.340,00	36,12
	12	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	140.231.472.917,00	128.369.213.684,00	91,54	11.862.259.233,00	8,46
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	35.479.643.800,00	29.237.381.818,00	82,41	6.242.261.982,00	17,59
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	88.943.451.877,00	80.099.767.114,00	90,06	8.843.684.763,00	9,94
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	52.763.517.200,00	39.651.323.521,00	75,15	13.112.193.679,00	24,85
	13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.425.000.000,00	1.333.722.816,00	93,59	91.277.184,00	6,41
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.828.725.000,00	1.818.960.810,00	99,47	9.764.190,00	0,53
	14	Program Pengadaan, Peningkatan Sapras Rumah Sakit	32.199.242.500,00	29.656.882.661,00	92,10	2.542.359.839,00	7,90
	3.3.2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	16.350.854.243,00	15.592.066.537,00	95,36	758.787.706,00	4,64
BPPR	1	Program Keluarga Berencana	76.104.000,00	75.244.250,00	98,87	859.750,00	1,13
BPPR	2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	278.753.248,00	275.083.242,00	98,68	3.670.006,00	1,32
BPPR	3	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	228.875.000,00	220.067.685,00	96,15	8.807.315,00	3,85

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
BPPR	4	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	74.431.000,00	74.322.749,00	99,85	108.251,00	0,15
dispورا	5	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2.669.430.000,00	2.586.289.170,00	96,89	83.140.830,00	3,11
setda		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	125.000.000,00	99.076.375,00	79,26	25.923.625,00	20,74
dispورا	6	Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya	350.157.050,00	348.689.550,00	99,58	1.467.500,00	0,42
dispورا	7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	8.640.710.100,00	8.272.183.966,00	95,74	368.526.134,00	4,26
setda		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	225.000.000,00	220.900.000,00	98,18	4.100.000,00	1,82
dispورا	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	1.708.578.795,00	1.478.840.000,00	86,55	229.738.795,00	13,45
dispورا	9	Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	1.277.164.050,00	1.255.321.550,00	98,29	21.842.500,00	1,71
dispورا	10	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	696.651.000,00	686.048.000,00	98,48	10.603.000,00	1,52
	3.3.3	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan terhadap hak anak	3.718.675.450,00	3.572.587.319,00	96,07	146.088.131,00	3,93
		1-2	3.433.128.700,00	3.290.917.394,00	95,86	142.211.306,00	4,14
BPPR	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	767.244.700,00	747.603.961,00	97,44	19.640.739,00	2,56
BPPR	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.682.000.000,00	1.599.203.002,00	95,08	82.796.998,00	4,92
BPPR	3	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	893.884.000,00	857.869.216,00	95,97	36.014.784,00	4,03
BPPR	4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	90.000.000,00	86.241.215,00	95,82	3.758.785,00	4,18
		3	285.546.750,00	281.669.925,00	98,64	3.876.825,00	1,36
BPPR	1	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	285.546.750,00	281.669.925,00	98,64	3.876.825,00	1,36
	4.1.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	32.990.317.535,00	29.802.825.438,00	90,34	3.187.492.097,00	9,66
			29.533.167.535,00	26.752.799.574,00	90,59	2.780.367.961,00	9,41
koperasi	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	3.559.881.625,00	3.067.004.669,00	86,15	492.876.956,00	13,85
koperasi	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	4.773.898.900,00	4.410.328.045,00	92,38	363.570.855,00	7,62
Perindag	3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.174.462.500,00	2.864.130.891,00	90,22	310.331.609,00	9,78
dkp	4	Program Pengembangan Ekonomi Maritim	11.505.238.000,00	10.566.113.550,00	91,84	939.124.450,00	8,16
bpm	5	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	870.000.000,00	852.540.584,00	97,99	17.459.416,00	2,01
Perindag	6	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	1.169.249.860,00	986.664.099,00	84,38	182.585.761,00	15,62
Perindag	7	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3.593.934.650,00	3.355.313.904,00	93,36	238.620.746,00	6,64
Perindag	8	Program Pengembangan Perwilayahan	886.502.000,00	650.703.832,00	73,40	235.798.168,00	26,60
			2.458.858.000,00	2.221.653.990,00	90,35	237.204.010,00	9,65

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
bkpm	1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.788.798.000,00	1.633.419.948,00	91,31	155.378.052,00	8,69
bkpm	2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	670.060.000,00	588.234.042,00	87,79	81.825.958,00	12,21
			998.292.000,00	828.371.874,00	82,98	169.920.126,00	17,02
Perindag	1	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	998.292.000,00	828.371.874,00	82,98	169.920.126,00	17,02
	4.2.1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	133.890.556.189,00	118.793.932.777,00	88,72	15.096.623.412,00	11,28
			6.603.049.000,00	5.754.010.198,00	87,14	849.038.802,00	12,86
BKP	1	Program Diversifikasi Pangan	793.309.000,00	477.122.800,00	60,14	316.186.200,00	39,86
BKP	2	Program Ketahanan Pangan	5.809.740.000,00	5.276.887.398,00	90,83	532.852.602,00	9,17
			127.287.507.189,00	113.039.922.579,00	88,81	14.247.584.610,00	11,19
Pertanian	1	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	642.840.000,00	604.893.397,00	94,10	37.946.603,00	5,90
Perkebunan		Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	2.372.672.000,00	2.028.287.925,00	85,49	344.384.075,00	14,51
disnak		Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	251.575.000,00	234.755.000,00	93,31	16.820.000,00	6,69
dkp		Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	965.500.000,00	794.524.000,00	82,29	170.976.000,00	17,71
Pertanian	2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	4.278.869.750,00	4.140.834.063,00	96,77	138.035.687,00	3,23
Perkebunan		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	3.150.096.300,00	2.969.692.075,00	94,27	180.404.225,00	5,73
disnak		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	4.541.367.550,00	4.129.034.790,00	90,92	412.332.760,00	9,08
dkp		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	2.316.916.500,00	2.121.241.058,00	91,55	195.675.442,00	8,45
Pertanian	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	29.518.378.948,00	26.286.503.949,00	89,05	3.231.874.999,00	10,95
Perkebunan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.753.887.800,00	1.610.638.500,00	91,83	143.249.300,00	8,17
disnak		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	15.729.709.060,00	14.423.062.652,00	91,69	1.306.646.408,00	8,31
dkp		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	16.176.889.413,00	15.571.584.772,00	96,26	605.304.641,00	3,74
Pertanian	4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	1.535.000.000,00	1.360.409.700,00	88,63	174.590.300,00	11,37
disnak		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	3.739.872.300,00	2.831.583.459,00	75,71	908.288.841,00	24,29
Perkebunan		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	1.555.000.000,00	1.084.430.250,00	69,74	470.569.750,00	30,26
bakorluh		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	2.958.750.000,00	2.818.177.590,00	95,25	140.572.410,00	4,75
dkp		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	6.187.374.080,00	5.516.677.339,00	89,16	670.696.741,00	10,84
Pertanian	5	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.920.923.000,00	1.737.290.490,00	90,44	183.632.510,00	9,56
Perkebunan		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	2.044.626.800,00	1.827.586.850,00	89,38	217.039.950,00	10,62
disnak		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	13.870.971.500,00	10.732.562.246,00	77,37	3.138.409.254,00	22,63
dkp		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	1.197.400.000,00	918.820.605,00	76,73	278.579.395,00	23,27
disnak	6	Program Pengamanan Sumber Daya Hewani	4.654.282.400,00	4.544.186.804,00	97,63	110.095.596,00	2,37
bakorluh	7	Program Pemberdayaan Penyuluhan	413.500.000,00	409.326.550,00	98,99	4.173.450,00	1,01
pertanian	8	Program Peningkatan SDM Pertanian	1.075.000.000,00	1.030.033.265,00	95,82	44.966.735,00	4,18

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
pertanian	9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	4.436.104.788,00	3.313.785.250,00	74,70	1.122.319.538,00	25,30
	4.2.2	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan					
	4.3.1	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	12.180.071.350,00	10.314.691.005,00	84,68	1.865.380.345,00	15,32
Parekraf	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	5.327.306.000,00	4.570.803.041,00	85,80	756.502.959,00	14,20
Parekraf	2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	4.463.385.150,00	4.229.401.954,00	94,76	233.983.196,00	5,24
Parekraf	3	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.089.380.200,00	1.239.688.610,00	59,33	849.691.590,00	40,67
Parekraf	4	Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	300.000.000,00	274.797.400,00	91,60	25.202.600,00	8,40
	4.4.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	25.085.852.470,00	23.851.574.639,00	95,08	1.234.277.831,00	4,92
dinsos	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	142.813.060,00	105.217.860,00	73,68	37.595.200,00	26,32
dinsos	2	Program Pembinaan Anak Terlantar	4.591.718.125,00	4.565.432.925,00	99,43	26.285.200,00	0,57
dinsos	3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	2.606.317.070,00	2.604.953.950,00	99,95	1.363.120,00	0,05
dinsos	4	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	4.704.184.470,00	4.701.336.017,00	99,94	2.848.453,00	0,06
dinsos	5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	1.082.816.450,00	1.028.086.650,00	94,95	54.729.800,00	5,05
dinsos	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.182.740.000,00	1.960.045.300,00	89,80	222.694.700,00	10,20
dinsos	7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	4.544.505.045,00	4.238.547.637,00	93,27	305.957.408,00	6,73
setda	8	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	790.000.000,00	735.567.324,00	93,11	54.432.676,00	6,89
naker	9	Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	555.800.000,00	547.917.500,00	98,58	7.882.500,00	1,42
naker	10	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin	71.675.000,00	61.947.600,00	86,43	9.727.400,00	13,57
bpm	11	Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	1.903.049.250,00	1.537.420.574,00	80,79	365.628.676,00	19,21
pu	12	Program Pengembangan Perumahan	635.751.000,00	554.751.420,00	87,26	80.999.580,00	12,74
pu	13	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.274.483.000,00	1.210.349.882,00	94,97	64.133.118,00	5,03
	4.4.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	8.455.049.500,00	7.251.993.117,00	85,77	1.203.056.383,00	14,23
naker	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.834.339.000,00	5.285.942.255,00	90,60	548.396.745,00	9,40
naker	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	1.029.698.000,00	905.252.045,00	87,91	124.445.955,00	12,09
bpm		Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	278.486.500,00	269.651.367,00	96,83	8.835.133,00	3,17
naker	3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	745.363.000,00	348.017.750,00	46,69	397.345.250,00	53,31

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
naker	4	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium	415.213.000,00	367.326.300,00	88,47	47.886.700,00	11,53
naker	5	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	151.950.000,00	75.803.400,00	49,89	76.146.600,00	50,11
	5.1.1	Meningkatnya kualitas jalan provinsi	317.475.315.327,00	294.156.028.080,00	92,65	23.319.287.247,00	7,35
prasjal	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	268.404.847.214,00	246.900.954.877,00	91,99	21.503.892.337,00	8,01
prasjal	2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	44.792.327.313,00	43.786.251.819,00	97,75	1.006.075.494,00	2,25
prasjal	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	2.818.509.800,00	2.216.032.277,00	78,62	602.477.523,00	21,38
prasjal	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1.459.631.000,00	1.252.789.107,00	85,83	206.841.893,00	14,17
	5.1.2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	14.945.759.775,00	13.075.970.807,00	87,49	1.869.788.968,00	12,51
dishub	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	201.118.000,00	195.310.110,00	97,11	5.807.890,00	2,89
dishub	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas	7.233.918.150,00	6.515.159.320,00	90,06	718.758.830,00	9,94
dishub	3	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	459.916.000,00	447.093.337,00	97,21	12.822.663,00	2,79
dishub	4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	359.039.500,00	193.459.550,00	53,88	165.579.950,00	46,12
dishub	5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.864.756.125,00	2.190.099.565,00	76,45	674.656.560,00	23,55
dishub	6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	3.827.012.000,00	3.534.848.925,00	92,37	292.163.075,00	7,63
	5.1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	171.987.936.900,00	165.278.434.520,00	96,10	6.709.502.380,00	3,90
DPSDA	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	87.074.796.000,00	84.843.354.879,00	97,44	2.231.441.121,00	2,56
DPSDA	2	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.150.000.000,00	1.135.979.300,00	98,78	14.020.700,00	1,22
DPSDA	3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	83.763.140.900,00	79.299.100.341,00	94,67	4.464.040.559,00	5,33
	5.1.4	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	2.526.657.660,00	2.063.502.412,00	81,67	463.155.248,00	18,33
DESDM	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	798.700.000,00	603.455.708,00	75,55	195.244.292,00	24,45
	2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	1.070.000.000,00	895.628.515,00	83,70	174.371.485,00	16,30
	3	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	260.000.000,00	243.593.689,00	93,69	16.406.311,00	6,31
	4	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	397.957.660,00	320.824.500,00	80,62	77.133.160,00	19,38
	5.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan	219.312.609.211,00	203.259.817.660,00	92,68	16.052.791.551,00	7,32
desdm	1	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	900.000.000,00	834.096.070,00	92,68	65.903.930,00	7,32
dkp	2	Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.214.840.000,00	2.779.378.350,00	86,45	435.461.650,00	13,55

	NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI	%	SISA	%
dpsda	3	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	16.300.801.700,00	16.161.818.150,00	99,15	138.983.550,00	0,85
dishut	4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	968.003.000,00	735.116.285,00	75,94	232.886.715,00	24,06
bapedalda		SDA	363.000.000,00	310.885.487,00	85,64	52.114.513,00	14,36
dishut	5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	347.469.950,00	213.532.650,00	61,45	133.937.300,00	38,55
dishut	6	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	4.416.717.450,00	3.861.809.500,00	87,44	554.907.950,00	12,56
bapedalda	7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.533.827.300,00	3.335.199.937,00	94,38	198.627.363,00	5,62
bapedalda	8	Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	260.000.000,00	229.760.515,00	88,37	30.239.485,00	11,63
bapedalda	9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	508.220.600,00	482.985.977,00	95,03	25.234.623,00	4,97
prasjal	10	Program Perencanaan Penataan Ruang	5.991.051.450,00	5.874.963.186,00	98,06	116.088.264,00	1,94
prasjal	11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	195.189.875,00	191.798.050,00	98,26	3.391.825,00	1,74
prasjal	12	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	32.213.403.186,00	27.000.468.826,00	83,82	5.212.934.360,00	16,18
prasjal	13	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.425.461.900,00	138.764.548.503,00	96,08	5.660.913.397,00	3,92
prasjal	14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.674.622.800,00	2.483.456.174,00	43,76	3.191.166.626,00	56,24
	5.2.2	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	2.459.905.500,00	1.991.147.450,00	80,94	468.758.050,00	19,06
dishut	1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	878.176.500,00	711.314.150,00	81,00	166.862.350,00	19,00
dishut	2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	513.376.000,00	414.920.650,00	80,82	98.455.350,00	19,18
dishut	3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	442.820.450,00	291.946.400,00	65,93	150.874.050,00	34,07
dishut	4	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	372.362.550,00	352.357.600,00	94,63	20.004.950,00	5,37
dishut	5	Program Pengendalian kebakaran hutan	253.170.000,00	220.608.650,00	87,14	32.561.350,00	12,86
	5.3.1	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	30.653.173.941,00	25.873.913.395,00	84,41	4.779.260.546,00	15,59
BPBD	1	Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam	19.680.873.941,00	19.398.791.395,00	98,57	282.082.546,00	1,43
BPBD	2	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	914.300.000,00	806.200.728,00	88,18	108.099.272,00	11,82
BPBD	3	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	3.046.000.000,00	2.576.642.136,00	84,59	469.357.864,00	15,41
BPBD	4	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	560.000.000,00	469.244.997,00	83,79	90.755.003,00	16,21
BPBD	5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	480.000.000,00	403.342.667,00	84,03	76.657.333,00	15,97
BPBD	6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	5.972.000.000,00	2.219.691.472,00	37,17	3.752.308.528,00	62,83
			1.831.287.927.152,00	1.648.268.462.879,43	90,01	183.019.464.272,57	9,99